Editor
Andika Prawanto
Muhammad Subhan Hamka

KOMUNIKASI SOSIAL

PEMBANGUNAN TERPADU

Tatik Yuniarti, Yoenita Jayadisastra, Hayu Lusianawati,
Garcia Krisnando Nathanael, Ulfia,
La Ode Muhammad Rauda Agus Udaya Manarfa,
Ramainim Saragih, Abdul Syaban,
Osu Oheoputra Husen, Kunandar Prasetyo,
Risyart Alberth Far Far.

KOMUNIKASI SOSIAL PEMBANGUNAN TERPADU

Penulis

Tatik Yuniarti, Yoenita Jayadisastra, Hayu Lusianawati,
Garcia Krisnando Nathanael, Ulfia,
La Ode Muhammad Rauda Agus Udaya Manarfa,
Ramainim Saragih, Abdul Syaban,
Osu Oheoputra Husen, Kunandar Prasetyo,
Risyart Alberth Far Far

Editor

Andika Prawanto
Muhammad Subhan Hamka

Penerbit

TOHAR MEDIA

KOMUNIKASI SOSIAL PEMBANGUNAN TERPADU

Penulis : Tatik Yuniarti, Yoenita Jayadisastra, Hayu Lusianawati, Garcia Krisnando Nathanael, Ulfia, La Ode Muhammad Rauda Agus Udaya Manarfa, Ramainim Saragih, Abdul Syaban, Osu Oheoputra Husen, Kunandar Prasetyo, Risyart Alberth Far Far.

Editor : **Andika Prawanto, Muhammad Subhan Hamka**

ISBN : 978-623-8421-08-4

Desain Sampul dan Tata Letak:

Fajar Maulana

Penerbit

CV. Tohar Media

Anggota IKAPI No.022/SSL/2019

Redaksi

Jln. Rappocini Raya Lrg. 11 No. 13 Makassar

Jln. Hamzah dg. Tompo. Perumahan Nayla Regency Blok D No. 25 Gowa

Telp. 0852-9999-3635/0852-4352-7215

Email : toharmedia@yahoo.com

Website : https://toharmedia.co.id

Cetakan Pertama Oktober 2023

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy, merekam atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak **Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah)**
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dipidana paling lama **5 (lima tahun)** dan/atau denda paling banyak **Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah**

PRAKATA

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan buku yang berjudul "Komunikasi Sosial Pembangunan Terpadu" dapat diselesaikan. Buku ini terdiri dari 11 BAB yang mencakup ruang lingkup komunikasi sosial pembangunan. Berawal dari pengantar dan teori dasar komunikasi pembangunan, hingga pengembangan rumusan baru komunikasi pembangunan, arah baru paradigma pembangunan, hubungannya dengan pembangunan berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan revolusi paradigma pembangunan di Indonesia. Kami berharap dengan terbitnya buku ini dapat berguna untuk para pembaca yang mempelajarinya. Tentunya untuk perbaikan ke depan, kami sangat berharap koreksi, saran dan masukannya untuk edisi selanjutnya.

Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah banyak memberikan kontribusi dalam penyusunan buku ini, semoga Tuhan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu.

Makassar, Oktober 2023

Penulis

Daftar Isi

Halaman Depan _i
Halaman Penerbit _ii
Kata Pengantar _iii
Daftar Isi _iv
Bab 1. Pengantar Komunikasi Sosial Pembangunan _1
1.1. Pendahuluan _1
1.2. Peran Komunikasi dalam Pembangunan _3
1.3. Keberhasilan Komunikasi dalam Proses Pembangunan _5
Bab 2. Teori-teori dalam Komunikasi Pembangunan _9
2.1. Pengantar _9
2.2. Teori Disonansi Kognitif _10
2.3. Teori Analisis Proses Interaksi _13
2.4. Teori Difusi Inovasi _15
2.5. Teori Lerner _21
2.6. Teori McClelland _23
2.7. Teori Wilbur Schramm _26
2.8. Teori Inkeles dan Smith _29
Bab 3. Interaksi Komunikasi Sosial Pembangunan _31
3.1. Interaksi dalam Komunikasi _31
3.2. Syarat-Syarat Terjadinya Interaksi _33
3.3. Komunikasi Sosial Pembangunan _33
3.4. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan _39
3.5. Penghambat Tumbuhnya Partisipasi Masyarakat _42
3.6. Dampak _42
Bab 4. Rumusan Baru Tentang Pembangunan _53
4.1. Komunikasi Sosial dan Pembangunan _53
4.2. Rumusan Baru Komunikasi Sosial dalam Pembangunan _56
4.3. Kesimpulan _65
Bab 5. Strategi Baru Pengembangan _69
5.1. Masalah Dasar Dalam Pembangunan _69
5.2. Indikator Keberhasilan Pembangunan _71
5.3. Strategi Dasar Membangun Ekonomi Rakyat _83

Bab 6. Arah Baru Paradigma Pembangunan _87
6.1. Dasar Konstitutif Pembangunan _87
6.2. Pengertian Pembangunan _89
6.3. Macam-Macam Paradigma Pembangunan _89
6.4. Paradigma Pembangunan Skala Mikro _99
6.5. Milenium Development Goals (MDGs) _101
6.6. Sustainable Development Goals (SDGs) _103
6.7. Kritik dan Arah Baru Paradigma Pembangunan _106
Bab 7. Community Development dalam Paradigma Permbangunan Berkelanjutan _107
7.1. Pendahuluan _107
7.2. Pembangunan Terpadu (*Integrated Development*) _108
7.3. Keterlibatan Masyarakat (*Community Involvement*) _111
7.4. Pemberdayaan Masyarakat (*Community Empowerment*) _113
7.5. Keadilan Sosial (*Social Justice*) _114
7.6. Hak Asasi Manusia (*Human Rights*) _115
7.7. Membangun Masyarakat (*Community Building*) _118
Bab 8. Strategi Pembangunan Berpusat Pada Rakyat _121
8.1. Konsep Pembangunan _121
8.2. Pembangunan Berpusat pada Rakyat : Melalui Pendekatan Model Pembangunan Alternatif _123
8.3.. Strategi Pembangunan Berpusat pada Rakyat _125
8.4. Etika Pembangunan Perdesaan _143
Bab 9. Pembangunan Berwawasan Lingkungan _147
9.1. Sejarah Pembangunan Berwawasan Lingkungan _147
9.2. Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan _150
9.3. Partisipasi Masyarakat dan Pengaruh Opini Publik _152
9.4. Penyebaran Inovasi Teknologi Ramah Lingkungan _156
9.5. Peningkatan Kesadaran Korporasi dan Koordinasi antara Stakeholder _160

Bab 10. Komunikasi Pembangunan dalam Penerapannya _165
10.1. Pndahuluan _165
10.2. Memajukan Pembangunan _166
10.3. Meningkatkan Taraf Sosial dan Ekonomi _168
10.4. Menanamkan Gagasan-Gagasan, Sikap Mental, dan Mengajarkan Keterampilan yang Dibutuhkan oleh Suatu Negara Berkembang _171
10.5. Menghapuskan Kemiskinan, Pengangguran, dan Ketidakadilan _172
10.6. Mendukung Aktivitas Pembangunan _174
10.7. Memberikan Informasi _174
10.8. Mengubah Perilaku _177
Bab 11. Revolusi Paradigma Pembangunan di Indonesia _179
11.1. Pendahuluan _179
11.2. Dimensi Pembangunan _181
11.3. Pertumbuhan Ekonomi untuk Pengurangan Kemiskinan dan Kesenjangan _184
11.4. Pembangunan Pertanian untuk Pertumbuhan Ekonomi _186
11.5. Perubahan Teknologi untuk Pertumbuhan Ekonomi _190
Daftar Pustaka _193

KOMUNIKASI SOSIAL PEMBANGUNAN TERPADU

Penulis
Tatik Yuniarti, Yoenita Jayadisastra, Hayu Lusianawati,
Garcia Krisnando Nathanael, Ulfia,
La Ode Muhammad Rauda Agus Udaya Manarfa,
Ramainim Saragih, Abdul Syaban,
Osu Oheoputra Husen, Kunandar Prasetyo,
Risyart Alberth Far Far

Editor
Andika Prawanto
Muhammad Subhan Hamka

Bab 1

Pengantar Komunikasi Sosial Pembangunan

1.1 Pendahuluan

Selama beberapa waktu, komunikasi telah digunakan untuk tujuan "pembangunan". Menurut Rogers (1976), teknologi komunikasi baru seperti satelit siaran telah muncul dan menjadi bagian dari kebutuhan pembangunan pada tahun 1976. Rogers mengatakan bahwa pembangunan adalah perubahan bermanfaat menuju sistem sosial dan ekonomi yang dipilih oleh negara. Dalam melaksanakan pembangunan, setiap negara memiliki pendekatan unik. Konsep pembangunan kontemporer lebih fokus pada komunikasi dan lebih luas. Pendekatan industrialisasi terhadap pembangunan berbeda dengan pengerahan massa lokal melalui organisasi sosial yang sangat bergantung pada komunikasi. Rogers menyatakan bahwa komunikasi pembangunan seharusnya dilihat sebagai suatu proses yang menyeluruh, yang mencakup memahami khalayak dan kebutuhannya, merencanakan strategi komunikasi yang dipilih, membuat pesan, menyebarkan, menerima, dan memberikan umpan balik.

Moemeka (1997) mendefinisikan kemajuan sebagai peningkatan kesejahteraan yang ditunjukkan dengan kualitas hidup yang berubah menjadi lebih baik. Komunikasi adalah

pertukaran informasi antara individu atau kelompok melalui sarana manusia atau teknologi. Menurut Rogers (2010) komunikasi terjadi jika ada pemahaman yang sama antar satu dengan yang lain. Dari definisi ini, pengembangan dukungan komunikasi didefinisikan sebagai perencanaan dan pelaksanaan komunikasi dalam pembangunan secara sistematis. Komunikasi pembangunan telah dianggap sebagai alat strategis untuk mendorong perubahan dan meningkatkan proses pembangunan sejak awal.

Menurut Quebral (1972), komunikasi pembangunan bertujuan untuk memajukan pembangunan, yang berarti bahwa masyarakat dengan pendapatan, status sosial-ekonomi, dan taraf hidup yang lebih rendah harus dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Untuk memungkinkan inovasi mengubah masyarakat dengan baik, orang harus diinformasikan tentang konsep dan keterampilan yang belum diketahui. Salah satu pendekatan pembangunan adalah komunikasi, yang memungkinkan pemerintah untuk menyampaikan program pembangunan mereka kepada masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah harus mempunyai pertimbangan pendekatan yang tepat dalam menyampaikan pesan agar mencapai hasil yang diharapkan.

Model Kincaid menunjukkan bahwa proses komunikasi adalah terjadinya kesepahaman dari ketidakpastian. Setelah mencapai kesepakatan, semua orang dapat bertindak. Hal itu seperti tersaji pada Gambar 1.1 berikut ini.

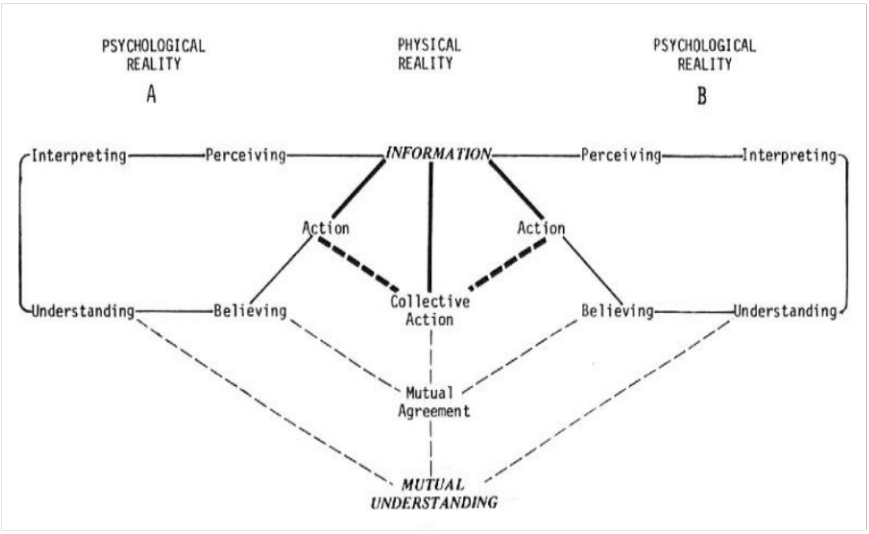

Gambar 1.1 Komponen dasar model komunikasi konvergensi

(Sumber : Kincaid, 1979)

Berdasarkan **Gambar 1.1** dapat dijelaskan bahwa model komunikasi konvergensi yang dikemukakan oleh Kincaid terjadi dari hasil menciptakan persepsi yang sama dari hasil interpretasi dan pemahaman yang dipercaya bersama dari suatu informasi yang berasal kedua belah pihak. Tahapannya mulai dari masing-masing menerima informasi, kemudian menginterpretasikan pesan tersebut dan mempercayainya sebagai bentuk pemahaman.

1.2 Peran Komunikasi dalam Pembangunan

Rogers (2010) menyatakan komunikasi adalah inti dari perubahan sosial. Komunikasi dalam pembangunan harus berkaitan dengan arah perubahan yang lebih baik atau lebih maju dari keadaan sebelumnya. Pada dasarnya, pembangunan terdiri dari minimal tiga elemen: pertama, komunikator pembangunan yang dapat berasal dari pemerintah atau masyarakat; kedua, pesan tentang konteks pembangunan dimana terdapat gagasan-gagasan yang disampaikan; dan komunikan, terkait dengan penerima informasi pembangunan yang merupakan masyarakat

umum, termasuk warga desa atau kota yang menjadi sasaran pembangunan.

Komunikasi dalam pembangunan adalah topik yang mencakup banyak disiplin ilmu, termasuk ilmu sosial, antropologi, psikologi, manajemen, budaya, dan ilmu sosial lainnya. Ini meliputi studi teoritis dan kebijakan yang luas yang berfokus pada studi media hingga fokus yang lebih praktis pada kesehatan dan pendidikan. Komunikasi pembangunan mencakup nilai-nilai penting untuk individu dan transformasi sosial, termasuk tujuan, keterlibatan, tanggung jawab, kegunaan, pendidikan (isi dan penyajian yang menyadarkan), dan keberlangsungan (Flor, 2007).

Menurut McPhail (2009), komunikasi pembangunan adalah proses intervensi sistematis atau strategis melalui media (cetak, radio, telepon, video, televisi dan internet) atau pendidikan (pendidikan, keaksaraan, sekolah) untuk mencapai tujuan perubahan sosial yang positif. Perubahan dapat terjadi secara pribadi dalam bidang spiritual, sosial, budaya, ekonomi, atau politik. Waisbord menunjukkan bahwa tindakan strategis secara kolektif adalah masalah penting dalam komunikasi pembangunan dan perubahan sosial. Partisipasi aktif masyarakat dalam perubahan sosial secara normatif diinginkan dan secara pragmatis untuk menghasilkan yang berkelanjutan. Hal ini tentang bagaimana komunikasi, strategi dan partisipasi terkait satu dengan yang lain.

Komunikasi partisipatif dan strategis menjadi bidang studi yang saling berhubungan karena perubahan sosial tidak terjadi begitu saja. Tanpa partisipasi, perubahan sosial tidak efektif, sedangkan tanpa strategi, partisipasi tidak efektif. Perubahan sosial adalah hasil dari upaya untuk mengubah hubungan kekuasaan dengan meningkatkan peluang partisipasi; tanpa strategi, perubahan sosial tidak dapat terjadi (Waisbord dalam Wilkins et al. 2014).

1.3 Keberhasilan Komunikasi dalam Proses Pembangunan

Penyebaran inovasi atau temuan pembangunan dapat menunjukkan keberhasilan komunikasi dalam proses pembangunan. Penggunaan media internet atau cyber extension, adalah salah satu kemajuan teknologi yang dapat mendukung keberhasilan pembangunan. Teknologi ini mengirimkan informasi pertanian melalui area cyber, yang merupakan ruang imajiner di balik peralatan komunikasi yang terhubung ke jaringan komputer. Area cyber ini memanfaatkan kekuatan jaringan, komunikasi komputer, dan multimedia interaktif untuk memfasilitasi mekanisme berbagai informasi atau pengetahuan (Wijekoon *et al*., 2009). Cyber extension harus diterapkan untuk menghubungkan lembaga penelitian, pengembangan, dan penelitian dengan disseminator inovasi, pendidik, petani, dan kelompok stakeholder lainnya yang masing-masing membutuhkan berbagi jenis informasi. Hal ini akan memungkinan mereka bekerja sama dan saling melengkapi. Oleh karena itu, diharapkan ketika cyber extension digunakan, maka dapat membentuk program penyuluhan untuk direvitalisasi, terutama dalam membangun jejaring kerja dan kerja sama penyuluhan pertanian dengan lembaga terkait (Pertanian, 2009).

Beberapa kelompok petani di Indonesia telah menggunakan internet untuk mendapatkan informasi dan mempromosikan hasil produksi mereka. Mereka menggunakan fasilitas di *Community Training and Learning Centre* (CTLC) berada di Pancasari (Bali) dan Pabelan (Salatiga), yang dibangun oleh Microsoft dan lembaga non profit di bawah Program *Unlimited Potential* (Lubis, 2010). Misalnya, petani menggunakan internet untuk mempelajari teknologi budidaya paprika dalam rumah kaca. Produk pertanian yang diusahakan memiliki permintaan yang terus meningkat sejak profil produksi didistribusikan di internet. Informasi yang disampaikan melalui internet yang dapat memutuskan hubungan antara petani dan tengkulak, yang

kerapkali mematok harga yang jauh di bawah standar harga pasar.

Melalui dana dari Loa ADB, Departemen Pertanian menjalankan program Peningkatan Kesejahteraan Petani Melalui Inovasi (PFI3P) atau Program Peningkatan Pendapatan Petani Melalui Inovasi (P4MI). Melalui sentuhan inovasi pertanian, tujuan dari program-program ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik bagi para petani yang berada pada lahan-lahan yang kurang produktif. Tahapannya dimulai dari produksi sampai pada pemasaran hasilnya kepada masyarakat luas. Kegiatan yang telah dilakukan ini dapat memberikan hasil dalam mengembangkan sumber informasi pertanian baik lokal maupun nasional. Hal ini telah dicapai melalui program penggunaan website nasional, berdirinya pusat informasi pertanian lokal di kabupaten dan dukungan teknologi informasi dan komunikasi dapat mengembangkan sumber informasi pasar dan pertanian kepada seluruh masyarakat (Mulyandari & Hartati, 2011).

Program "Dari Desa ke Desa" dan acara "Klompencapir" adalah contoh keberhasilan komunikasi pembangunan sebelum adanya internet pada tahun 80-an. Acara tersebut selalu ditayangkan setiap minggu di TVRI pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Tujuan acara adalah untuk mendorong pembangunan pedesaan Indonesia. Presiden Soeharto berkunjung ke sebuah daerah dan berbicara langsung dengan perangkat desa dan petani dalam acara "Dari Desa ke Desa".

Dalam acara tersebut, Pemerintah berkomunikasi dengan masyarakat melalui pertemuan dan komunikasi ini. Sebaliknya, petani-petani yang luar biasa dari berbagai daerah diadu dalam acara "Klompencapir". Acara tersebut menampilkan petani-petani yang telah menunjukkan kemampuan dan pengetahuan mereka tentang pertanian, termasuk teknik bertanam yang baik dan pengetahuan tentang pupuk.

Indonesia pada masa itu mampu mencapai swasembada pangan, dan FAO memberikan penghargaan pada tahun 1984. Menteri Komunikasi dan Informasi Sofyan Djalil, yang menjabat selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, terinspirasi untuk menghidupkan kembali acara Klompencapir dan kemudian membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). KIM mengharapkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam mencari dan mengolah data untuk kepentingan mereka sendiri. Servaes (2008) menyatakan bahwa model komunikasi ini terkait dengan komunikasi partisipatif dan memberikan penekanan pada komunikasi pembangunan. Dalam model komunikasi partisipatif, masyarakat dianggap sebagai peserta pembangunan atau aktor pengendali. Masyarakat akan merasa senang dengan diri mereka sendiri daripada tertekan. Membebaskan dan menghormati budaya lokal adalah tujuan pembangunan. Selain itu, model partisipatif melihat orang-orang sebagai inti pembangunan, yang berarti mendorong masyarakat setempat untuk aktif terlibat dalam proses pembangunan.

Berdasarkan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019, lembaga ini telah memberdayakan dan mengembangkan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) berjumlah 200 KIM yang tersebar ke seluruh Indonesia. KIM berperan meneruskan informasi ke seluruh daerah di Indonesia, terutama wilayah yang masuk perbatasan, dan rawan konflik maupun pasca konflik. Selain itu, ada 48 tenaga humas pemerintah yang ditugaskan untuk berkomunikasi dengan publik, terutama mengenai aspirasi publik terkait program pemerintah. Kementerian ini kemudian berhasil mendorong terbangunnya Media Center sebanyak 171 tempat sebagai bentuk dari implementasi Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada 34 kementerian, 129 lembaga negara, 34 provinsi, 399 kabupaten, dan 98 kota dapat menyebarkan informasi dan komunikasi publik. Kementerian ini

juga telah memberdayakan 6.000 relawan TIK dari seluruh masyarakat untuk melakukan transformasi pemahaman dan memberikan penunjukan dalam menggunakan TIK yang sehat demi untuk menuntaskan kesenjangan digital (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2015).

Bab 2

Teori-Teori Dalam Komunikasi Pembangunan

2.1 Pengantar

Komunikasi dan pembangunan adalah dua hal yang bisa berjalan beriringan. Defenisi umum dari komunikasi pembangunan adalah kegiatan penyampaian informasi yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi pada sebuah masyarakat atau negara. Menurut (Nasution, 2001) komunikasi pembangunan memiliki dua makna yaitu makna luas dan sempit. Dalam arti luas, peran komunikasi pembangunan dianggap sebagai pertukaran pesan antara semua pihak yang terlibat dalam upaya pembangunan yang dilakukan di pemerintah dan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penyajian hingga penilaian pembangunan itu sendiri. Dalam arti yang lebih sempit, komunikasi pembangunan masih dikatakan mencakup semua kegiatan, metode dan teknik untuk mengkomunikasikan gagasan dan keterampilan yang berkaitan dengan pembangunan, yang diprakarsai oleh para pelaksana pembangunan dan kepada masyarakat luas. Dalam hal ini, komunikasi pembangunan adalah tentang orang-orang yang ingin mengetahui, memahami, menerima, berpartisipasi dan menerapkan pemikiran atau gagasan yang dikomunikasikan untuk meningkatkan perkembangan masyarakat. Sehingga

peningkatan kualitas dan kreativitas masyarakat untuk menunjang kehidupan mereka dapat terlihat dengan baik.

Berdasarkan defenisi secara umum dari komunikasi pembangunan di atas, maka dapat dikatakan bahwa komunikasi bisa digunakan sebagai alat, sarana, media atau saluran untuk penyampaian ide dan gagasan dalam menunjang pembangunan. Karena defenisi sederhananya sebuah pembangunan adalah perubahan ssstem sosial ekonomi yang diputuskan bersama sebagai kehendak sebuah bangsa (Olivia & Pikri, 2020). Sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat dinilai cukup berhasil dalam melaksanakan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi masyarakat yang cukup tinggi (Parwati & Pithaloka, 2022).

Dari berbagai teori komunikasi, penulis mengambil beberapa teori yang paling relevan dengan proses pembangunan sosial yaitu Teori Disonansi Kognitif, Teori Analisis Proses Interaksi, Teori Difusi Inovasi. Teori Lerner, Teori McCleland, Teori Wilbur Schramm, dan Teori Inkeles dan Smith.

2.2 Teori Disonansi Kognitif

Teori ini biasa disebut teori Festinger (1957), disonansi kognitif, yang dimulai dengan gagasan bahwa suatu media memiliki unsur-unsur kognitif yang berbeda seperti sikap, persepsi, pengetahuan, dan perilaku. Teori ini sangat penting dalam sejarah psikologi sosial, karena menganalisis aspek perubahan yang ada dalam individu. Keempat elemen Teori Fastinger itu memiliki keeratan hubungan satu sama lain dengan tiga pengkategorian:

1. Kosong atau tidak berhubungan, ini berarti tidak ada elemen yang benar-benar dapat mempengaruhi elemen lainnya.
2. Sesuai artinya artinya unsur-unsur tersebut dapat saling menguatkan atau mendukung.

3. Tidak cocok atau terjadi disonansi yang berarti ada ketidakcocokan dimana satu elemen tidak dapat mengikuti elemen lainnya.

Menurut Raharjo & Kartika (2019), terdapat dua pendapat yang tidak menerima Teori Disonansi, yaitu:

1. Pendapat tentang Disonansi adalah pemikiran yang menimbulkan informasi atau tekanan yang dapat menciptakan kebutuhan akan perubahan. Contoh sederhana adalah di masa covid 19, anjuran untuk senantiasa mencuci tangan, menjaga kebersihan, mengurangi kerumunan adalah kewajiban yang harus diikuti.
2. Pendapat selanjutnya mengikuti secala alamiah dasar dari pendapat sebelumnya. .

Menurut Festinger (1957) ada 4 (empat) sumber disonansi yang kerap terjadi pada individu, yaitu:

1. Inkonsistensi logika (*logical incostency*), yang artinya pemikiran logis yang meniadakan pemikiran logis lainnya. Misalnya, ketika masa Covid-19 banyak masyarakat yang tidak mempercayai vaksin yang telah dianjurkan oleh pemerintah, tetapi tetap menggunakan vaksin tersebut.
2. Nilai budaya (*cultural value*), yang artinya budaya yang dimiliki seseorang berbeda-beda dengan budaya orang lain. Misalnya, budaya di Indonesia mengucapkan kata "permisi, punten, tabe" untuk melewati orang yang lebih tua dianggap sopan, namun untuk di negara lain hal tersebut bukanlah sebuah budaya.
3. Pendapat umum (*opinion generality*), artinya disonansi dapat timbul karena suatu pendapat yang berbeda dengan pendapat umum. Misalnya publik berpendapat bahwa olahragawan itu sudah pasti badannya sehat bugar tanpa penyakit, namun beberapa olahragawan yang terserang penyakit autoimun karena olahraga berlebihan.

4. Pengalaman masa lalu (*pass experience*), yaitu disonansi yang muncul ketika suatu keadaan tidak sesuai dengan masa lalunya. Misalnya, seseorang mengetahui bahwa dirinya akan sakit (flu, demam) jika terkena hujan. Yang tejadi adalah sakit tersebut menjadi disonansi ketika suatu hari dia terkena hujan namun tidak sakit.

Berdasarkan keempat unsur di atas, dapat dikatakan bahwa teori disonansi memiliki pengaruh yang besar terhadap kemajuan pembangunan sosial ke depan. Hal ini dijelaskan oleh Festinger (1957) yang mana teori disonansi lebih pada ketidaksesuaian antara pemikirann dan pengambilan keputusan yang dimiliki oleh individu. Terlebih jika pada elemen tersebut tidak dibarengi dengan keseimbangan pemikiran positif yang mengarah pada sebuah tujuan yang baik, maka dapat dipastikan individu tersebut akan mengalami kesesatan, kegagalan hingga pada keterpurukan dalam kehidupannya. Beberapa contoh yang bisa dipetik adalah maraknya kriminalistas akibat dari kebohongan, penipuan, dan masih banyak lainnya.

Contoh sederhana dari teori disonansi adalah ketika seseorang mengetahui bahwa menggunakan gadget di masa kini secara berlebihan sangatlah buruk, sehingga seseorang tersebut menggunakan hanya untuk kebutuhan komunikasi saja. Maka yang terjadi adalah seseorang tersebut telah mengalami disonansi terhadap gadget. Namun, sebagian orang mengatakan bahwa gadget adalah selain sumber informasi juga bisa digunakan untuk menambah pundi-pundi keuangan, sehingga seseorang tersebut pada akhirnya mengubah pendapatnya akibat pengaruh dari pendapat orang lain. Masih banyak contoh sederhana yang kerap kita alami di keseharian kita tanpa disadari bahwa hal tersebut sudah termasuk pada teori Disonansi Kognitif.

2.3 Teori Analisis Proses Interaksi

Teori analisa proses interaksi (*interaction process analysis*) yang dikemukakan oleh Bales (1950) kini menjadi klasik. Teori ini menjelaskan komunikasi kelompok kecil dengan menjelaskan jenis pesan yang dipertukarkan, bagaimana pesan tersebut dapat membentuk peran dan kepribadian anggota kelompok, dan bagaimana pesan tersebut dapat mempengaruhi sifat kelompok secara keseluruhan.

Dalam sebuah kelompok, setiap orang dapat menunjukkan sikap positif atau campuran dengan bersikap ramah, mendramatisasi, atau menyetujui. Sebaliknya, mereka juga dapat menunjukkan sikap negatif atau sikap campuran berupa penolakan, ketegangan, dan permusuhan. Sehingga dalam melakukan berbagai tugas kelompok, setiap orang dapat meminta informasi, meminta pendapat atau opini, meminta saran atau kritik, memberikan saran atau kritik, mengemukakan pendapat dan memberikan informasi.

Dari 12 jenis pesan dalam komunikasi kelompok di atas, menurut Bales (1950) dapat disederhanakan menjadi 4 kelompok pesan yaitu : tindakan positif, memberi jawab, memberi pertanyaan dan tindakan negatif. Lebih lanjut dikatakan bahwa terdapat 6 kategori dalam teori analisis proses interaksi, yaitu :

1. Jika masing-masing anggota tim tidak saling memberikan informasi yang cukup, menurut Bales, tim tersebut akan mengalami apa yang disebut "masalah komunikasi".
2. Jika setiap anggota kelompok tidak memberikan pendapat satu sama lain maka seluruh kelompok akan mengalami apa yang dikenal sebagai “masalah evaluasi”
3. Jika masing-masing anggota kelompok tidak saling bertanya, tidak memberikan saran, maka kelompok tersebut pasti mengalami “masalah pengawasan”.

4. Jika semua anggota kelompok tidak dapat mencapai kesepakatan, kelompok tersebut akan memiliki "masalah keputusan".
5. Jika tidak ada ketenangan atau kedamaian dalam forum grup, grup tersebut pasti mengalami "masalah ketenangan".
6. Jika anggota kelompok bermusuhan dan bersahabat, maka akan terjadi "masalah reintegrasi", artinya kelompok tidak dapat membangun persatuan di dalam kelompok.

Ada dua bagian utama dari teori Bales yang biasa disebut sebagai dua tipe umum perilaku komunikatif. Penggolongan ini sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan kelompok. Yang pertama disebut "*sosioemosional*" yang diekspresikan dengan tindakan seperti "bersikap ramah, menunjukkan ketegangan, dan mendramatisir". Yang kedua adalah "perilaku tugas" yang diwakili oleh pemberian saran, opini, dan informasi.

Menurut teori Bales kepemimpinan juga dapat dibentuk, dalam tim yang sama akan terdapat dua jenis kepemimpinan yang berbeda yaitu "kepemimpinan kerja" dan "kepemimpinan emosional". Dan biasanya mereka termasuk orang yang berbeda. Menurut Morissan (2013), uraian mengenai dua pemimpin itu adalah berikut ini.

a) Pemimpin pekerjaan (*Task leader*) adalah anggota yang selalu memfasilitasi dan mengkoordinir pendapat anggota yang berbeda terkait dengan kinerja kerja sama. Misalnya, pada sebuah kelompok mahasiswa KKN. Biasanya ada satu orang yang rajin untuk memberitahu anggota lain terkait jadwal, persiapan proposal atau topik-topik untuk program kerja di kegiatan KKN, mengambil inisiatif untuk mencari lokasi yang cocok dengan program kerja yang telah ditetapkan, dan banyak lagi. Pada dasarnya, seseorang yang memiliki harapan tinggi terhadap timnya untuk berhasil menyelesaikan kegiatan kelompok.

b) Pemimpin sosio emosional (*socioemotional leader*) adalah anggota kelompok yang bekerja untuk meningkatkan hubungan dalam kelompok, berfokus pada interaksi dalam bidang positif dan negatif, yang lebih mementingkan kesatuan hubungan dalam kelompok, yang selalu berusaha mengurangi konflik dan ketegangan, mampu memuji atau menghargai kesuksesan seseorang dan sering mendorong hubungan yang positif.

Jika menilik dari kategori teori Bales, maka dapat terlihat jelas teori ini merupakan salah satu teori yang mempengaruhi proses maju dan mundurnya perkembangan sosial. Karena teori ini menjelaskan secara rinci individu-individu yang terkait dengan suatu kelompok harus menjaga keseimbangan, keharmonisan, toleransi, pertimbangan konsensus untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini terkait dengan bagaimana individu bisa menyampaikan sebuah informasi, bisa menjawab sebuah pesan, bisa memberi sebuah pendapat, bisa saling bertukar informasi untuk kemajuan dari kelompok. Yang mana, jika tidak bisa memenuhi kategori dari teori analisis proses interaksi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dipastikan kelompok tersebut memiliki banyak permasalahan yang bisa menghambat proses pembangunan sosial. Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan bisa berjalan dengan baik dimulai dari komunikasi di lingkup individu dan kelompok.

2.4 Teori Difusi Inovasi

Teori Difusi Inovasi saat ini gencar diterapkan pada negara-negara yang sedang membangun atau berkembang. Hal ini sesuai dengan defenisi secara umum bahwa difusi inovasi adalah penemuan baru yang disebarluaskan untuk pembangunan. Teori ini dikemukakan oleh (Rogers, 2010) dengan didefinisikan sebagai proses dimana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam jangka waktu

tertentu di antara para anggota suatu sistem sosial. Lebih lanjut dikatakan bahwa penyebaran inovasi ini berkesinambungan dari satu tempat ke tempat lain. Difusi inovasi juga berjalan beriringan dengan perubahan sosial pada masyarakat. Dimana terjadi perubahan sosial dapat disebabkan oleh masuknya ide-ide, atau ide-ide baru dalam menunjang kehidupan masyarakat.

Fungsi komunikasi di sini adalah proses di mana para pelaku menghasilkan informasi dan bertukar informasi untuk mencapai pemahaman yang sama. Komunikasi juga bisa bermakna saluran atau media penyampaian gagasan atau inovasi baru tersebut antar anggota masyarakat atau pada suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Sehingga dapat dipastikan peranan komunikasi sangat penting dalam penyebarluasan inovasi baru. Karena dalam pesan yang disampaikan terdapat kebaruan yang memberikan ciri khusus pada spillover dengan tingkat ketidakpastian. Artinya, tingkat ketidakpastian tentang sesuatu dapat dikurangi dengan mengumpulkan informasi. Menurut (Rogers, 2010) dalam proses limpahan inovasi terdapat faktor-faktor yang menyertainya, yaitu :

1. Inovasi. Inovasi didefinisikan sebagai ide, gagasan, tindakan atau kebaikan yang dianggap baru oleh seseorang atau kelompok sosial. Kebaruan ini diukur secara subyektif menurut masing-masing individu yang menerimanya. Misalnya bagi orang awam, menggunakan masker pada saat pandemic covid19 adalah hal yang paling menyiksa. Namun berbeda dengan petugas kesehatan yang menjadikan masker sebagai bagian dari uniform mereka.
2. Saluran komunikasi. Saluran komunikasi dalam limpahan inovasi merupakan alat untuk menyampaikan pesan atau informasi tentang inovasi dari sumber kepada penerima atau pelanggan. Saluran komunikasi harus relevan dengan audiens sasaran. Jika ditujukan kepada masyarakat umum,

saluran yang digunakan adalah media massa. Namun, jika sasaran yang dituju adalah individu, maka saluran yang digunakan adalah komunikasi personal.

3. Jangka Waktu. Jangka waktu dalam difusi inovasi adalah proses pengambilan keputusan sejak seseorang menerima informasi tentang suatu inovasi sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya. *Deadline* merupakan faktor yang sangat penting karena berhubungan dengan proses pengambilan keputusan, yang bisa terlihat dari apakah dia termasuk pengikut awal atau pengikut akhir dari sebuah inovasi.

4. *System social*. System social disini adalah tata tingkah laku terkait hal dan kewajiban yang melekat pada diri seseorang dalam masyarakat. System social juga sangat penting pada saat pemecahan masalah, karena disini dapat terlihat bagaimana masyarakat bisa menyelesaikan permasalahannya untuk mencapai tujuan bersama. Sistem sosial juga dapat menjadi sasaran suatu inovasi, dimana masyarakat dapat menerima atau menolak inovasi tersebut.

Sedangkan dari perspektif masyarakat sebagai sasaran difusi inovasi, terdapat beberapa atribut yang mencirikan inovasi, yaitu: yaitu :

1. *Keuntungan relative.* Artinya masyarakat yang menerima informasi tentang sebuah inovasi dengan beberapa pertimbangan, salah satunya adalah apakah inovasi tersebut memberikan keuntungan pada kehidupannya atau tidak.

2. *Keserasian.* Artinya adalah apakah inovasi yang disampaikan tergantung pada konteks, budaya, dan nilai-nilai masyarakat itu sendiri. Harmoni disini berarti kebutuhan yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, inovasi yang kurang cocok atau kurang sesuai tersebut di atas tidak akan diterima secepat inovasi yang memenuhi kebutuhan masyarakat.

3. *Kerumitan.* Kompleksitas adalah sejauh mana suatu inovasi dianggap begitu kompleks sehingga relatif sulit bagi seseorang untuk memahami dan mempraktikkannya. Semakin kompleks suatu inovasi maka semakin sulit untuk diterima, sebaliknya semakin mudah suatu inovasi maka semakin mudah untuk diterima.

4. *Dapat diuji coba.* Artinya adalah jika inovasi dapat diimplementasikan dalam skala kecil terlebih dahulu, maka akan lebih mudah diadopsi daripada inovasi yang tidak dapat dicoba. Dari uji coba inovasi tersebut dapat terlihat kekurangan dan kelebihannya sehingga dapat dengan mudah diterima dan dievaluasi apa yang menjadi kekurangannya.

5. *Dapat dilihat.* Salah satu elemen inovasi yang sangat penting adalah yang dapat dilihat bentuknya, sehingga individu dapat dengan mudah mengingat dan mempercayai informasi tersebut.

Masyarakat menghadapi prevalensi inovasi dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu :

1. *Innovator.* Seorang inovator adalah seseorang yang memperkenalkan inovasi, inisiatif, ide, atau metode baru. Ciri-ciri seorang inovator adalah mereka yang menyukai tantangan dan berani mengambil resiko.

2. *Penerima dini.* Pelopor atau perintis diartikan sebagai orang yang mulai melakukan sesuatu. Biasanya dalam sebuah kelompok, penerima dini ini adalah kelompok yang bersedia untuk memulai sebuah inovasi. Dalam lingkungan biasanya perintis ini adalah orang-orang terpandang atau yang memiliki pengikut dalam lingkaran sosial.

3. *Mayoritas dini.* Pengikut awal adalah mereka yang mengikuti perintis atau pengikut awal suatu inovasi. Mereknya adalah

orang yang selalu berpikir matang sebelum mengambil keputusan.

4. *Mayoritas belakangan.* Pengikut terakhir adalah mereka yang bersama-sama menjadi pengikut terakhir dari suatu inovasi. Keistimewaannya adalah suatu tim memiliki pertimbangan yang realistis tentang fakta dan keunggulan suatu inovasi yang ingin diadopsinya.

5. *Leggards (Kelompok Kolot).* Leggards atau lebih dikenal dengan kelompok konservatif adalah kelompok terakhir yang paling sulit menerima inovasi baru. Meskipun tidak banyak dalam sistem sosial masyarakat, tetapi mereka juga menjadi salah satu penyebab ketidakberhasilan sebuah inovasi di sebuah masyarakat. Ciri utama kelompok ini adalah sangat sulit melihat dan menerima perubahan.

Untuk tahap penerimaan suatu inovasi dibagi atas :

1. *Tahap pengetahuan.* Tahap pengetahuan adalah tahapan pertama dalam penyeraban informasi tentang inovasi baru. Tujuan dari penyampaian informasi itu adalah agar seseorang atau khalayak sasaran dapat mengetahui dan memahami bagaimana bentuk dari inovasi terebut. Dalam hal ini lebih pada penyamaan makna terlebih dahulu mengenai inovasi yang akan disampaikan. Karena, ketika seseorang memahami bentuk dari inovasi tersebut, maka akan lebih mudah menerimanya. Ada tiga ciri utama yang perlu masyarakat ketahui mengenai inovasi ini adalah kesadaran bahwa inovasi tersebut memiliki bentuk nyata bukan hanya angan-angan, memiliki pengetahuan yang baik tentang kegunaan inovasi tersebut dan pengetahuan di balik cara kerja inovasi tersebut. Karena akan menjadi percuma apabila inovasi hadir tidak disertai dengan pengetahuan dalam penggunaan atau pengoperasiannya.

2. *Tahap persuasive.* Pada tahap ini, seseorang akan membentuk sikap yang mungkin menyetujui atau tidak menyetujui

inovasi tersebut. Pada titik ini seseorang juga akan lebih aktif dalam mencari informasi tentang inovasi baru tersebut, termasuk pro dan kontra dalam menerima inovasi tersebut. Sikap yang ditunjukkan individu dapat berupa penerimaan yang merupakan sikap yang baik, atau penolakan yang berupa sikap yang buruk. Tahap persuasi ini juga menjadi ajang untuk menghubungkan persepsi target audience terhadap inovasi baru tersebut.

3. *Tahap keputusan.* Pada tahap ini, seseorang membuat keputusan mengenai inovasi untuk menerima atau menolaknya. Beberapa faktor yang mempengaruhi tahap keputusan pada sebuah inovasi adalah praktik sebelumnya, perasaan atau kebutuhan, keinovatifannya, dan norma dalam sistem sosial masyarakat.

4. *Tahap implementasi.* Pada tahap implementasi ini, individu akan memilih untuk mengadopsi perbaikan baru. Jika seseorang memilih untuk mengadopsi suatu inovasi, ia akan mengimplementasikannya dalam kehidupannya, tetapi jika tidak, ia akan mengabaikan kehadiran inovasi. Jika tahap sebelumnya lebih banyak berpikir dan memutuskan, maka pada tahap implementasi ini individu lebih diarahkan pada perubahan perilaku yaitu mengimplementasikan inovasi tersebut dalam kehidupannya.

5. *Tahap pemastian.* Pada titik ini, seseorang akan menilai atau mengevaluasi dan memutuskan apakah akan terus menggunakan inovasi tersebut atau bahkan menghentikannya. Selain itu, ia juga akan mencari berbagai penguatan atas keputusan yang dibuat sebelumnya. Misalnya, jika dia berhenti melakukan inovasi, mungkin karena dia tidak puas dengan inovasi tersebut atau mungkin dia telah menemukan inovasi yang lebih baik.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa difusi inovasi merupakan langkah yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang untuk dapat menciptakan hal-hal baru yang dapat digunakan untuk kehidupan yang lebih baik. Bisa jadi pula, inovasi yang baru tersebut adalah hasil pemikiran dari pemanfaatan potensi-potensi lokal yang dimiliki oleh masyarakat sekitar misalnya daur ulang sampah yang bisa menghasilkan sebuah produk ekonomi kreatif. Hal tersebut sangatlah jelas berguna untuk masyarakat secara luas. Sehingga inovasi sendiri bisa dikategorikan berupa benda, kegiatan atau sistem sosial yang mendukung perbaikan dan perubahan sosial di masyarakat. Kemudian, dengan perkembangan teknologi yang ada, informasi mengenai inovasi lebih mudah tersebar dan diserap oleh masyarakat. Oleh karena itu, teori ini dapat mendorong manusia untuk selalu mengantisipasi dan dengan mudah beradaptasi terhadap perubahan tertentu yang terjadi. Dengan mindset tersebut, suatu negara akan memiliki banyak inovator atau inventor baru yang dapat berkontribusi bagi pembangunan bangsa dan negara.

2.5 Teori Lerner

Lerner (1978) adalah salah satu perintis dari teori modernisasi. Asumsi dasar dari teori modernisasi adalah apabila sebuah daerah terbuka dari isolasi geografis dengan adanya pembangunan atau akses jalan raya, maka perubahan sosial akan terjadi melalui empat tahap yang saling berhubungan. Pertama, dengan terbukanya isolasi geografis, memicu urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota untuk memenuhi keinginannya akan kehidupan yang lebih baik. Yang kedua adalah literasi dimana urbanisasi memicu terjadinya literasi. (Hidayat, 2006) mengemukakan bahwa dengan melek huruf memudahkan untuk melatih tenaga kerja dalam pengembangan industri yang dapat meningkatkan pertumbuhan nasional. Ketiga adalah exposure media massa, dimana literasi tercipta melalui penggunaan media massa. Sangat penting bahwa media

massa mengoptimalkan perannya dalam menyebarluaskan informasi terkait pembangunan, kata Lerner. Keempat adalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dimana terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat literasi dan penggunaan media massa yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik.

Menurut Lerner (1978), dalam modernisasi aspek yang terpenting adalah keinginan untuk bergerak, baik secara fisik maupun psikis. Aspek fisik meliputi proses urbanisasi, yaitu adanya perpindahan dari desa ke kota. Sedangkan gerak spiritual berarti perubahan diri seseorang dilihat dari gerak sisi psikologis berupa empati. Arti dari empati ini adalah kemampuan untuk memahami keadaan orang lain dan memposisikan berada pada kondisi orang tersebut. Empati juga berarti kemampuan untuk bersama orang lain, yang berarti kesanggupan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi dan keadaan orang lain. Menurut Lerner, empati adalah persyaratan utama untuk mengambil peran baru dan beradaptasi dengan situasi baru. Peran dari media massa ini membentuk wawasan dari masyarakat yang menerima berita-berita yang lebih luas yang menjadi sebab dari terciptanya permulaan mobilitas psikis yang sesungguhnya.

Rizkie (2013) mengatakan bahwa Lerner memperbaharui teori modernisasi ini dua puluh tahun kemudian, yaitu :

a. Urbanisasi bukan lagi langkah pertama dalam teori modernisasi. Sebagai gantinya adalah melek huruf atau paham media, lalu beralih ke partisipasi.
b. Indikator partisipasi politik tidak lagi sekedar memilih dalam pemilu, tetapi juga mencari indikator psikologis lain yang mirip dengan “empati”.
c. Keseluruhan proses yang awalnya disebut modernisasi diganti menjadi perubahan

d. Mengantikan faktor-faktor yang disebutkan sebelumnya (urbanisasi, literasi, literasi media, dan partisipasi) sebagai indikator modernisasi, melainkan tren berubah (*changing trend*) atau kemauan orang untuk mencoba hal baru.

Keunggulan teori Lerner adalah keinginan yang kuat untuk inovasi, keinginan untuk menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Hal ini berangkat dari kondisi modernisasi yang mensyaratkan mobilitas atau perpindahan sosial yang mengarah pada perubahan pengetahuan dan keinginan. Di sisi lain, teori ini memiliki kelemahan yaitu kesalahan memprediksi bahwa mobilitas atau urbanisasi akan menyebabkan peningkatan angka melek huruf dan berhitung dalam suatu masyarakat. Yang sering terjadi di negara berkembang adalah urbanisasi yang meningkat menyebabkan munculnya permukiman kumuh yang terletak di pinggiran kota sehingga menimbulkan masalah sosial seperti pengemis, gelandangan, dan kemiskinan, masalah sosial lainnya.

2.6 Teori McClelland

Teori motivasi McClelland (1961) menyatakan bahwa pada manusia terdapat dua motivasi primer, yaitu motif primer atau motivasi alamiah bawaan biologis dan motivasi sekunder (lingkungan sosial) atau motivasi yang berasal dari pengalaman, lingkungan dan akibat berinteraksi dengan orang lain. Tenaga penggerak utama ada secara alami atau biologis pada manusia, mendorong manusia untuk memenuhi kebutuhan alamiahnya seperti merasa lapar, tidur, seks, dan kebutuhan alamiah lainnya. Yang termasuk kebutuhan sekunder bisa berupa olahraga, hiburan, liburan, kepemilikan kendaraan, gadget mewah dan masih banyak lagi.

Menurut teori motivasi McClelland (1961) Individu atau masyarakat mempelajari dari budaya atau lingkungan sekitarnya terkait cara pemenuhan kebutuhan baik dasar maupun sekunder, terlebih itu dilakukan pada awal dalam kehidupannya. Terdapat

kebutuhan dasar yang bisa manusia pelajari dari lingkungannya, berikut :

a. Kebutuhan berprestasi (*Need for achievement*)

Orang secara alami perlu menjalankan bisnis mereka lebih baik dari sebelumnya atau lebih baik dari yang lain. Hal itu sering ditemui di dunia kerja, misalnya selalu mampu bekerja di bawah tekanan, bertanggungjawab dengan keputusannya, fokus pada tugas-tugasnya, mampu mengorganisir kelompoknya, senantiasa merasa kurang puas dengan pencapaiannya, dan masih banyak lagi. Serupa yang diungkapkan oleh (Notoatmodjo, 2009: Walandouw, 1988) Menurutnya, prestasi adalah adanya sebuah motivasi yang dimiliki setiap manusia untuk memperoleh hasil yang maksimal dari aktivitasnya, yang berarti prestasi itu lebih baik dan lebih penting. Ukuran keberhasilan tersebut didasarkan pada norma-norma yang ada pada diri individu yang berhubungan langsung dengan arah pemikiran dan perilakunya untuk mewujudkan sesuatu yang baik.

Hal yang sedikit menyamai pendapat para ahli di atas, (Usman, 2010) mendefenisikan kebutuhan berprestasi sebagai motivasi batin untuk menyelesaikan semua permasalahan dan gangguan dalam rangka mendapatkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya . Lebih lanjut Usman mengatakan bahwa terdapat ciri-ciri seseorang dengan kebutuhan berprestasi tinggi yaitu : 1) Mencoba untuk mendapatkan timbal balik dari tindakan yang telah dilakukan, dan menerima kritik saran dari orang lain untuk membuat diri menjadi lebih baik; 2) mampu menerima resiko yang telah diperhitungkan atas tindakan kepada orang lain; 3) Senantiasa berinovasi dan kreatif (baru, bukan yang sudah ada), Banyak ide, dapat mewujudkan sistem yang membatasi geraknya ke arah yang lebih positif; 4) Merasakan tekanan waktu, mengatur waktu dengan baik dan

selalu datang bekerja tepat waktu; 5) Bekerja keras dan bangga dengan hasil yang dicapai.

b. Kebutuhan untuk Berafiliasi (*Need for Affiliation*)

Menurut McClelland (1961) kebutuhan untuk berafiliasi adalah tertarik pada orang lain dengan tujuan meyakinkan perasaan bahwa dia dapat diterima oleh mereka. Arti paling sederhananya adalah keinginan untuk berteman, berteman, atau bersama orang lain. (Usman, 2010) juga menyatakan hal serupa, menurutnya kebutuhan berafiliasi didefinisikan sebagai keinginan untuk menjalin hubungan dengan sesama lainnya atau keinginan untuk mempunya jangakauan persahabatan yang luas. Ciri-ciri seseorang membutuhkan pergaulan adalah: 1) selalu senang bersosialisasi dengan orang lain; 2) memiliki sifat egois yang lebih mendahulukan jalinan ikatan pribadi dibanding pekerjaan; 3) mampu bersepakat dengan orang lain; 4) maksimal jika melakukan tugas secara team work dibandingkan solo.

c. Motivasi Untuk Berkuasa (*Need for Power*)

Menurut McClelland (1961) motivasi akan kekuasaan adalah agar dapat mengambil kendali atas lingkungan dengan mampu merubah pola pikir dan perilaku orang lain untuk mengikuti apa yang kita arahkan. Dinamika kekuasaan juga dikatakan memiliki "dua sisi", yaitu: 1) kekuatan sosial, yaitu motivasi ini berasal dari pola pikir menggunakan kekuasaan untuk kepentingan orang lain, biasanya seseorang yang memiliki minat lebih pada organisasi dan termasuk dalam struktur organisasi tersebut; 2) kekuatan pribadi, yaitu motif yang berasal dari pemikiran, senantiasa menginginkan kemenangan dan hidupnya didasarkan pada kemenangan dan kegagalan.

Dari ketiga motivasi menurut McClelland dapat dikatakan bahwa motivasi itu adalah dorongan yang bisa berasal dari dalam maupun dari luar dirinya yang mendasari tingkat laku individu sehari-hari tergantug situasi dan kondisinya. Bisa jadi, saat ini ia membutuhkan motivasi untuk berprestasi, namun

pada situasi lain dia membutuhkan motivasi untuk berafiliasi. Dengan demikian, kebutuhan yang mengatur perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh keadaan di mana perilaku itu akan muncul. Hubungannya teori McClelland dengan komunikasi pembangunan adalah bagaimana seseorang bisa menggunakan ketiga motivasi tersebut untuk meningkatkan potensi dirinya baik di keluarga dan di masyarakat pada umumnya.

2.7 Teori Wilbur Schramm

Dalam buku Schramm yang berjudul *Mass Media and National Development : The Role Information in Developong Countries* pada tahun 1964 mengatakan bahwa media menjadi sasaran yang paling penting dalam pembangunan. Buku ini dijadikan acuan teori yang paling kuat pada bidang komunikasi pembangunan. Karena dianggap media menjadi sarana peralihan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Sebagai media, media massa setidaknya memenuhi tiga fungsi, yaitu :

1. Memberikan informasi (*watching function*)
2. Menciptakan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan (*policy function*)
3. Mendidik (*teaching function*)

Menurut (Schramm, 1964) perkembangan yang berkaitan dengan berbagai komponen di mana media massa termasuk dengan melibatkan unsur-unsur media dan informasi. Komunikasi di sini memiliki tugas utama untuk mengubah masyarakat: a) Media massa digunakan untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pembangunan nasional kepada masyarakat agar lebih fokus dalam memenuhi perubahan kebutuhan, peluang dan sarana membawa perubahan, sarana perubahan dan dapat mengangkat aspirasi bangsa; b) menciptakan peluang bagi masyarakat untuk mengambil keputusan, memperluas diskusi untuk melibatkan semua pihak

yang akan berpartisipasi dalam dunia yang sedang berubah, memberi peluang bagi tokoh masyarakat untuk memimpin mengarahkan dan mendengarkan pendapat orang biasa untuk meningkatkan peluang kelancaran dasar arus informasi ke atas; c) pendidikan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk tumbuh dari anak-anak menjadi orang dewasa, dari melek huruf hingga keterampilan teknis yang diterapkan secara langsung. Tugas utama ini diterjemahkan ke dalam fungsi media massa sebagai penyampai pesan, pengambil keputusan, dan pendidik (Ramah, 2019).

Sehingga menurut (Schramm, 1964) dirumuskan beberapa hal yang terkait Peran media massa dalam pembangunan , yaitu :

1. Perluas wawasan orang
2. Fokuskan perhatian semua orang pada pembangunan
3. Meningkatkan aspirasi masyarakat
4. Membantu mengubah sikap dan praktik yang dianut masyarakat selama ini
5. Memberikan informasi untuk saluran komunikasi interpersonal atau mengembangkan dialog antara masyarakat dengan pihak yang berkaitan dengan pembangunan
6. Memberi status pada masyarakat sebagai sasaran pembangunan
7. Memperluas dialog tentang kebijakan pembangunan
8. Menghormati norma sosial
9. Membantu membentuk selera orang
10. Mempengaruhi nilai-nilai yang kurang kokoh dalam masyarakat dan menuju sikap yang lebih kuat

11. Membantu berbagi jenis pendidikan dan pelatihan di masyarakat

Perkembangan mendasar menurut teori Schramm melibatkan setidaknya tiga komponen, yaitu :

1. Komunikator pembangunan (pemerintah atau tokoh masyarakat)
2. Pesan pembangunan (gagasan, inisiatif, program pembangunan)
3. Komunikasi pembangunan (masyarakat umum, baik di desa maupun kota sasaran pembangunan)

Lebih lanjut menurut (Schramm, 1964), peran media massa penting karena komunikasi massa bersinergi dengan komponen pembangunan lainnya untuk tujuan bersama. Untuk mencapai hal tersebut, perlu dikembangkan strategi yang tepat untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut dengan menerapkan strategi baru dalam proses komunikasi manusia, salah satunya adalah pendekatan sosial. didasarkan pada model komunikasi melingkar dan lebih dinamis daripada model linear yang digunakan selama ini.

Pendekatan konvergen berarti lebih banyak komunikasi timbal balik antara para peserta yang berkomunikasi tentang pemahaman, perhatian, kebutuhan, atau pandangan. Selain itu memperhatikan partisipasi semua pihak yang terlibat dalam proses komunikasi untuk mencapai tujuan bersama dengan mempertimbangkan isu yang dimaksud. Artinya pendekatan konvergen ini merupakan dialog antara semua pihak dan tidak diputuskan oleh satu pihak saja. Karena individu bisa memainkan peran utama dalam sebuah pembangunan dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian teoretis Schramm, terdapat harapan besar terhadap peran media massa dalam pembangunan sosial ekonomi negara berkembang. Hal yang sama juga terjadi di

Indonesia pada masa pembangunan GBHN dari Pelita 1 sampai Pelita VI, mengingat komunikasi dan informasi sebagai salah satu bidang pembangunan yang penting bagi kemajuan bangsa.

2.8 Teori Inkeles dan Smith

Teori Inkeles-Smith (Smith, 1974) biasa dikenal dengan Teori Manusia Modern yang mengkaji mementingkan faktor manusia sebagai faktor pembangunan yang penting. Dalam hal ini, pembangunan bukan hanya soal modal dan teknologi, tetapi aspek manusia menjadi penting sebagai pelaksana teknologi atau aktor kunci dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung. Inilah mengapa Inkeles-Smith (Smith, 1974) memaparkan ciri-ciri manusia modern, yaitu: a) terbuka untuk pengalaman dan ide baru; b) berorientasi masa kini dan masa depan; c) memiliki kemampuan merancang dan merencanakan; d) percaya bahwa manusia mampu mengatur alam dengan baik; e) mobilitas dan ambisi hidup yang tinggi; (f) terlibat dalam pembangunan, misalnya dalam bidang politik.

Berdasarkan kajiannya, Inkeles-Smith mengemukakan bahwa Pendidikan adalah institusi yang paling efektif untuk transformasi manusia. Pendidikan 3 (tiga) kali lebih efektif dibandingkan pendekatan lainnya. Hubungannya dengan komunikasi adalah menjadi sarana untuk menyampaikan informasi dalam proses pembelajaran atau pendidikan. Karena tanpa komunikasi mustahil terjadi sebuah proses belajar mengajar. Untuk negara Indonesia sendiri, pendidikan sudah dianggap telah mengikuti perkembangan teknologi informatika 4.0 yang saat ini akan melaju ke 5.0.

Bab 3

Interaksi Komunikasi Sosial Pembangunan

3.1 Interaksi dalam Komunikasi

Setiap orang pada dasarnya mempunyai hasrat untuk dapat berbicara, atau menyampaikan dan mengungkapkan pendapat sekaligus menerima sebanyak mungkin informasi. Sehingga dalam hal ini, kemudian terciptalah sebuah proses komunikasi. Apabila kita menengok beberapa tahun ke belakang, hanya akan ditemukan sistem atau proses komunikasi yang begitu sederhana. Adapun interaksi erat kaitannya dengan hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan/ atau kelompok dengan kelompok, demi berlangsungnya kehidupan sosial yang dijalani bersama-sama.

Proses sosial dapat dimaknai menjadi serangkaian cara atau mekanisme hubungan dalam interaksi individu ataupun berbagai kelompok sosial, untuk kemudian dapat ditentukanlah sistem berikut bentuk hubungan sosial yang dijalani. Ketika didapati adanya interaksi sosial, artinya didapati juga adanya wujud komunikasi, baik secara verbal maupun non verbal.

Kata interaksi diambil dari bahasa Inggris *interact* artinya *act on each other* (aksi yang berlaku antara satu dengan lainnya). Dari kata ini muncul kata *interaction* yang memiliki dua arti, yaitu pertama; *interacting of two or more people, things*; *interacting upon*

each other (interaksi yang berlangsung antara orang atau sesuatu, dua atau lebih); kedua; *(comp) allowing a continuous two-way transfer of information between a computer and the person using it* (transfer informasi yang berlangsung secara terus-menerus antara komputer dengan orang yang menggunakannya) (AS Hornby, 2017)

Merujuk pada penjelasan tersebut, mudah untuk memahami secara sederhana bahwa interaksi merupakan serangkaian kegiatan yang terjadi di antara satu pihak dengan pihak lain, seperti antara orang dengan orang lain ataupun orang dengan suatu hal atau benda tertentu, misalnya komputer, kendaraan, hewan, ataupun tumbuhan. Kendati ketika terkait dengan lingkup keluarga, organisasi, ataupun bangsa dan negara akan didapati pengertian yang berbeda. Hingga pada umumnya, terbentuknya suatu interaksi tersebut umum dikenal sebagai bentuk interaksi sosial.

Telah dijelaskan oleh Bonner bahwa interaksi sosial merupakan sebentuk hubungan antara dua orang atau lebih yang dimungkinkan untuk dapat saling memberi pengaruh, dampak, perubaham ataupun perbaikan atas perilaku ataupun sikap dari individu yang lain. Interaksi sosial juga dimaknai menjadi sebentuk hubungan antar individu yang dinilai akan menghasilkan sebentuk *helping mutualisme* dan saling memberi pengaruh antara kedua belah pihak demi mencapai terjadinya perubahan perilaku ataupun kondisi agar lebih baik lagi. Kemudian oleh Ahmadi (2012), interaksi sosial dijelaskan menjadi sebentuk hubungan yang terjadi di antara dua atau lebih individu, dengan adanya pengaruh, perubahan, ataupun perbaikan yang diberikan melalui kelakuan pihak satu terhadap pihak lainnya, dan juga kebalikannya (Ahmadi, 2012). Soekanto turut pula memberi pengertian pada interaksi sosial sebagai hubungan sosial bersifat dinamis yang terkait dengan orang perorangan, antara sekelompok orang, ataupun antara orang perorangan dengan sekelompok orang (Soekanto, 2013).

3.2 Syarat-Syarat Terjadinya Interaksi

Berdasarkan beberapa penjelasan tentang interaksi sosial yang telah disampaikan, setidaknya didapati adanya sejumlah dua syarat dari interaksi sosial, berikut uraiannya:

1. Kontak sosial (*social contact*), yang dimungkinkan terjadi dengan tiga bentuknya, yakni antar individu, antar individu dengan kelompok, ataupun antar kelompok, baik yang bersifat langsung maupun tidak.
2. Komunikasi, bahwa seseorang memberikan arti terhadap perilaku orang lain, ataupun terkait berbagai macam perasaan yang hendak disampaikannya terhadap orang tersebut. Kemudian bagi yang bersangkutan akan menyatakan reaksi atas perasaan yang dinyatakan (Soekanto, 2013).

Interaksi sosial termasuk sebagai kunci dan faktor utama dari berlangsungnya kehidupan sosial secara keseluruhan, sebab mustahil berlangsung kehidupan bersama tanpa ada interaksi sosial di dalamnya. Dalam interaksi sosial, setiap orang yang terlibat di dalamnya akan sama-sama bersifat aktif, dengan berupaya untuk memberikan pengaruh, dampak, ataupun perubahan berdasarkan setiap batasan kemungkinannya. Sehingga seseorang yang terlibat di dalam sebuah interaksi akan sekaligus menjadi obyek dan subyek. Jika hanya berlaku sebagai salah satunya saja, maka tidak akan didapati adanya sebentuk pergaulan. Artinya, dibutuhkan adanya *take and give* dalam sebuah pergaulan dari setiap orang yang terlibat dalam interaksi (Ahmadi, 2012).

3.3 Komunikasi Sosial Pembangunan

Komunikasi sosial pembangunan pada dasarnya terbangun berdasarkan dua istilah, yaitu komunikasi sosial dan komunikasi Pembangunan yang secara subtansial tidak didapati adanya perbedaan di antara keduanya. Komunikasi sosial

pembangunan mengandung materi pembahasan yang sama-sama terkait dengan mekanisme terjadinya komunikasi terkait, hingga kemudian didorong perannya untuk menunjang penyelenggaraan berbagai macam program pembangunan untuk mereka perubahan dan perbaikan sebuah sistem sosial yang dijalankan.

Dalam perspektif keilmuannya, didapati adanya kegunaan dari komunikasi sosial pembangunan untuk dapat menyampaikan atau menyajikan informasi pada masyarakat secara umum mengenai penyelenggaraan pembangunan, termasuk dengan membuka ruang dan kesempatan bagi masyarakat guna turut aktif melibatkan diri dalam pengambilan keputusan lewat mekansime dialog. Hingga termasuk kemudian dapat diaplikasikan untuk mendidik tenaga kerja yang berpengetahuan ataupun berkompetensi dalam bidang komunikasi agar dapat mengembangkan wawasan berpikir dan secara menyeluruh memberdayakan masyarakat.

Rogers (2010) menjelaskan bahwa pembangunan secara sederhana dapat dimaknai menjadi sebentuk perubahan yang bermanfaat dalam mencapai sistem sosial dan ekonomi sebagaimana diputuskan berdasarkan kehendak bangsa. Kemudian oleh Hedebro, pembangunan merupakan sebentuk proses perubahan dalam rangka mendorong peningkatan serangkaian kondisi kehidupan manusia. Kendati juga harus dapat dipahami sebelumnya, bahwa perubahan yang dimaksudkan bukan sekadar demi memperlihatkan proses perubahan saja, melainkan juga turut memberikan gambaran dengan sejelas mungkin terkait dengan serangkaian tujuan yang akan dicapai melalui proses perubahan tersebut. Sehingga tujuannya akan penting terhadap proses perubahan yang dinamakan dengan pembangunan.

Bryant dan White mengungkap akan adanya empat jenis aspek yang termuat dalam pembangunan kualitas manusia demi mengupayakan peningkatan kapasitasnya. Pertama, diharuskan untuk dapat menekankan terhadap aspek kapasitas (*capacity*), sehingga kemampuan berikut energi yang dibutuhkan dalam upaya tersebut dapat ditingkatkan terlebih dahulu. Kedua, diharuskan untuk dapat menekankan pemerataan (*equity*). Ketiga, memuat pengartian sebagai wujud pemberian wewenang ataupun kuasa (*empowerment*) lebih besar terhadap masyarakat. Keempat atau terakhir, memuat penjelasan mengenai berkelangsungan atau berkelanjutan (*sustainable*) berikut interdependensi di antara berbagai negara sedunia.

Kemudian terkait dengan tingkat analis komunikasi dan pembangunan, telah diidentifikasi oleh Hedebro (1979) dalam tiga aspek berikut ini:

1. Pendekatan yang fokusnya terhadap pembangunan suatu bangsa berikut sumbangan kinerja dari media massa dalam upaya terkait.
2. Pendekatan yang turut dioreintasikan guna mendorong pemahaman mengenai peranan media massa terkait dengan pembangunan nasional, kendati tentunya lebih spesifik identifikasinya.
3. Pendekatan yang mengarah menuju perubahan sebuah komunitas berbasis lokalitas, seperti perdesaaan dan semacamnya.

Quebral (1972), secara pragmatis telah memberi rumusan terkait dengan komunikasi sosial pembangunan, sebagai sebuah komunikasi yang dilangsungkan demi menjalankan perencanaan pembangunan dari sebuah negara. Sehingga dimungkinkan untuk disampaikan bahwa komunikasi sosial pembangunan termasuk sebagai inovasi yang dapat masyarakat terima secara umum.

Adapun analisa tersebut akan menjadi modal dasar dalam mengaitkan komunikasi terhadap perubahan sosial demi mengidentifikasi gejala awal dari pembangunan terkait. Terlebih terjadinya perubahan sosial merupakan akibat atas perubahan berbagai macam cara dalam berhubungan (interaksi sosial) berikut serangkaian aktivitas dalam lingkup sistem sosial yang berlangsung.

Dalam rangka memberi pemahaman secara lebih lanjut, akan disajikan lima unsur dasar komunikasi sosial pembangunan melalui gambar berikut ini:

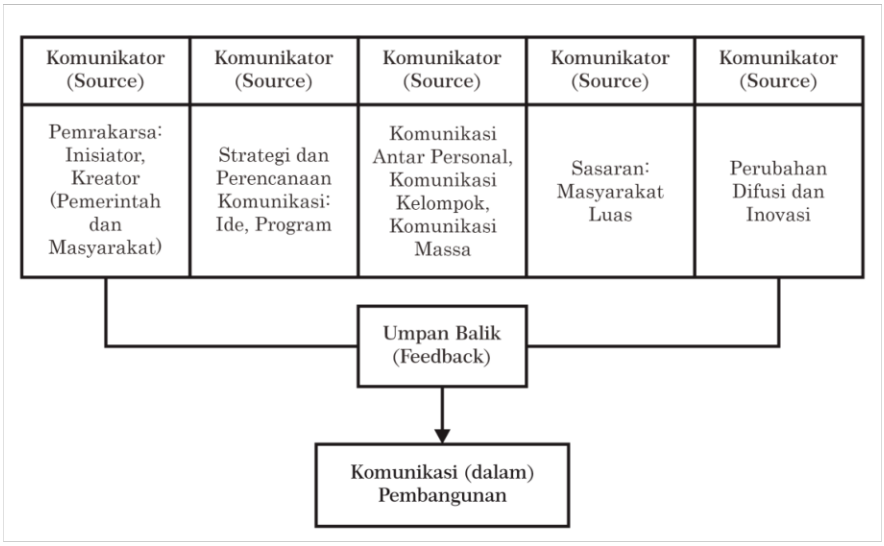

Gambar 3.1 Lima unsur dasar komunikasi sosial pembangunan

(Sumber: Mulder, 2018)

Tentu dari setiap kita akan mengakui bahwa pada dasarnya semua manusia yang hidup di dunia ini lahir secara sendiri-sendiri, tetapi selama menjalani serangkaian prosesnya dalam berkehidupan, setiap manusia pasti akan memerlukan manusia lain. Sebagaimana dinyatakan oleh Aristoteles bahwa manusia merupakan makhluk sosial (*zoon politicon*), atau mustahil dapat hidup tanpa berhubungan dengan orang lain, termasuk dalam urusan sekecil apapun.

Melihat persoalan proses kehidupan manusia yang selalu membutuhkan manusia lain, ilmu sosiologi mesti kita libatkan, karena sosiologi adalah sebuah ilmu pengetahuan yang besifat terapan yang berguna dalam mendukung penyelesaian bermacam persoalan kemasyarakatan, termasuk demi menunjang penyelenggaraan program pembangunan. Auguste Comte berdasarkan rumusan sosiologinya mengungkap bahwa sosiologi merupakan studi yang membahas mengenai statistika sosial (struktur) dan (proses ataupun fungsi) berikut hubungannya dalam memberi pengaruh, termasuk penentuannya melalui berbagai unsur lain.

Auguste Comte, Emile Durkheim dan Herbert Spencer menerima keterpengaruhnnya dari pemikiran yang menilai bahwa masyarakat merupakan organisme biologis, atau yang mengandung serangkaian organ yang saling bergantung satu sama lain. Adapun wujud ketergantungan ini adalah hasil ataupun konsekuensi demi mendorong organisme agar dapat tetap bertahan hidup. Ketergantungan untuk bertahan hidup tersebut berbentuk seperti sirkulasi sistem yang didalamnya terdapat bagian-bagian yang terhubung antar struktur, dan fungsinya demi menyeimbangkan sistem.

Dapat dikatakan sistem sosial itu menunjukkan masyarakat yang berada pada daya guna fungsional, karena objek (manusia) secara keseluruhan dihargai berdasarkan fungsi struktural dan sistem dari masyarakat terkait. Daya guna fungsional dipahami sebagai upaya mendatangkan hasil dan manfaat tergantung besar atau kecilnya sebagai struktur itu sendiri.

Talcott Parsons mendefenisikan bahwa sistem adalah interdepensi dari setiap bagian (komponen) berikut proses pengaturan atas hubungannya. Artinya dari interdepensi adalah ketika tidak ada satu bagian atau komponen, artinya dapat terjadi keguncangan atau ketidakseimbangan, serta dalam sistem

dapat terintegrasi ke dalam sebuah equilibrium. Terdapat seorang Sosiolog kontemporer Amerika bernama Talcott Parsons yang menerapkan pendekatan Fungsionalisme-struktural untuk mengidentifikasi masyarakat, yang pemikirannya turut mendapati adanya pengaruh dari Auguste Comte, Vilfredo Pareto Emile Durkheim, dan Max Weber, hal tersebut menyebabkan Teori strukturalisme- fungsional Talcott Parsons bersifat kompleks.

Parsons secara lebih lanjut turut mengungkap bahwa sistem sosial di atas dimungkinkan akan berfungsi ketika dapat memenuhi sejumlah empat persyaratan fungsional berikut ini:

1. Adaptasi atau penyesuaian (*adaptation*), bahwa diharuskan bagi sistem sosial untuk dapat beradaptasi terhadap lingkungan yang berlangsung.
2. Mencapai tujuan (*goal attainment*), sebagai wujud persyaratan fungsional bahwa terus mengarah terhadap serangkaian tujuannya (dengan sistem sosial). Dengan kata lain, setiap orang memiliki tujuan untuk dicapai yang sesuai dengan tujuan sosial yang tentu bersifat lebih besar dan berjalan selaras terhadap tujuan lingkungan sosial.
3. Integrasi (*integration*), bahwa dalam hal ini memperlihatkan solidaritas sosial menjadi serangkaian bagian pembentuknya, berikut masing-masing peran unsur terkait sebagaimana kedudukannya. Perwujudan integrasi hanya dimungkinkan ketika terjadi penyesuaian atas seluruh unsur pembentuk sistem terkait.
4. Pemeliharaan pola laten (*latency*), atau untuk memelihara pola tersembunyi, yang umumnya berbentuk sistem nilai budaya yang terus menentukan tindakan seseorang. Hingga kemudian serangkaian nilai yang sudah melalui kesepakatan masyarakat tersebut dimungkinkan untuk dapat menjamin solidaritas sosial ke depannya.

Konsep sistem sosial merupakan sarana atau alat pembantu guna memberikan penjelasan mengenai berbagai macam kelompok manusia, dengan bertolak melalui pandangan bahwa setiap kelompok manusia adalah suatu sistem tertentu. Kemudian disusunlah sebuah strategi oleh Parsons guna menganalisis secara fungsional yang turut mencakup keseluruhan sistem sosial, di antaranya hubungan berdua, kelompok kecil, keluarga, organisasi kompleks dan juga masyarakat keseluruhan.

Dengan kata lain sistem sosial adalah jalinan hubungan keseimbangan antara manusia dan aspek-aspek kehidupannya sosialnya. Aspek-aspek kehidupan sosial seperti politik, hukum, ekonomi, agama, pendidikan, organisasi kemasyarakatan, kesehatan, lingkungan, dan sebagainya. Pada sebuah sistem sosial, setidaknya akan didapati sejumlah empat komponen yang menjadi dasar, yakni dua orang, terdapat interaksi, bertujuan, berstruktur, simbol ataupun serangkaian harapan bersama yang menjadi pedoman atasnya. Dalam sistem sosial, hal ini diketahui bagian saling berketergantungan satu sama lain dalam satu kesatuannya. Dengan kata lain, seluruhnya saling terkait dalam ikatan kebudayaan yang sifatnya saling menguntungkan.

3.4 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Komunikasi dan pembangunan secara konsepnya bersumber sebagaimana konteksnya, yakni berdasarkan teori komunikasi dan teori pembangunan. Adapun serangkaian sumber oleh keduanya sama-sama mengorientasikan terhadap prinsip partisipasi sosial. Terkait dengan kontak sosial dan komunikasi termasuk sebagai bagian unsur yang berguna dalam sebuah hubungan setiap mereka yang terlibat atau melibatkan diri dalam sebuah pembangunan.

Perencanaan pembangunan berikut penyelenggaraannya diharuskan dapat mengarah ke bawah, dengan mendorong keterlibatan dari masyarakat secara umum, lewat pemberian

atau distribusi kewenangan terkait sejak tingkat pusat sampai dengan daerah secara merata. Sehingga pemerintah dimungkinkan untuk semakin banyak menyerap atau menerima aspirasi masyarakat, dan pembangunan yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga untuk dapat memberdayakan mereka. Selain itu juga perlu dipahami bahwa masyarakat pun diharuskan dapat terlibat sebagai pelaku pembangunan itu sendiri, sehingga dibutuhkan adanya persiapan dan pembimbingan terkait guna dapat mendorong perumusan atas permasalahan yang dihadapinya sendiri, berikut perencanaan serangkaian langkah yang dibutuhkan, dan juga pelaksanaan rencana tersebut, serta akhirnya dapat menikmati hasil produk dari program yang dijalankan berikut pelestariannya.

Partisipasi masyarakat turut menjadi faktor yang menentukan ataupun indikator dari tingkat keberhasilan pembangunan. Sehingga akan sebesar dan sekeras apapun upaya pemerintah membangun, jika tidak melibatkan dan menumbuhkan daya dukung masyarakat maka pembangunan akan mengalami hambatan.

Pelibatan langsung masyarakat dapat berdampak krusial, karena diantaranya adalah mengindarkan diri dari kemungkinan terjadinya manipulasi, memberi nilai tambah terhadap legitimasi rumusan perencanaan. Terlebih semakin banyak keterlibatan yang didapati, artinya juga akan semakin baik pula, termasuk menunjukkan adanya peningkatan kesadaran berikut keterampilan politik masyarakat. Ada 3 (tiga) jalur aspirasi masyarakat untuk dapat menentukan kebijakan pembangunan daerah, antara lain:

1. Jalur musyawarah rencana pembangunan atau yang dikenal musrenbang, bahwa aspirasi masyarakat dimungkinkan untuk disalurkan secara langsung berdasarkan tingkatannya masing-masing.

2. Jalur politik atau lewat partai politik oleh para anggota dewan selama masa reses.
3. Jalur birokrasi yang dimungkinkan penyampaiannya secara langsung lewat Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) maupun melalui Kepala Daerah.

Sesungguhnya wacana pembangunan partisipatif di Indonesia sudah ditemukan dari 30 tahun lalu, sebagaimana berdasarkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) bahwa konsep pembangunan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk rakyat sejak kisaran tahun 1970-an, sedangkan secara kongkretnya dijalankan sejak kisaran tahun 1980-an.

Kegiatan pembangunan secara partisipatif telah dicanangkan dari kisaran tahun 1990-an lewat adanya lembaga pengambilan keputusan sejak tingkat desa, kecamatan, provinsi hingga nasional, akan tetapi, menurut masanya bahwa partisipasi masyarakat cenderung hanya menjadi jargon pembangunan semata, bahwa partisipasi lebih diartikan pada bagaimana upaya pendukung setiap program pemerintah berikut upaya awal dan juga konsep pelaksanaannya yang tetap berdasarkan ketetapan pemerintah. Pada umumnya, serangakaian keputusan telah ditetapkan dari atas, hingga sampai di masyarakat hanya berupa sosialisasi yang mustahil dibantah atau ditolak.

Seiring semakin diutamakannya prinsip tata pemerintahan yang baik pada tingkat Kabupaten/Kota, kemudian mulailah penggagasan dan pengembangan konsep pembangunan partisipatif diberbagai daerah. Hal ini diindikasikan dengan pelaksanaan bermacam program pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan partisipatif dan mencakup seluruh sektor, dari mulai pembangunan infrastruktur, desentralisasi pendidikan dasar, pengembangan pertanian, pelayanan kesehatan, dan lain seterusnya.

Keterlibatan semua unsur masyarakat dalam pembangunan adalah bentuk partisipatif. Pembangunan yang partisipatif pada hari ini diharuskan dapat dimulai dari akar rumput (*grassroots*) atau dari bawah, menjaga keberagaman budaya, dan tetap mengedepankan kebebasan dan martabat manusia dan masyarakat secara umum. Artinya, pembangunan diharuskan dapat mengikuti paradigma pembangunan yang pusatnya adalah rakyat.

3.5 Penghambat Tumbuhnya Partisipasi Masyarakat

Ada beberapa alasan, menurut Sunarti (2012) yang menyebabkan tidak tumbuhnya partisipasi sebagai kesalahan dasar, dan kekurangan dalam konsep dan kebijakan pembangunan termasuk implementasinya:

1. Kesalahan asumsi mengenai partisipasi masyarakat, misalnya: masyarakat desa tidak dapat berpartisipasi secara efektif karena kurangnya kemampuan manajerial dasar.
2. Kekurangan atau ketiadaan strategi yang efektif untuk menumbuhkan partisipasi yang seharusnya terintegrasi dalam program pembangunan.
3. Agen pembangunan kurang dilatih dalam menumbuhkan partisipasi (konsep, metode dan teknik) pembangunan.
4. Banyaknya agen pemerintah yang menyampaikan paket pembangunan kepada sasaran yang sama.

3.6 Dampak

Dampak (efek) dalam komunikasi maupun pembangunan tidak bisa dibantah. Setidaknya ada tiga bentuk: kognitif (pengetahuan), afektif (emosional dan perasaan) dan konatif (bertingkah laku). dalam perspektif kekinian munculnya dampak atau efek tidak berdiri sendiri, dengan kata lain bentuk-bentuk tersebut memiliki hubungan satu sama lain yang ikut

mempengaruhi proses penerimaan pesan dan menjadi efek penentu yang dihasilkan oleh komunikasi (secara umum).

Korten (2001) menjelaskan bahwa, pembangunan yang belangsung sejauh ini mengedepankan pertumbuhan ekonomi justru menghadirkan berbagai macam persoalan, termasuk di antaranya kemiskinan, kerusakan lingkungan hidup dan lain sebagainya.

Benturan antara dua kepentingan yang berbeda antara aktivitas pembangunan dengan lingkungan tentu berdampak pada perubahan yang terjadi pada manusia dan masyarakat. Dampak perubahan tersebut terdiri dari cara hidup (bekerja, bermain dan berinteraksi), budaya (nilai, norma dan kepercayaan), komunitas (stuktur penduduk, kohesi sosial dan stabilitas sosial), kesehatan masyarakat (pola penyakit, prilaku pengobatan dan sanitasi lingkungan).

Analisa mengenai dampak dalam kajian ini, paling tidak meliputi empat jenis dampak, yaitu:

1. Dampak positif, atau sebuah dampak yang dinilai oleh penyelenggara pembangunan ataupun orang lain sebagai sesuatu yang baik.
2. Dampak negatif, atau sebuah dampak yang dinilai oleh penyelenggara pembangunan maupun oleh orang lain sebagai sesuatu yang kurang baik.
3. Dampak yang disadari (*intended consequences*), atau sebuah dampak yang telah penyelenggara pembangunan rencanakan sebelumnya. Sehingga benar-benar disadari dan diketahui akan dapat terjadi ke depannya. Berdasarkan lingkup studi sosiologi, hal ini dikenal dengan sebutan fungsi manifes.
4. Dampak yang tidak disadari (*unintended consequences*), atau sebuah dampak di luar perencanaan penyelenggara pembangunan. Sehingga tentunya tidak disadari dan

diketahui akan dapat terjadi. Berdasarkan lingkup studi sosiologinya dikenal dengan sebutan fungsi laten.

Dampak terakhir tersebut umumnya sulit untuk diketahui akan dapat terjadi, sebab tanpa tidak disadari atau tak pernah ditemukan melalui proposal pembangunan dari setiap penyelanggara pembangunannya. Kemudian secara umumnya akan termasuk sebagai dampak negatif.

3.6.1 Dampak Sosial

Dampak positif dari pembangunan terhadap kehidupan sosial:

1. Perubahan Tata Nilai dan Sikap

   Globalisasi, termasuk dalam hal budaya telah mengakibatkan terjadi berbagai macam perubahan sikap masyarakat dalam setiap lingkungan yang awalnya irasional menuju lebih rasional.

2. Perkembangan Ilmu dan Teknologi

   Hal ini diindikasikan oleh semakin mudahnya masyarakat dalam beraktivitas dengan memanfaatkan berbagai macam teknologi. Sehingga diharap akan dapat meningkatkan dan memperbaiki taraf hidup masyarakat dan berdampak positif secara keseluruhan.

Berikut merupakan dampak negatif yang diakibatkan oleh adanya globalisasi pembangunan terhadap kehidupan sosial:

1. Pola Hidup Konsumtif

   Dampak globalisasi telah membuat masyarakat semakin mudah untuk membeli barang yang semakin beragam di pasar, kendati juga belum pasti benar-benar dibutuhkan atau bermanfat baginya.

2. Sikap Individualistik

   Semakin mudah dan seringnya menggunakan teknologi, mengakibatkan berkurangnya aktivitas masyarakat secara sosial di dunia nyata dengan sesamanya.

3. Gaya Hidup yang Kebarat-Baratan

   Kecenderungan untuk mengikuti tren dan gaya hidup yang dipopulerkan oleh budaya Barat, kendati diketahui banyaknya kandungan negatif di dalamnya.

3.6.2 Dampak Budaya

Dampak positif dari pembangunan terhadap budaya:

1. Membentuk integrasi dalam lingkup nasional.
2. Modernisasi menjadi wujud perubahan serangkaian unsur budaya tradisional untuk menuju unsur budaya yang lebih modern sebagaimana perkembangan bangsa

Dampak negatif dari globalisasi pembangunan terhadap kehidupan sosial:

1. Pudarnya pengetahuan tradisional, seperti Ilmu Kesehatan tradisional,Ilmu dukun dan meramal.
2. Pudarnya sistem kepercayaan atau religi seperti animisme dan dinamisme. Sistem kepercayaan itu diganti dengan agama-agama besar, seperti: Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha.
3. Bergesernya nilai-nilai budaya akibat kemajuan di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Diperlukan adanya nilai-nilai yang baru yang mampu mengimbangi perubahan budaya.
4. Melemahnya Etos kerja tradisional seperti adanya takdir yang menentukan nasib sekarang. Akibatnya orang tidak perlu bekerja keras untuk memperbaiki nasibnya. Sebagian orang banyak bekerja santai karena segala sesuatunya sudah

ditentukan lingkungan alam sekitarnya. Etos kerja semacam ini dulu mungkin cocok untuk menciptakan suasana tenang, tidak ada pertentangan dan keserakahan. Sekarang ini etos kerja Tradisional diganti dengan etos kerja yang dinamis, ulet, penuh tantangan, dan terencana agar memperoleh hasil yang optimal.

3.6.3 Dampak Ekonomi

Pada dasarnya terdapat begitu banyak dampak positif yang dibawa oleh pembangunan ekonomi, antara lain diuraikan berikut ini:

1. Memudahkan kehidupan manusia

   Hal ini dapat ditunjukkan seperti oleh semakin baiknya layanan transportasi umum, sehingga memudahkan mobilitas masyarakat untuk menuju berbagai tempat yang diperlukannya. Semakin luasnya, bahkan tidak terbatasnya ilmu pengetahuan yang dapat dieksplorasi dengan adanya internet untuk kemudian dapat berguna meningkatkan kehidupannya.

2. Meningkatkan kesempatan kerja

   Hal ini ditunjukkan oleh dibutuhkannya semakin banyak sumber daya manusia yang dapat berperan dalam produksi dan penyediaaan barang dan layanan. Sehingga secara langsung akan semakin banyak kesempatan kerja dalam berbagai macam bidang. Termasuk dengan semakin beragamnya bidang pekerjaan baru yang sebelumnya tidak disadari akan dapat menjadi sebuah pekerjaan berbasis teknologi seperti *cyber security*, *software engineer*, dan masih banyak lainnya.

3. Meningkatnya taraf hidup manusia

   Hal ini ditunjukkan dengan keterkaitannya terhadap poin sebelumnya, bahwa semakin meningkatnya kesempatan

kerja yang dapat dipenuhi tentu akan mendorong peningkatan taraf hidup pelakunya pula. Contohnya, dengan ditemukannya kandungan minyak bumi yang melimpah di wilayah negara Qatar, tela mengubah kondisi masyarakat sekitar ayng sebelumnya dengan tingkat ekonomi rendah dan hidup secara nomaden dapat diperbaiki dengan pengolahan atas kandungan minyak yang ditemukan tersebut.

4. Tidak terdapat kelangkaan barang

   Dengan semakin banyak dan beragamnya barang yang diproduksi akan membuka kesempatan perdagangan dan pasar menjadi lebih luas lagi. Bahkan diikuti dengan mekanisme dan sistem pasar yang semakin bebas pula. Barang-barang konsumsi atau pokok, seperti bahan makanan menjadi semakin mudah didapat, jarang terjadi kelangkaan, kendati dengan harga yang akan fluktuatif seiring kondisi politik dan bahkan monopoli pasar yang terjadi.

5. Siap bersaing pada era globalisasi

   Setiap negara semakin siap bersaing atau mengikuti persaingan pasar secara global dengan kemampuan dan penawarannya masing-masing. Termasuk semakin terbukanya dengan kemungkinan masuknya investasi asing, kerjasama bilateral, ataupun pasar ekspor-impor. Terlebih makin ke sini, kian ketat pula persaingan global yang harus dihadapi, sehingga pembangunan ekonomi dapat mendorong persiapan bagi setiap negara yang mengikutinya.

Kendati dampak positif begitu banyak diperoleh sebagaimana disampaikan di atas, tentunya juga akan didapati adanya dampak negatif di baliknya. Berikut beberapa di antaranya.

1. Ketimpangan pendapatan

   Hal ini ditunjukkan dalam hal ketenagakerjaan berikut kemungkinan terjadinya eksploitasi atas serangkaian sumber daya di dalamnya, termasuk sumber daya manusia. Setiap orang yang mempunyai lebih banyak sumber daya dan uang tentunya akan semakin meudah untuk mengeksploitasi. Dan sebaliknya, bagi yang kekurangan hanya akan menjadi objek eksplotasi, sebagai buruh dan pekerja yang disuruh-suruh. Hingga kemudian tampak begitu kentara ketimpangan pendapatan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi.

2. Peningkatan polusi

   Aspek lingkungan turut menjadi korban dari pelakasanaan pembangunan ekonomi. Bank Dunia pada tahun 2014, sempat menyampaikan begitu mengkhawatirkannya laju degradasi sumber daya alam di begitu banyak negara. Salah satunya dalam hal polusi atau pencemaran udara, dengan menempatkan China sebagai negara yang paling tinggi tingkat polusinya. Sebagaimana ditunjukkan dengan begitu buruknya kuaitas udara di kota Beijing dan Shanghai. Adapun penyebabnya adalah semakin banyaknya pabrik di daerah tersebut, yang tentunya menjadi bagian dari insfrastruktur pembangunan ekonomi.

3. Perubahan gaya hidup

   Dalam berlangsungnya pembangunan ekonomi, perubahan gaya hidup adanya pasti. Misalnya, seperti Nauru, sebuah negara di Pasifik Barat yang sempat menjadi negara dengan tingkat pendapatan per kapita terbesar sedunia dengan adanya penemuan fosfat. Kehidupan masyarakat Nauru sebelum ditemukannya fosfat amatlah sederhana. Hingga kemudian terindikasi kandungan fosfat yang begitu besar menjadikan pemerintah melangsungkan eksploitasi yang begitu besar. Terjadi peningkatan drastis dalam pendapatan

negara, dan perubahan gaya hidup masyarakatnya akibat adanya pemberian subsidi yang tidak besar-besaran pula. Kemudain masyarakat semakin terbiasa hidup secara hedonis dan konsumtif. Bahkan pemerintah Nauru juga turut membebaskan pajak bagi masyarakatnya. Hingga kemudian pada tahun 1990-an terjadi defisit fosfat dan rusaknya 80% lingkungan di pulau Nauru, bahkan lagi tak dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian akibat terjadinya eksploitasi besar-besaran pada masa sebelumnya. Imbasnya, sampai hari ini, kehidupan Nauru masih bergantung dari bantuan negara Australia.

4. Sumber daya alam semakin habis

   Tedapat jenis sumber daya alam tidak terbarukan yang akan semakin habis ketika eksploitasi secara terus-menerus. Contohnya, sebagaimana ditunjukkan negara Nauru di atas yang bangkrut akibat tidak mempertimbangkan aspek lingkungan berkelanjutan dalam eksploitasi yang dilakukannya. Sehingga dalam hal ini diperlukan adanya alternatif lain untuk menunjang pendapatan negara. Telah terbukti bahwa eksploitasi sumber daya alam bukan hanya berdampak pada aspek lingkungan semata, melainkan secara menyeluruh terhadap kondisi negara.

5. Menurunnya kondisi kesehatan masyarakat

   Dampak negatif selanjutnya adalah dalam hal kesehatan Masyarakat yang semakin menurun, akibat polusi dan pencemaran lingkungan, seperti dari cemaran limbah, asap pabrik, sampah dan buangan sisa produksi, serta lain sebagainya yang mengancam lingkungan dan kesehatan. Terlebih lingkungan dengan kesehatan merupakan mata rantai yang terhubung dengan erat.

Dalam perkembangannya komunikasi sosial pembangunan erat hubungannya dengan media, termasuk media konvensional ataupun media baru. Penggunaan media

menjadi penting karena media menjadi sumber informasi tentang sejauh mana pembangunan itu berjalan pada setiap lini, sebagai contoh pada masa pemerintahan Presiden kedua RI yaitu Presiden Soeharto beliau memiliki program bernama Kelompencapir (kegiatan kelompok pembaca, pendengar, dan juga pemirsa).

Kelompencapir merupakan sebuah pertemuan yang diperuntukkan bagi petani dan nelayan di negara Indonesia hasil gagasan ketika masa Orde Baru, atau pemerintahan Presiden Soeharto. Pertemuan tersebut diikuti oleh para petani yang berprestasi di berbagai belahan wilayah se-Indonesia untuk diadu atau menunjukkan pengetahuan dan kepintarannya dalam hal pertanian. Misalnya dalam hal cara atau mekanisme bercocok tanam yang lebih baik, ataupun pemupukan yang sesuai dengan kebutuhan penanaman dengan model yang serupa cerdas cermat. Adapun program ini turut berperan besar ketika Indonesia berorientasi pada swasembada pangan hingga memperoleh penghargaan pada tahun 1984 dari FAO. Sekarang program Kelompencapir telah usai. Kendati kegiatan dialog interaktif tersebut terbukti efektif untuk dapat menjadi media komunikasi bagi pemimpin dengan masyarakatnya. Namun kegiatan tersebut perlahan luntur dimasa jabatan Presiden setelah Presiden Soeharto, sampai kemudian Presiden Joko Widodo melakukan apa yang disebut dengan "blusukan".

Blusukan ini berlangsung dengan berkelana atau masuk ke sana ke sini demi mengenali kondisi dari sebuah tempat secara alami dan kultural. Blusukan juga termasuk sebagai fenomena baru, sebab salah satunya ditengarai dengan besarnya kerinduan masyarakat untuk dapat berdialog dan berinteraksi dengan pemimpinnya. Hingga masyarakat kemudian menilai langkah blusukan yang ditempuh oleh Jokowi sebagai suatu hal yang langka dan patut dinanti, terlebih sudah bersedia untuk turun dan menyapa rakyatnya. Tujuan dari blusukan ini juga termasuk untuk mengenali dan mengidentifikasi daerah berikut

permasalahan yang terjadi di sana. Dalam lingkup teori manajemen strategis, hal ini dikenal sebagai audit eksternal, sebagai upaya awal dalam membuka kemungkinan pelaksanaan perencanaan strategis. Kegiatan ini yang berhasil menarik simpati masyarakat terhadap Presiden Jokowi ditambah lagi dengan pemberitaan yang massif dari media konvensional ataupun media baru membuat kegiatan tersebut sebagai perkembangan dari kemajuan komunikasi sosial pembangunan saat ini dimana masyarakat dapat mengikuti perkembangan pembangunan melalui media massa yang ada.

Bab 4

Rumusan Baru Tentang Pembangunan

4.1 Komunikasi Sosial dan Pembangunan

4.1.1 Komunikasi Sosial

Istilah komunikasi sosial sebetulnya bukanlah suatu istilah yang asing. Komunikasi sosial menjadi bagian dari ranah komunikasi yang menjadi bagian dari implementasi pancaindra manusia. Jika ditilik dari etimologi saja, kata komunikasi berasal dari *communication* dalam bahasa Inggris. Lebih lanjut, sumber kata itu berasal dari *communicatio* dalam bahasa Latin yang berasal dari *communis* yang berarti "sama". Maksudnya, bermakna sama dalam pemaknaannya.

Berangkat dari hal tersebut, maka didefinisikanlah apa itu komunikasi. Beberapa ilmuwan menyebutkan bahwa komunikasi menyangkut soal pemaknaan. Stewart L. Tubss dan Silvia Moss menyatakan bahwa komunikasi adalah "proses penciptaan makna antara dua orang atau lebih." Ungkapan yang sama juga dinyatakan pakar komunikasi, Onong Uchyana Effendi, bahwa komunikasi merupakan suatu "penyampaian pikiran oleh seseorang atau komunikator kepada pihak lain atau komunikan (Yusuf, 2021)".

Pemahaman dari beberapa ilmuwan komunikasi itu menunjukkan bahwa komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan antara dua orang atau lebih. Dalam proses itu, komunikasi memberikan makna sehingga bisa dimaknai kembali oleh orang yang menerima pesan atas maksud yang disampaikan. Hingga makna pesan yang disampaikan itu dipahami oleh komunikan, maka terjadilah komunikasi itu.

Komunikasi sosial merupakan bagian dari komunikasi secara holistik. Sebagai bagian dari komunikasi, komunikasi sosial merupakan proses komunikasi yang berupaya mempengaruhi pihak lain dalam mencapai keterikatan sosial. Komunikasi sosial mencoba untuk mengarahkan komunikasi pada suatu pencapaian integrasi sosial (Murom, 2020). Integrasi bisa dikatakan sebagai menciptakan rasa aman yang diperoleh dari ikatan sosial yang kuat dengan mengorbankan kepentingan individu. Dengan demikian, komunikasi sosial memiliki tujuan untuk integrasi sosial dan bangsa.

Sebetulnya, komunikasi sosial tidak memiliki suatu definisi yang utuh. Pandangan lain juga menyatakan bahwa komunikasi sosial tidak terlepas dari ragam perspektif, seperti perspektif *opinion leader* yang diulas dalam media massa; komunikasi inovasi yang menggambarkan difusi inovasi; dan psikologi sosial. Dalam perspektif komunikasi inovasi misalnya, proses seorang inovator yang mempengaruhi orang lain untuk mengadopsi inovasi juga dilihat sebagai komunikasi sosial.

Agar lebih mudah dipahami, sebaiknya perlu memberikan ciri-ciri dari komunikasi sosial. Beberapa ciri yang dimaksud sebagai berikut:

1. Partisipan komunikasi cenderung lebih dari dua orang;
2. Partisipan terikat dalam sistem sosial, atau juga bisa membentuk sistem sosial;

3. Komunikasi selalu berkaitan dengan publik, baik langsung maupun tidak langsung;
4. Cara masyarakat berkomunikasi seperti sambutan, pantun, teka-teki, dongeng, cerita rakyat, atau pribahasa termasuk dalam komunikasi sosial;
5. Informasi, hiburan, dan berbagi informasi juga merupakan bagian dari komunikasi sosial.

4.1.2 Pembangunan dalam Korelasi Komunikasi Sosial

Konsep pembangunan sebetulnya memiliki banyak sudut pandang. Para ilmuwan mendefinisikan pembangunan menurut pandangannya masing-masing. Seperti yang diungkap Rogers (2010), pembangunan adalah proses yang terjadi pada tingkatan sistem sosial. Menurutnya, pembangunan merupakan proses perubahan sosial yang bersifat partisipatoris secara luas. Tujuan pembangunan mengarah pada kemajuan kondisi sosial dan kebendaan bagi masyarakat (Raharjo & Kartika, 2019).

Dalam pandangan lain, Saul M. Katz misalnya, pembangunan dipandang sebagai suatu keadaan negara di mana ada perbaikan (Kumoro, 2015). Dalam pembangunan, terdapat indikator-indikator perbaikan yang bertujuan untuk mendorong kemajuan suatu wilayah atau negara. Beberapa indikator dibutuhkan untuk mengukur kesejahteraan manusia, seperti kemiskinan, ketidakadilan, keberlanjutan, dan kemerdekaan. Maka dari itu, bisa dibilang pembangunan mengarah kepada hal yang positif.

Komunikasi sosial dan pembangunan memiliki hubungan erat. Komunikasi sosial yang berlangsung secara terus-menerus akan menciptakan perubahan sosial. Perubahan sosial itu akan menyentuh lingkup mulai dari individu, bahkan hingga sistem sosial. Jika direncanakan secara matang dan terus-menerus, komunikasi sosial yang konsisten akan turut serta mendorong pembangunan. Pembangunan kurang lebih merupakan fase

perubahan sosial yang mengarah positif. Maka dari itu, komunikasi sosial yang baik dan konsisten akan membentuk pembangunan yang terarah. Sebaliknya, komunikasi sosial yang buruk akan turut memperburuk pembangunan.

4.2 Rumusan Baru Komunikasi Sosial dalam Pembangunan

Untuk mendorong pembangunan yang positif, maka komunikasi sosial juga memiliki rumusan terencana. Dalam rumusan yang baik, diestimasikan pembangunan juga bisa terdampak baik. Maka dari itu, penulis memberikan rumusan baru yang penting untuk pembangunan sebagai berikut:

4.2.1 Partisipatif dan inklusif

Komunikasi sosial dalam pembangunan perlu melibatkan hal yang bersifat partisipatif dan inklusif. Dalam konteks partisipatif, komunikasi menekankan partisipasi aktif masyarakat yang terlibat dalam pembangunan. Model komunikasi ini mendukung pembangunan dengan mendorong masyarakat agar bangga terhadap budaya dan sumber dayanya sendiri. Bisa dikatakan, komunikasi partisipatif ini menjadi suatu pendekatan alternatif dalam memfasilitasi proses yang sifatnya partisipatif (Arlena *et al*., 2023)

Komunikasi partisipatif memerlukan perubahan pemikiran dari sisi komunikator dan partisipasi yang ingin mendengarkan. Dengan adanya model komunikasi ini, hal ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan dalam pembangunan. Untuk memenuhi keberhasilan komunikasi partisipatif, ada beberapa langkah yang perlu diikuti, yakni (Hadiyanto, 2008):

1. Menumbuhkan keyakinan kepada tiap individu mendapat haknya untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan. Masyarakat tidak dijadikan sebagai obyek, melainkan sebagai subyek yang aktif;

2. Komunikasi harus mewujudkan kerja sama timbal balik untuk seluruh tingkatan partisipasi. Tiap pihak berusaha mendengar apa yang orang lain katakan, punya rasa saling percaya, dan saling menghormati;
3. Komunikasi menempatkan semua pihak sebagai partisipan yang setara. Tidak ada yang mendominasi dari salah satu pihak saja. Semua memposisikan dirinya sebagai aktor komunikasi
4. Komunikasi harus dilakukan secara terbuka dan dialogis. Pengambilan keputusan juga bisa memuaskan semua pihak tanpa tekanan, artinya tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang lebih diuntungkan.
5. Komunikasi partisipatif harus bisa membuka akses dan kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkan seluruh media komunikasi yang ada. Tindakan ini menunjukkan bukti keterbukaan atas media komunikasi yang tersedia untuk publik.

Sementara dalam konteks inklusif, komunikasi itu bisa mencakup seluruh warga, termasuk orang-orang berkebutuhan khusus. Konteks dalam komunikasi ini tidak membedakan satu sama lain dan bersifat mengajak kepada seluruh pihak untuk turut serta dalam pembangunan. Hal ini bisa berdampak kepada pembangunan yang ramah tanpa membeda-bedakan orang dari sisi ras, agama, kesukuan, atau juga kemampuan fisik. Dengan demikian, pembangunan bisa terlaksana tanpa pandang bulu dan terjadi pemerataan kesempatan kepada semua pihak untuk memperoleh hasil dari pembangunan.

4.2.2 Transparansi dan Akses Informasi

Komunikasi sosial pembangunan bisa menekankan pentingnya transparansi dan akses informasi. Transparansi menyangkut pada prinsip keterbukaan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui sejauh mana

kemajuan pembangunan yang berlangsung. Hal ini juga berkaitan dengan akses informasi yang dibuka seluas-luasnya sehingga tercipta *checks and balance.* Seluruh akses informasi yang memang bisa dibuka untuk publik sudah seharusnya diberikan tidak hanya untuk pemangku kepentingan saja, tetapi juga kepada masyarakat umum (Lidhyatma, 2013).

Transparansi menempatkan keterbukaan terhadap seluruh elemen pembangunan yang ditujukan kepada masyarakat. Transparansi bisa dimulai keterbukaan dari sisi perencanaan, pelaksanaan, dan pengontrolan, serta proses kebijakan. Dalam keterkaitan antara transparansi dan pelayanan publik, ada lima hal yang bisa disampaikan (Komarudin & Yudo, 2009). Pertama, memberikan motivasi kepada penyelenggara pelayanan publik untuk mewujudkan transparansi tersebut. Kedua, mengukur tingkat transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik melalui ukuran Indeks Kepuasan Masyarakat. Ketiga, perbaikan pelayanan masyarakat harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan, serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Keempat, penerapan teknologi informasi bisa menjadi alat bantu yang penting dalam melaksanakan transparansi dan pelayanan publik. Kelima, bekerja sama dengan lembaga pengawasan masyarakat.

Dalam mewujudkan akses informasi yang terbuka, pemerintah dan lembaga pembangunan harus mendorong terbukanya akses informasi tersebut. Pihak mereka harus bisa memastikan data bisa diakses semua orang sehingga membuat transparansi itu menjadi nyata. Dengan demikian, partisipasi luas dari masyarakat bisa terwujud. Masyarakat juga bisa mengawasi dan mengevaluasi jalannya pembangunan yang sedang berlangsung, serta memberikan kritik jika terjadi kekeliruan dalam pembangunan.

4.2.3 Komunikasi Dua Arah

Rumusan komunikasi dua arah menggeser komunikasi satu arah dalam komunikasi sosial pembangunan karena dinilai lebih signifikan. Dibanding dengan komunikasi satu arah, komunikasi dua arah lebih interaktif. Sebab, komunikasi dua arah menempatkan komunikan lebih aktif dalam memandang pesan yang disampaikan komunikator. Dengan demikian, pesan yang diterima lebih jelas jika dibanding dengan komunikasi satu arah.

Komunikasi dua arah dapat dipahami sebagai komunikasi yang efektif dan memiliki aspek-aspek seperti pengertian bersama; kepecayaan pada pelaku komunikasi; dan kerja sama (Pratiwi & Yuniasanti, 2014). Pengertian bersama adalah kemampuan berkomunikasi untuk mewujudkan pengertian bersama, artinya terdapat penerimaan oleh komunikator dan terjadi timbal balik antara komunikator dan komunikan. Kepercayaan pada pelaku komunikasi maksudnya komunikasi yang memberikan kepercayaan satu sama lain. Kerja sama berarti terjadi kerja sama antara atasan dan bawahan untuk saling bekerja sama dan mengemukakan pendapat satu sama lain. Maka dapat dikatakan, interaksi dalam komunikasi dua arah sangat resiprokal, dalam artian bisa memberikan umpan balik.

Komunikasi dua arah yang dibangun harus memfasilitasi diskusi, dialog, dan pertukaran pikiran antara *stakeholder,* praktisi pembangunan dan masyarakat. Melalui upaya ini, akan tercipta pemahaman dari sisi kedua belah pihak. Masyarakat akan lebih mengerti tentang komunikasi sosial yang dibangun pemerintah, dan tentunya bisa lebih banyak menampung aspirasi dan harapan masyarkat. Inti dari komunikasi dua arah adalah komunikasi yang memberikan hubungan positif antara dua pihak sehingga membuat pembangunan lebih relevan dan efektif.

4.2.4 Pemberdayaan Masyarakat

Komunikasi sosial dalam pembangunan harus memiliki fungsi pemberdayaan masyarakat. Menurut penelitian, pemberdayaan masyarakat merujuk pada tindakan untuk memenuhi beberapa tujuan, yakni memenuhi kebutuhan pokok masyarakat berupa konsumsi dan usaha produktif; meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; dan meningkatkan tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan. Kemudian, pemberdayaan masyarakat juga mencakup upaya menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan dirinya; membangun sarana dan prasarana fisik wilayahnya; dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Nasor, 2017).

Ada tiga aspek yang penting dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Tiga aspek tersebut diyakini mampu memaksimalkan pemberdayaan masyarakat. Pembahasannya dijelaskan sebagai berikut (Noor, 2011):

1. Aspek *enabling,* yakni aspek menciptakan suasana yang membuat masyarakat berkembang. Maksudnya, setiap potensi yang dimiliki masyarakat itu harus bisa dikembangkan. Pemberdayaan menjadi upaya mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran potensi yang dimiliki masyarakat, sekaligus juga berupaya untuk mengembangkannya.
2. Aspek *empowering,* yakni memanfaatkan potensi yang dimiliki masyarakat melalui aksi-aksi nyata. Aksi-aksi tersebut berupa memberikan masukan dan mendorong peluang masyarakat agar semakin berdaya saing. Bentuk nyata dari aksi tersebut seperti meningkatkan taraf pendidikan, tingkat kesehatan, serta akses masyarakat ke sumber-sumber ekonomi.

3. Aspek *protecting*, yakni melindungi masyarakat yang lemah sebagai upaya meningkatkan paritipasi masyarakat. Dengan begitu, pemberdayaan masyarakat sangat berhubungan dengan ekonomi, tetapi lebih dari itu juga sebagai bidang politis. Artinya, terdapat tujuan untuk meningkatkan posisi tawar masyarakat yang berfokus kepada sisi lokalitas.

Melakukan pemberdayaan masyarakat juga membutuhkan pendekatan. Pendekatan utama dalam memberdayakan masyarakat adalah tidak menjadikan masyarakat sebagai obyek, melainkan dijadikan sebagai subyek atas pembangunannya sendiri. Untuk pendekatan lanjutan, ada tiga pendekatan yang bisa dilakukan (Noor, 2011). Pertama, pemberdayaan masyarakat harus *targeted*, artinya upaya itu harus terarah kepada pihak yang butuh program dengan tujuan mengatasi masalah yang sesuai kebutuhan. Kedua, pemberdayaan harus mengikutsertakan masyarakat yang dijadikan sasaran pembangunan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya masyarakat dalam merancang, melaksanakan, dan mengelola peningkatan pembangunan wilayahnya. Ketiga, pemberdayaan perlu menggunakan pendekatan kelompok karena masyarakat miskin sulit memecahkan masalahnya sendiri. Dengan mengedepankan pendekatan kelompok, maka masyarakat bisa saling memajukan kelompoknya.

Pemberdayaan masyarakat memiliki hakekat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat supaya bisa lebih mandiri dan bisa mengatasi berbagai tantangan dalam hidup. Dengan demikian, hal ini bisa mendorong masyarakat untuk meningkatkan ekonomi, pendidikan, budaya, dan pemahaman politiknya untuk lebih maju. Pemberdayaan masyarakat mencoba untuk memberikan suatu ruang bagi masyarakat untuk lebih aktif dalam menata dan mengelola pembangunan. Komunikasi sosial yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat dapat memfasilitasi masyarakat untuk melakukan

transfer pengetahuan serta meningkatkan nalar dan keaktifan masyarakat untuk turut mendorong pembangunan yang lebih baik.

4.2.5 Kolaborasi dan Kemitraan

Komunikasi sosial dalam pembangunan juga perlu memiliki rumusan kolaborasi dan kemitraan. Kolaborasi dan kemitraan menyangkut upaya melibatkan dengan berbagai macam pihak untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kolaborasi berasal dari kata "*co*" dan "*labor*", diartikan sebagai penyatuan tenaga yang dimanfaatkan untuk memperoleh tujuan yang disepakati bersama. Merujuk pada hal tersebut, kolaborasi merupakan proses yang bersifat lintas sektor, lintas batas, dan lintas hubungan, bahkan hingga lintas organisasi dan negara (Saleh, 2020). Dalam konteks pelaksanaannya, kolaborasi cenderung bisa lebih optimal jika ada prasayarat umum dan kesepakatan yang jelas dari masing-masing pihak. Sehingga, pelaksanaan dari kolaborasi itu tidak dilaksanakan secara terpaksa dan tertekan.

Dalam suatu penelitian, ada 11 manfaat dari kolaborasi yang penting untuk antar individu/ lembaga. Sebelas manfaat itu antara lain (Saleh, 2020):

1. Meningkatkan fleksibilitas organisasi,

   Jika kolaborasi dilaksanakan dengan baik, kemampuan organiasasi tersebut semakin berkembang, terutama dalam menangani perubahan yang terjadi tiba-tiba. Pola kerja tim membuat penyelesaian pekerjaan lebih ringan dan mudah.

2. Mempertautkan para pekerja

   Cara terbaik dalam melaksanakan pekerjaan dalam organiasasi adalah dengan berkolaborasi satu sama lain dalam sebuah tim. Jika tidak, hal tersebut tidak menguntungkan organisasi.

3. Memperlakukan karyawan secara sehat

   Kolaborasi berpotensi meningkatkan kondisi kesehatan kerja karyawan. Menurut kajian, jika ingin terjadi pola kerja karyawan yang berkualitas dan bertanggung jawab, maka perlu diciptakan nilai budaya kerja ideal yang dilakukan melalui pola kerja yang kolaboratif.

4. Menyelenggarakan rapat koordinasi yang produktif.

   Para karyawan hanya butuh rapat kerja ketika dibutuhkan sebagai alat koordinasi dan alat dokumentasi atas kemajuan kerja yang telah dilakukan. Kolaborasi yang efektif membantu kita akan hal ini.

5. Mendorong tercipta talenta terbaik

   Kolaborasi yang baik mampu menciptakan orang-orang yang bertalenta tinggi. Dengan memberi motivasi, saling menghormati dan mengapresiasi kerja, kolaborasi bisa meningkatkan kemampuan talenta mereka.

6. Memacu kemajuan bisnis yang lebih cepat

   Budaya kolaboratif dapat meningkatkan kemampuan organisasi dalam berbisnis, terutama produksi dan mempercepat pemasaran. Bahkan, bisa meningkatkan kemampuan organisasi untuk menciptakan produk-produk baru.

7. Meningkatkan daya ingat lebih tinggi

   Kolaborasi yang sehat dapat meningkatkan daya ingat lebih tinggi karena menciptakan kondisi ekosistem kerja yang sehat. Kondisi ini akan memberikan suatu kontribusi berupa kenyamanan, loyalitas, dan dukungan moral sesama tim. Efeknya berupa ingatan yang baik.

8. Menciptakan ide kreatif dan inovatif

   Kolaborasi yang baik adalah kolaborasi yang bisa mengelola friksi. Jika friksi dapat dikelola dengan baik, maka konflik-konflik interpersonal yang digunakan untuk memunculkan ide-ide kreatif dan inovatif yang bersifat positif.

9. Menempatkan posisi stakeholder lebih tepat

   Ide kolaborasi bisa digunakan untuk membangun kolaborasi terhadap pihak eksternal, seperti *partners, customers, vendors, suppliers*, dan *stakeholders* yang berkaitan dengan produk yang dihasilkan.

10. Meningkatkan produktivitas kerja segenap individu

    Berdasarkan penelitian, ternyata pelaksanaan proses kolaborasi digunakan sebagai sarana membentuk jaringan kerja ternyata bisa meningkatkan produktivitas kerja sebesar 20-30 persen.

11. Meningkatkan keuntungan

    Kolaborasi bisa meningkatkan keuntungkan terhadap semua pihak yang telah melakukan kolaborasi. Berbagai keunggulan yang dimiliki semua pihak yang berada dalam tim bisa memberikan silang budaya satu sama lain sehingga memberikan keuntungan terhadap semua pihak. Hal ini juga bisa menambah kemampuan baru, selain metode kerja dan produk baru.

Sementara, kemitraan memiliki kerja sama dengan individu, kelompok, lembaga, atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama yang bersifat berkelanjutan. Dalam kemitraan tersebut, terjadi relasi antar organisasi yang berujung kepada kerja sama (Fatmawati, 2011). Kemitraan yang dijalin dengan baik dapat memberikan banyak manfaat. Beberapa manfaatnya seperti meningkatkan produktivitas organisasi dan membantu organisasi memperoleh tujuan secara lebih efisien. Kemudian,

kemitraan juga bisa mengurangi beban risiko yang ditanggung organisasi dan memberi dampak sosial yang signifikan (Fatmawati, 2011). Semua itu menjadi manfaat yang sangat membantu pembangunan. Komunikasi sosial yang menggunakan pendekatan seperti ini bisa lebih mudah merangkul masyarakat agar bisa lebih saling berinteraksi. Dengan begitu, komunikasi sosial bisa menjangkau masyarakat dengan lebih cepat dan memobilisasi mereka untuk kepentingan pembangunan yang lebih maju.

Antara kolaborasi dan kemitraan memiliki kemiripan satu sama lain, baik dari segi manfaat maupun definisi pemahaman. Tetapi dalam hal ini, ada sedikit perbedaan yang perlu disorot. Perbedaan itu ada pada cakupannya. Jika kolaborasi, terdapat cakupan lebih luas dari kemitraan. Kolaborasi mencakup hal yang lebih luas, yakni mengenai antar sektor, organisasi, bahkan negara. Sedangkan, kemitraan hanya mencakup satu sektor saja.

4.3 Kesimpulan

Komunikasi sosial sebetulnya merupakan bagian dari komunikasi yang berfokus kepada suatu integrasi sosial. Konsepsi komunikasi sosial sebetulnya tidak seajeg yang dibayangkan, ia lebih menyesuaikan dalam beberapa sudut pandang. Tinggal kita saja yang perlu memilahnya. Secara pandangan umum, inti dari komunikasi sosial ini adalah suatu upaya untuk mengintegrasikan masyarakat secara sosial melalui cara-cara komunikasi.

Dalam pembangunan, kehadiran komunikasi sosial amatlah vital karena sangat berhubungan erat satu sama lain. Pembangunan pasti berkaitan dengan perubahan sosial. Sementara, jalinan komunikasi sosial akan menghasilkan perubahan sosial. Maka, korelasi kedua hal ini sangatlah berhubungan. Komunikasi sosial yang baik tentu akan menciptakan pembangunan yang baik pula, begitupun sebaliknya.

Dalam merumuskan komunikasi sosial dalam pembangunan, rumusan baru diperlukan untuk memajukan pembangunan. Beberapa rumusan baru yang ditawarkan ada dalam beberapa hal: (1) partisipatif dan inklusif; (2) transparansi dan akses informasi; (3) komunikasi dua arah; (4) pemberdayaan masyarakat; (5) kolaborasi dan kemitraan. Lima hal ini diyakini bisa membuat rumusan pembangunan yang lebih transformatif.

Dalam partisipatif dan inklusif, penekanan komunikasi sosial menekankan para partisipasi masyarakat dan bersifat inklusif. Model ini mendorong pembangunan yang seluruh pihak aktif di dalamnya sehingga berdampak kepada perubahan yang signifikan. Sisi inklusif menekankan pada sesuatu yang ramah dan tidak membeda-bedakan orang dari banyak faktor, seperti ras, kesukuan, agama, atau kemampuan fisik.

Dalam transparansi dan akses informasi, transparansi menyangkut prinsip keterbukaan yang memberi kesempatan masyarakat untuk melihat informasi secara transparan. Dalam konteks ini, transparansi sangat berkaitan dengan akses informasi yang memang dibuka dan diperuntukkan untuk publik. Transparansi bisa memulai keterbukaan dari segi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan termasuk proses kebijakan. Untuk mewujudkan transparansi dan akses informasi yang terbuka, pemerintah perlu mendorong keterbukaan akses informasi terhadap publik, serta harus bisa memastikan data itu benar-benar transparan.

Komunikasi dua arah juga lebih dibutuhkan dibanding komunikasi satu arah dalam komunikasi sosial pembangunan. Komunikasi dua arah menjadi penting karena mampu memberikan pengertian bersama tidak hanya satu pihak, tetapi juga pihak yang dikomunikasikan. Keadaan demikian bisa membentuk kerja sama yang baik dan sehat. Dalam membentuk komunikasi dua arah yang baik, maka komunikasi dua arah

harus bisa memfasilitasi diskusi, dialog, dan tukar gagasan antara praktisi pembangunan, masyarakat, dan *stakeholder*.

Komunikasi sosial pembangunan juga harus memiliki fungsi pemberdayaan masyarakat. Hal ini dilakukan agar bisa memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, sekaligus meningkatkan kesadaran dan pengetahuan yang mereka miliki. Ada tiga aspek yang diyakini bisa memaksimalkan pemberdayaan masyarakat, yakni *enabling*, *empowering*, dan *protecting*. Dengan memaksimalkan tiga aspek ini, maka pemberdayaan masyarakat bisa jauh lebih signifikan. Pada intinya, hakekat pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kondisi tersebut bisa membuat masyarakat lebih mandiri, utamanya mengatasi tantangan hidup.

Kolaborasi dan kemitraan memiliki artian dalam upaya menjalin kerja sama dengan pihak lain, lalu membuat kesepakatan dan mengantarkan kepada tujuan yang sama sesuai dengan kesepakatan. Banyak sekali manfaat dari kolaborasi dan kemitraan. Jika hal ini diaplikasikan dalam komunikasi sosial pembangunan, rumusan ini dapat sangat membantu para pihak.

Rumusan baru tentang komunikasi sosial dalam pembangunan memperlihatkan pentingnya mengubah cara kita berkomunikasi dalam konteks pembangunan. Rumusan ini tentu memperhatikan faktor-faktor yang penting, seperti yang disebutkan di atas, sebagai pilar utama dalam pendekatan komunikasi sosial terhadap pembangunan. Faktor-faktor ini diyakini bisa mejadi pemicu terwujudnya pembangunan yang lebih baik.

Bab 5

Strategi Baru Pembangunan

5.1 Masalah Dasar dalam Pembangunan

Indonesia sebagai negara berkembang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perencanaan pembangunan. Telah terjadi pergeseran paradigma secara teratur dalam perencanaan pembangunan di Indonesia. Setidaknya sejak awal masa reformasi, ketika paradigma perencanaan pembangunan berubah dari perencanaan holistik menjadi perencanaan strategis. Pemerintah memilih paradigma perencanaan strategis karena menawarkan keuntungan jangka pendek yang jelas. Paradigma perencanaan strategis yang dianut oleh pemerintah dalam perencanaan pembangunan daerah akan lebih bernilai ketika melibatkan aktor-aktor yang membuat perencanaan pembangunan daerah berorientasi pada tujuan. Perkembangan ekonomi tahunan terkait perkembangan ekonomi Indonesia triwulan I tahun 2020 sangat kuat pada sektor telekomunikasi dan informasi sebesar 53 persen. Pemerintah berusaha memaksimalkan situasi ekonomi Indonesia, namun pandemi Covid-19 memiliki semua dampak negatif yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, dampak pandemi ini akan berdampak signifikan terhadap segala aspek, terutama kesehatan dan perekonomian negara. Dengan adanya pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, tidak dapat dipungkiri bahwa perekonomian

Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang "sangat tidak normal" (Yusdha *et al*., 2022).

Teori pertumbuhan ekonomi telah menunjukkan bahwa pengembangan sumber daya manusia dan elemen kelembagaan sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara. Negara-negara industri biasanya memiliki kelembagaan yang andal dan sumber daya manusia yang baik. Situasi ini tidak sama dengan yang biasa terjadi di negara berkembang, termasuk Indonesia. Strategi pembangunan Indonesia masih bergantung pada teori pertumbuhan ekonomi klasik tahun 1960an, kurang memperhatikan aspek kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia yang baik, meskipun teori pertumbuhan ekonomi saat ini berkembang sangat pesat (Pradiptyo *et al*., 2018).

Proses pembangunan di negara berkembang membutuhkan waktu yang lama. Pembangunan tidak terjadi begitu saja, melainkan bertahap dan berkesinambungan. Model pembangunan negara-negara berkembang lebih dekat dengan negara-negara maju, terutama negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Namun, hasil yang diperoleh tidak sama. Bagi negara-negara berkembang, pesatnya kemajuan di Eropa dan Amerika menjadi pendorong untuk mengikuti apa yang dilakukan di negara-negara tersebut.

Ada dua hal untuk melihat pembangunan pada negara tersebut, pertama, negara terlibat dalam menumpuk modal secara langsung dengan memiliki sumber daya finansial dan menanam modal dalam berbagai industri melalui perusahaan negara. Kedua, negara terlibat dalam menumpuk modal secara tidak langsung melalui perencanaan, peraturan, dan pelaksanaan kebijakan (Hiariej, 2006). Melihat permasalahan dasar yang sering jadi pusat perhatian pemerintah dalam pembangunan yaitu, sebagai berikut:

1. Kemiskinan
2. Ketimpangan distribusi pendapatan

3. Kesempatan kerja dan pengangguran, dan
4. Inflasi

5.2 Indikator Keberhasilan Pembangunan

Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan pendapatan per kapita bukanlah tujuan, tetapi tujuan pencapaiannya lebih dari itu. Pertumbuhan ekonomi yang kuat dan pendapatan per kapita yang terus meningkat merupakan indikator yang kuantitatif dan paling mudah diimplementasikan. Meskipun tidak cukup hanya menggunakan pendekatan kuantitatif dalam pembangunan, namun pendekatan kualitatif juga diperlukan. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang relatif kompleks dan sulit diukur (Hasan & Muhammad, 2018).

Tentunya tidak mudah untuk melakukan pembangunan di negara berkembang, dimana terdapat berbagai permasalahan yang sangat kompleks untuk diatasi dan dihadapi. Tantangan pembangunan di negara berkembang tidak sesederhana yang dibayangkan dari sudut pandang teori yang ada. Sebuah teori yang cocok untuk satu negara berkembang belum tentu cocok untuk negara berkembang lainnya.

Indikator Pembangunan merupakan tolok ukur yang digunakan dalam mengukur performa suatu negara dalam pencapaian pembangunannya, serta perbandingan terhadap negara-negara lain. Laju pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah merupakan indikator keberhasilan pembangunannya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi.

Adanya penambahan penduduk dalam suatu daerah, maka akan menyebabkan bertambahnya pendapatan di setiap tahunnya. Pendapatan yang tinggi akan menjadikan suatu daerah memiliki pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang bagus. Hal ini tidak berlaku di Indonesia, karena Indonesia masih

memiliki penduduk yang nilai pendapatannya di bawah standar kebutuhan hidupnya dan hanya sedikit manfaatnya dalam memecahkan masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi pada banyak daerah dan menjadi masalah sosial yang bersifat global, tidak hanya di Indonesia bahkan di negara lain pun masalah ini juga perlu perhatian khusus dari pemerintah. Tingkat kemiskinan yang tinggi di suatu daerah bisa disebabkan oleh banyak faktor diantaranya kurangnya akses masyarakat untuk mendapatkan fasilitas kesehatan, Pendidikan yang kurang memadai, dan infrastruktur yang tidak mendukung.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang potensial di Asia Tenggara ikut menyesuaikan diri dengan kondisi penyempurnaan *Millenium Development Goals* (MDGs) menjadi *Sustainable Development Goals* (SDGs) mulai dilakukan pasca 2015. Jika sebelumnya pencapaian MDGs Indonesia dapat dikatakan baik pada beberapa indikator (Sudagung *et al.*, 2019).

a. Strategi Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu indikator terbaik dari kemakmuran suatu negara. Pembangunan manusia berarti pertumbuhan positif dan perubahan kesejahteraan. Pembangunan manusia menekankan pada perluasan pilihan masyarakat untuk hidup penuh dengan kebebasan dan bermartabat. UNDP menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia Indonesia adalah 68,4 pada tahun 2013. Pencapaian HDI ini menempatkan Indonesia sebagai "rata-rata" dalam pembangunan manusia. Tak hanya itu, pencapaian ini menempatkan Indonesia pada peringkat 108 dari 187 negara dalam pencapaian pembangunan manusia di dunia. Di ASEAN, Indonesia berada di tengah, yakni. di tempat kelima. Antara tahun 1970 dan 2010, Indonesia juga mengalami perkembangan manusia yang luar biasa sehingga termasuk dalam kelompok World's Prime Mover in HDI Improvement. Pencapaian IPM

Indonesia pada tahun 2013 merupakan gabungan dari tiga aspek yaitu umur panjang dan pola hidup sehat, pengetahuan dan taraf hidup yang baik (Badan Pusat Statistik (BPS), 2015).

HDI merupakan indeks komposit yang mencakup indeks pengetahuan, kesehatan, dan kesejahteraan (Rayhan, 2021). Untuk indeks kesehatan merupakan cerminan dari tingkat kesehatan di suatu wilayah. Perspektif kesehatan berdasarkan angka harapan hidup saat lahir belum dapat menggambarkan dengan tepat indeks kesehatan, sehingga diperlukan indikator untuk mengukur pembangunan kesehatan yaitu Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM). IPKM merupakan indikator komposit yang menggambarkan kemajuan pembangunan kesehatan dan dirumuskan dari 30 indikator kesehatan. Indeks kesehatan Indonesia menduduki peringkat ke-108 dari seluruh negara di dunia menurut Human Development Reports pada tahun 2013 (Ayu *et al*., 2017).

Indeks pengetahuan atau kita sering menyebutkan pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia, sehingga dengan adanya pendidikan diharapkan kualitas sumber daya manusia semakin meningkat. Dalam kehidupan manusia, pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting untuk meningkatkan kualitas manusia bahkan prestasi pendidikan, yaitu. H. rata-rata lama sekolah dan rata-rata harapan sekolah digunakan sebagai variabel dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bersama dengan variabel kesehatan dan ekonomi. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk suatu masyarakat, kemungkinan akan semakin baik pula kualitas sumber daya manusianya (BKKN, 2016).

Menurut Undang-undang No.11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa sebagai berikut: Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup

layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Sosial, 2009). Indeks Kesejahteraan Sosial merupakan alat untuk mengukur kesejahteraan sosial suatu masyarakat. Hasil pengukuran ini dapat digunakan dalam mengevaluasi program kesejahteraan pemerintah. Indikator sosial merupakan langkah strategis dalam evaluasi dan perencanaan program pembangunan sosial. Pengukuran ini memberikan data dan informasi tentang status sosial di Indonesia (Setiawan, 2019).

b. Strategi Menyukseskan Pembangunan Berkelanjutan

Strategi keberhasilan pembangunan berkelanjutan terletak pada bentuk pembangunan berkelanjutan di bidang ekonomi, berkelanjutan secara sosial dan berkelanjutan secara ekologis. Hal ini harus dikembangkan jika pembangunan tidak dilakukan secara seimbang, model pembangunan konvensional akan tetap terbatas pada pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan pembangunan sosial dan lingkungan. Salah satu konsekuensi dari pembangunan tradisional adalah distribusi hasil pembangunan yang tidak merata. Dua puluh persen penduduk dunia tinggal di negara maju dan menguasai 80 persen pendapatan dunia, sementara 80 persen penduduk dunia tinggal di negara berkembang dan hanya menguasai 20 persen pendapatan dunia (Rayhan, 2021).

Pembangunan global yang selanjutnya sering disebut dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai transformasi Tujuan Pembangunan Milenium/Millenium Development Goals (MDGs) merupakan agenda pembangunan global. Untuk memastikan pemulihan yang berkelanjutan, Pemerintah menyiapkan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dengan mengusung prinsip keselarasan *green recovery* dan *green economy* yang inklusif dan berkelanjutan.

Akibatnya, kondisi sosial (kesehatan, pendidikan, dan kemiskinan), penurunan sumber daya alam (batu bara dan bahan bakar fosil) dan kerusakan lingkungan udara, air, dan sungai tidak menghambat atau membatasi pembangunan tradisional dan pencemaran laut, serta kekurangan air pada musim kemarau dan banjir pada musim hujan di banyak negara berkembang di Indonesia. Pembangunan ekonomi juga meningkatkan pendapatan nasional, yang memberikan kesempatan kepada negara untuk melestarikan lingkungannya sedemikian rupa sehingga tidak mengalami kerusakan.

c. Strategi Meningkatkan Sosial Ekonomi

Untuk melihat bagaimana cara meningkatkan sosial ekonomi dalam suatu negara, maka perlu dicermati beberapa hal yang berkaitan erat dengan kesejahteraan negara tersebut. Meskipun strategi pembangunan selama ini mengadopsi pendekatan multidisiplin, sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup, namun ketiga pendekatan tersebut dilaksanakan secara terpisah dan tidak dihubungkan satu sama lain. Hal ini membuat pemerintah perlu mengkaji ulang atau melihat dengan rinci bagaimana seharusnya sosial ekonomi ini berjalan dengan baik dan layak bahkan mendekati sempurna. Ada beberapa hal yang perlu dilihat, diantaranya:

1. Jumlah penduduk menurut golongan umur

   Data penduduk berdasarkan kelompok umur sangat berguna untuk menentukan laju pertumbuhan penduduk dan jumlah lapangan kerja yang tersedia.

Tabel 5.1 Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin pada Tahun 2022

Kelompok Umur	Penduduk Jenis Kelamin Perempuan	Penduduk Jenis Kelamin Laki-laki	Jumlah Penduduk (Laki-laki & Perempuan
0 s/d 4	10.790,9	11.303,5	22.094,4
5 s/d 9	10.771,5	11.242,2	22.013,8
10 s/d 14	10.732,4	11.356,2	22.088,7
15 s/d 19	10.730,6	11.432,9	22.163,5
20 s/d 24	10.937,3	11.553,1	22.490,4
25 s/d 29	10.977,9	11.485,8	22.463,7
30 s/d 34	10.851,4	11.215,4	22.066,8
35 s/c 39	10.504,7	10.743,3	21.248,0
40 s/d/44	10.088,1	10.207,1	20.295,2
45 s/d 49	9.348,8	9.378,5	18.727,2
50 s/d 54	8.259,6	8.240,7	16.500,3
55 s/d 59	7.016,2	6.945,0	13.961,2
60 s/d 64	5.575,6	5.486,0	11.061,5
65 s/d 69	4.163,4	4.035,9	8.199,0
70 s/d 74	2.739,3	2.530,4	5.269,4

Kelompok Umur	Penduduk Jenis Kelamin Perempuan	Penduduk Jenis Kelamin Laki-laki	Jumlah Penduduk (Laki-laki & Perempuan
75+	2.897,1	2.232,9	5.130,6
Jumlah/ Total	136.384,8	139.388,9	275.773,8

Sumber : BPS, 2023

Dari **Tabel 5.1** menunjukkan bahwa sebanyak 66.196,9 orang (24%) masih belum mampu bekerja, usia produktif sebanyak 179.916,3 orang (65,2%) dan usia tidak produktif sebanyak 29.660,5 orang (10,75%). Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Indonesia memiliki penduduk usia kerja yang besar yaitu sebanyak 179.916,3 jiwa atau 65,2 persen dari total penduduk Indonesia.

2. Agama

Agama adalah kepercayaan besar yang melampaui kemampuan manusia dan disebut dengan berbagai nama. Dan kemudian tentang memeriksa dasar keyakinan agama, apakah itu benar atau salah, yang mengarah pada munculnya moralitas. Pemerintah mengakui enam agama karena terdiri dari tiga komponen utama, yaitu berupa ide, masalah yang akan dipecahkan dan hasil pemecahannya, adalah sebagai berikut: 1). agama Islam, 2). Kristen Protestan, 3). Katolik, 4). Hindu, 5). Budha dan 6). Agama Kong Hu Cu (Watra, 2020).

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan sangat berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia. Proses pembangunan dalam sebuah negara akan berjalan dengan lancar dan bagus jika

masyarakatnya memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, sehingga dapat membangun negara dengan baik. Pendidikan merupakan proses kegiatan universal dalam kehidupan manusia, karena dimanapun dan kapanpun di dunia ini pasti ada proses pendidikan. Pendidikan memberdayakan manusia untuk mengendalikan diri agar dapat mengembangkan potensi dirinya melalui pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, kemampuan dan kekuatan spiritual keagamaan. Dengan demikian, melalui pendidikan seseorang mampu mengenal dirinya sendiri dan hidup bermasyarakat dengan baik (Dahniar, 2022).

4. Mata Pencaharian

Indonesia merupakan negara agraris yang mana Mata pencaharian sebagian besar masyarakatnya adalah pertanian. Secara grafis, Indonesia juga merupakan negara kepulauan yang memiliki potensi alam yang besar, tidak hanya pada sektor pertanian, namun juga pada sektor kelautan dan perikanan. Salah satu potensi pertanian Indonesia yang tertinggi terletak di wilayah Indonesia, dimana sepertiga dari total wilayahnya ditutupi oleh pegunungan di dunia.

5.3 Sasaran Strategis Pembangunan

Sudah jelas bahwa pertumbuhan ekonomi bukan satu-satunya aspek pembangunan ekonomi; pembangunan ekonomi juga memerlukan perbaikan aspek kelembagaan. Tingkat pertumbuhan ekonomi sering diukur sebagai indikator efisiensi pembangunan. Mekanisme penghitungan pertumbuhan ekonomi bergantung pada PDB, jadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu menunjukkan kondisi ekonomi mikro atau penerima manfaat sebenarnya dari pertumbuhan ekonomi. Hasil analisis kajian Narasi Alternatif menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat tidak menjamin tercapainya

tujuan akhir pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam ekonomi yang bergantung pada ekspor bahan mentah (juga dikenal sebagai ekonomi yang berbasis sumber daya) belum tentu menghasilkan kesejahteraan umum (Pradiptyo *et al*., 2018).

Ada tiga definisi dari strategi pembangunan dalam cakupan yang luas: dipimpin oleh investor swasta dengan menggunakan pendekatan "ekonomi pasar", model "negara berkembang"; dan itu pendekatan yang menekankan pembangunan manusia. Bagian ini mengidentifikasi yang berbeda gagasan dan pandangan yang melandasi pembangunan sektoral (pendidikan, kesehatan, pertanian, infrastruktur, ekonomi), beberapa pengalaman internasional terkemuka, dan tantangan yang dihadapi setiap pendekatan (Anderson, 2012).

Kesejahteraan dalam suatu negara dapat diukur dengan PDB riil per kapita. Peningkatan kesejahteraan masyarakat secara garis besar dipengaruhi oleh dua hal yaitu: 1) Pertumbuhan ekonomi, dan 2) Laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk yang lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat pendapatan per kapita, yang berakibat pada penurunan angka kesejahteraan masyarakat (Bappenas, 2017). Terdapat beberapa acuan yang menjadi sasaran strategi dalam pembangunan pada suatu negara, yaitu sebagai berikut:

1. Rakyat bebas dari kemiskinan

   Ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, baik makanan maupun non-makanan, yang diukur dari sisi pengeluaran menurut BPS disebut kemiskinan sendiri. Salah satu tujuan Sustainable Development Goals (SDG) 2030 adalah pengentasan kemiskinan, Indonesia merupakan salah satu negara yang berkomitmen terhadap tujuan tersebut. Menurut BPS, angka kemiskinan Indonesia sendiri mencapai 9,54% pada Maret

2022, turun 0,17% dibandingkan September 2021. Angka kemiskinan ini merupakan capaian terbaik Indonesia pasca peristiwa Covid-19 yang melanda setiap negara di dunia. Di awal pandemi, begitulah pada Maret 2022, angka kemiskinan Indonesia sebesar 9,78 persen. Kemiskinan meningkat secara signifikan selama pandemi, memuncak pada pukul 10:19. pada September 2020 dan secara bertahap akan menurun setelahnya. Namun demikian, kemiskinan tidak menurun di seluruh provinsi Indonesia pascapandemi, namun di beberapa provinsi angka kemiskinan sudah meningkat sebelum pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa setiap provinsi di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dalam menangani kemiskinan (Setiawan & Zahra, 2023).

2. Rakyat bebas dari kebodohan

   Seseorang yang berpendidikan lebih besar kemungkinannya untuk mengembangkan kemampuannya secara optimal sehingga dapat mencapai potensi maksimalnya dan memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam hal inovasi dan perkembangan teknologi, pendidikan memberikan kesempatan kepada individu untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi terkini sehingga mampu menciptakan solusi baru terhadap permasalahan yang kompleks (Pangestu *et al.*, 2023). Oleh karena itu, pendidikan memegang peranan penting dalam mendorong kemajuan teknologi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pendidikan merupakan suatu proses mewujudkan potensi-potensi baik yang dimiliki manusia, yang menjadi subjek utama pendidikan. Menurut (Arfani, 2016) orientasi pendidikan sebenarnya adalah gambaran kepribadian manusia. Akibatnya, salah satu pilihan terbaik untuk membangun masa depan yang lebih baik adalah pendidikan.

3. Rakyat bebas dari pengangguran

   Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi berbagai permasalahan perekonomian, termasuk pengangguran. Angka pengangguran di Indonesia cukup tinggi, apalagi pada tahun 2020 akan meningkat menjadi 1,84% pada tahun 2019 (Putri & Ash Shidiqie, 2023). Pengangguran merupakan permasalahan yang kompleks karena banyak indikator yang dapat mempengaruhinya. Beberapa indikator ekonomi yang dapat mempengaruhi pengangguran adalah pertumbuhan ekonomi. Jika tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara meningkat maka diharapkan tingkat pengangguran akan menurun. Pengangguran juga merupakan faktor penting yang menggambarkan keadaan pembangunan ekonomi negara saat ini. Mengatasi pengangguran dapat meningkatkan tingkat perlindungan sosial melalui pendapatan per kapita (Silaban *et al*., 2020).

4. Negara bebas dari ketergantungan pada utang luar negeri

   Indonesia merupakan negara berkembang yang menggunakan utang luar negeri untuk membangun perekonomian negaranya, akibatnya utang luar negeri Indonesia meningkat setiap tahunnya. Di sisi lain, peningkatan utang luar negeri menjadi salah satu masalah ekonomi pasca goncangan atau resesi ekonomi global. Pembayaran utang luar negeri dan bunganya merupakan beban yang semakin meningkat setiap tahunnya (Wulandari *et al*., 2022). Utang luar negeri adalah pinjaman dimana pemerintah berkewajiban untuk membayar pihak asing berdasarkan kesepakatan bersama. Utang luar negeri juga menjadi pilihan bagi negara-negara untuk menambah modal guna mempercepat proses pembangunan. Anggaran negara berinvestasi pada utang luar negeri untuk menutupi defisit anggaran (Alamsyah *et al*., 2020). Maka pemerintah harus mencermati bagaimana cara menekan agar utang luar negeri

tidak kembali meningkat. Tujuan pemerintah dalam pemberian kredit luar negeri adalah untuk melaksanakan program pemerintah, menutup kesenjangan antara kebutuhan tabungan dan investasi dalam negeri, serta kesenjangan antara impor dan ekspor dalam proses pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur (Wulandari *et al*., 2022).

5. Negara bebas dari kekurangan devisa

   Devisa, salah satu alat dan sumber pembiayaan yang paling penting bagi negara untuk mendorong pertumbuhan ekonominya, harus dikelola dengan baik agar perdagangan, investasi, dan pembayaran kewajiban kepada pihak lain di luar negeri lancar. Besar kecilnya cadangan devisa suatu negara tergantung pada beberapa faktor seperti ekspor, nilai tukar, suku bunga dan inflasi. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, ekspor memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Devisa yang dihasilkan melalui kegiatan ekspor meningkatkan cadangan devisa negara yang pada akhirnya dapat memperkuat fundamental ekonomi makro Indonesia. Salah satu upaya pemerintah untuk memperoleh devisa adalah dengan menyalurkan kredit ke negara lain dan mengekspor produk komoditi ke luar negeri. Berdasarkan hasil tersebut, pembiayaan pembangunan negara dapat ditingkatkan (Sayoga & Tan, 2017).

6. Negara bebas dari kerusakan lingkungan

   Kerusakan lingkungan hidup biasanya disebabkan oleh ulah manusia sendiri. Jika alam dipandang sebagai hal yang penting dan menguntungkan maka perilaku yang muncul dari manusia itu sendiri adalah perilaku yang menghargai sekitar. Namun sebaliknya, jika tidak, maka perilaku yang muncul adalah perilaku yang dapat merusak lingkungan hidup yang ada.

5.4 Strategi Dasar Membangun Ekonomi Rakyat

Ada beberapa strategi dasar dalam membangun ekonomi rakyat, yaitu sebagai berikut:

1. Social Safety Net Strategy

   Pemerintah Indonesia telah melaksanakan prakarsa pengentasan kemiskinan sejak tahun 1998. Prakarsa ini awalnya diperkenalkan untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh dampak krisis keuangan. Saat itu, pemerintah Indonesia membuat program jaring pengaman sosial yang disebut *Social Safety Net* (Kaharudin, 2020). *Social Safety Net* dibuat untuk mencegah masyarakat agar tidak jatuh di bawah standar hidup minimum yang dianggap layak oleh masyarakat. Seiring waktu, pemerintah Indonesia memperluas kebijakan *Social Safety Net* dengan memasukkan program asuransi sosial bagi masyarakat miskin di Indonesia. Pada tahun 2007, pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah pusat meluncurkan program penanggulangan kemiskinan yang disebut Program Keluarga Harapan (PKH) (Suharto, 2015).

2. Employment Strategy

   Strategi dalam bidang ketenagakerjaan merupakan upaya pelaksanaan pembangunan nasional dengan menekankan tenaga kerja sebagai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan, sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (Kementerian Tenaga Kerja RI, 2003). Tenaga kerja memiliki arti yang lebih luas dibandingkan istilah buruh. Maka untuk menghilangkan perbedaan persepsi

terhadap penggunaan istilah tersebut maka istilah ketenagakerjaan lebih sesuai digunakan. Seperti istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan bukan Undang-Undang Perburuhan (Harahap, 2020).

Pembangunan ekonomi dinilai berhasil antara lain bila mampu menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja yang membutuhkan pekerjaan, tidak hanya bagi para penganggur (pencari kerja) tetapi juga bagi mereka yang sudah bekerja tetapi masih mencari pekerjaan. Kebijakan sektor untuk mendorong penyerapan tenaga kerja (*employment growth*) harus didasarkan pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang tepat. Pengangguran dan kemiskinan dalam pekerjaan dapat diselesaikan dengan mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan penciptaan pekerjaan yang lebih layak dan produktif. Oleh karena itu, pengurangan pengangguran dan penduduk miskin melalui penciptaan dan perluasan kesempatan kerja merupakan prasyarat untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Kerja, 2015).

3. Human Basic Needs Strategy

Paradigma baru pembangunan melalui pendekatan kebutuhan dasar manusia mengacu pada pencapaian tujuan tidak hanya dalam pencapaian aspek sosial ekonomi, tetapi juga dalam transisi ke bidang fundamental kehidupan manusia, yaitu masalah demokrasi, keadilan dan hak asasi manusia. Semua aspek tersebut merupakan kajian pembangunan terpenting dalam jargon pembangunan yang berpusat pada manusia *(grassroots oriented)* saat ini (Daman, 2013).

Peran pemerintah dalam mensejahterakan rakyat diwujudkan dalam bentuk program dan proyek yang menyediakan infrastruktur dan fasilitas baik finansial maupun non finansial. Pembangunan dengan penguatan

masyarakat desa merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Padahal standar untuk kebaikan bersama dapat dicapai baik secara materi maupun spiritual (Asaf, 2020).

4. Agriculture Reform Strategy

Pertanian merupakan salah satu bidang prioritas pembangunan lahan pertanian nasional yang berkelanjutan. Sektor pertanian merupakan peluang bagi keberhasilan ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial budaya, kelestarian lingkungan, stabilitas dan keamanan. Ketergantungan masyarakat terhadap keberadaan pertanian sangat besar. Bertani merupakan bagian dari kehidupan masyarakat petani pedesaan. Petani melakukan berbagai kegiatan pertanian hingga menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat di desa pertanian (Dumasari, 2020).

Pembangunan pertanian tidak lagi dianggap sebagai fondasi ekonomi nasional, tetapi lebih dianggap sebagai sarana untuk menyukseskan industrialisasi dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi (Aziza, 2014). Penguatan dan pengembangan pertanian memerlukan reformasi politik, tidak hanya untuk meningkatkan produksi untuk kebutuhan dalam negeri tetapi juga untuk ekspor. Peningkatan ekspor produk pertanian merupakan salah satu prasyarat terpenting untuk menjadi negara agraris kelas dunia. Kemajuan sektor pertanian memberikan pengaruh positif dan mendukung pengembangan sektor lain seperti industri, transportasi, pariwisata, perdagangan (sektor riil) dan usaha kecil dan menengah (sektor UKM) (Saragih, 2016).

Bab 6

Arah Baru Paradigma Pembangunan

6.1 Dasar Konstitutif Pembangunan

Pelaksanaan pembangunan di Negara Indonesia telah berjalan sejak awal pemerintahan orde lama. Pembangunan saat itu diharapkan mampu menciptakan kesetaraan kesejahteraan hidup rakyat Indonesia dengan bangsa-bangsa yang pernah hadir melakukan dominasi di tanah air dalam kurun waktu beberapa tahun hingga ratusan tahun. Demi mewujudkan hal tersebut sehingga pada tahun 1945 di mana saat itu menjadi fase vital dalam proses berdirinya Negara Indonesia, dirumuskanlah tujuan fundamental atas pembangunan (nasional) sebagaimana termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945), yakni "...memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...".

Selain itu pembangunan juga disebutkan pada pasal 258 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (2014) tentang Pemerintahan Daerah, bahwa "Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah". Adapun untuk pembangunan yang lebih spesifik tentang desa diterangkan pada pasal 1 huruf 8 dalam Undang-

Undang Nomor 6 tahun 2014 (2014), bahwa "Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa".

Melihat konsep tertulis pada beberapa dasar hukum di atas tentang pembangunan selanjutnya dapat dibuat beberapa penekanan penting yang dapat menjadi tumpuan perhatian, bahwa:

1. Pembangunan dilaksanakan guna memajukan kesejahteraan masyarakat,
2. Pembangunan dilaksanakan dapat menciptakan kondisi kehidupan bangsa yang cerdas,
3. Pembangunan dilaksanakan ketika terjadi keikutsertaan dalam kegiatan penjagaan dan penciptaan ketertiban dunia dengan menjadikan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagai dasar yang harus dijunjung tinggi,
4. Pembangunan dilaksanakan dapat menciptakan peningkatan pendapatan masyarakat,
5. Pembangunan dilaksanakan dapat menciptakan pemerataan pendapatan masyarakat,
6. Pembangunan dilaksanakan dapat membuat kesempatan kerja bagi masyarakat,
7. Pembangunan dilaksanakan dapat menciptakan akses antara masyarakat dengan berbagai kebutuhan kehidupan sehari-hari,
8. Pembangunan dilaksanakan dapat menciptakan pelayanan publik yang berkualitas,
9. Pembangunan dilaksanakan dapat menciptakan daya saing yang baik dengan daerah lainnya.
10. Pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas hidup warganya.

Berdasar rumusan poin penting di atas maka dapat diketahui bahwa orientasi dari dilakukannya pembangunan sesungguhnya adalah menciptakan kondisi kehidupan manusia yang sebaik-baiknya dengan menekankan aspek kenyamanan, kualitas kehidupan, kemudahan dalam akses berbagai urusan.

6.2 Pengertian Pembangunan

Penjelasan lainnya tentang pembangunan juga disampaikan oleh Setiadi & Kolip (2011) bahwa pembangunan merupakan sebuah perangkat upaya manusia dalam mengatur perubahan sosial dan kebudayaan agar searah dengan tujuan kehidupan sebuah bangsa dan negara, yang mana diusahakan dengan melakukan usaha ke arah pertumbuhan peradaban sosial dan kebudayaan dengan sebelumnya menetapkan target-target tertentu sebagai arah pencapaiannya.

Menambahkan penjelasan dari Setiadi & Kolip (2011), Kuncoro (2004) menjelaskan bahwa makna pembangunan mengalami pergeseran utamanya pada akhir tahun 1960-an. Sebelum masa itu, pembangunan selalu diidentifikasi dengan tingginya angka pertumbuhan ekonomi yang hanya berada pada angka-angka produksi barang dan jasa. Tetapi setelah ditilik lebih jauh ternyata pembangunan harus lebih luas dari sekedar pertumbuhan. Walaupun pertumbuhan dapat dicapai namun masih menyisakan masalah-masalah lama aspek seperti kemiskinan pada kawasan pedesaan, ketimpangan distribusi pendapatan, pengangguran di kawasan perkotaan, dan lainnya. Mydral dalam Kuncoro (2004) menjelaskan bahwa pembangunan sebagai pergerakan ke atas dari seluruh sistem sosial.

6.3 Macam-Macam Paradigma Pembangunan

Paradigma pembangunan telah banyak diulas oleh berbagai pakar, seperti yang disampaikan oleh Setiadi & Kolip (2011) tentang dua pendekatan, Kuncoro (2004) yang menyajikan fenomena ketimpangan pembangunan di negara kaya dan

miskin sumberdaya alam, serta Chalid (2006) yang menjelaskan pembangunan melalui 4 perspektif.

6.3.1 Paradigma Modernisasi dan Imperalisme

Secara teoritis pembangunan dijelaskan oleh Setiadi & Kolip (2011) melalui dua pendekatan, antara lain:

a. Modernisasi. Pada pendekatan ini istilah yang akan selalu digunakan adalah modern, pembangunan, pertumbuhan ekonomi, diferensiasi internasional, pembangunan bangsa, dan lainnya. Pendekatan modernisasi lebih menekankan pembangunan pada aspek pertumbuhan ekonomi. Penerapan langkah pertumbuhan ekonomi adalah tidak sama antara negara yang terkategori maju dengan yang tergolong negara berkembang sesuai dengan karakter masing-masing negara. Dalam pandangan negara-negara maju bahwa pembangunan akan berhasil manakala negara-negara berkembang meniru pertumbuhan ekonomi serta karakter manusia yang ada di negara-negara maju. Maka biasanya akan menjadi masalah kemudian dalam hal penentuan skala prioritas antara merubah karakter meniru negara maju atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu.

b. Imperialisme. Pada pendekatan ini istilah yang akan selalu digunakan adalah ketergantungan, eksploitasi, neokolonialisme, pembebasan, dan lainnya. Pendekatan ini menjadikan pondasi pemikiran Marxis sebagai basis, yang mana menganggap akumulasi harta milik negara-negara maju di Barat merupakan hasil dari aktivitas perampasan. Secara historis perampasan ini terjadi sejak dahulu kala mulai dari aktivitas penjajahan masa kolonial ratusan tahun lalu hingga saat ini. Dalam perkembangannya negara-negara berkembang mengikuti berbagai hubungan internasional lengkap dengan aturan-aturan yang harus dipatuhinya, yang menjeratnya untuk melaksanakan sejumlah kewajiban

kepada pihak asing, sementara kondisi negara-negara berkembang tidak lebih baik malah terjebak dalam ketidakberdayaan.

Menyambung penjelasan Setiadi & Kolip (2011) mengenai pembangunan khususnya dari pendekatan imperialisme, bahwa pentingnya perhatian pada aspek pembentukan karakter atau sisi manusianya. Kuncoro (2004) menjelaskan bahwa terdapat contoh-contoh kasus di mana negara yang secara sumberdaya alam sangatlah miskin tetapi mampu melakukan pembangunan melebihi negara yang memiliki sumberdaya alam melimpah. Dalam kasus ini dapat dicontohkan antara negara Singapura dan negara Indonesia. Negara Singapura sebagai negara dengan penduduk yang lebih sedikit dari Indonesia[1] memiliki penduduk yang pendapatannya jauh lebih tinggi daripada penduduk Indonesia, sementara Singapura tidak memiliki kekayaan alam seperti yang ada di Indonesia.

6.3.2 Paradigma Pertumbuhan, Modernisasi, Ketergantungan, dan Sistem Dunia

Selanjutnya penjelasan yang disampaikan oleh Chalid (2006), bahwa terdapat beberapa paradigma yang digunakan dalam menjelaskan pembangunan, antara lain teori pertumbuhan, modernisasi, ketergantungan, dan sistem dunia.

1. Teori pertumbuhan, merupakan sebuah teori yang digunakan dalam menerangkan transformasi sosial yang berlangsung pada sebuah masyarakat. Teori ini umum

[1] Berdasarkan data dari Bank Dunia (WB 2017a), penduduk Indonesia pada tahun 2016 mencapai 261.115.456 jiwa, pada tahun yang sama penduduk Singapura mencapai 5.607.283 jiwa. Dari jumlah penduduk terlihat bahwa penduduk Indonesia 46 kali lebih banyak daripada penduduk Singapura. Namun walaupun memiliki berkali-kali lipat perbedaan besar dengan Indonesia, Singapura memiliki kelebihan berupa rata-rata pendapatan penduduk yang 14 kali lebih besar bila dibandingkan dengan Indonesia. Apabila melihat GDP perkapita antara Indonesia dan Singapura pada tahun 2016 (WB 2017b) dapat terlihat Indonesia mencapai 3.570,3 sedangkan Singapura yang mencapai 52.960,7.

digunakan dalam menganalisa keadaan di negara-negara dunia ketiga. Kepopulerannya membuatnya digunakan sebagai cara pandang dalam pembangunan. Teori pertumbuhan sendiri mulai diberlakukan di Indonesia ketika masa pemerintahan orde baru. Teori ini menerangkan bahwa pembangunan akan dapat dicapai manakalah terjadi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi terjadi ketika terdapat kenaikan dalam hal output perkapita[2]. Adapun untuk menganalisa output total dapat dilakukan dengan melihat kejadian yang melatarbelakangi angka output perkapita dan dinamika yang melahirkan angka jumlah penduduk. Selain terdapat kenaikan dalam hal output perkapita, pertumbuhan ekonomi haruslah dilihat dalam jangka waktu yang panjang misalnya seperti dalam kurun waktu beberapa dekade. Trend naik dan turun dapat terlihat di sana, kenaikan mengindikasikan terjadinya pembangunan sedangkan penurunan menandakan telah terjadinya hal yang sebaliknya. Sedangkan bagaimana cara output perkapita mengalami kenaikan yang positif ataupun penurunan yang negatif dalam jangka waktu tertentu, interaksi atas hal-hal yang membentuk output hingga terjadi pertumbuhan, itu semua dijelaskan melalui teori pertumbuhan ekonomi. Tokoh-tokoh dalam teori ini antara lain Adam Smith[3], David Ricardo[4], Thomas Robert Malthus[5], Karl Marx[6], Walt

---

[2] *Output* perkapita artinya output total yang dibagi dengan total jumlah penduduk. Adapun *output* merupakan GDP atau *Gross Domestic Product*.

[3] Smith mengemukakan 5 tahap pertumbuhan ekonomi (perburuan, beternak, bercocok tanam, perdagangan, dan perindustrian), *laissez faire*, dan *free trade*,

[4] Ricardo mengemukakan *Law of Diminishing Return*, yang merupakan menghubungkan beberapa aspek yakni tanah, manusia, dan kapital.

[5] Malthus mengemukakan hubungan antara pertambahan penduduk dengan pertumbuhan, dan kemiskinan dengan penguasaan lahan.

[6] Marx mengemukakan materialisme hisoris dan teori nilai lebih.

Whitman Rostow[7], John Maynard Keynes[8], dan Roy Harrod – Evsey Domar[9].

2. Teori modernisasi, merupakan teori yang juga banyak dipakai dalam pengambilan kebijakan pada negara-negara berkembang dan terbagi dalam dua bagian yakni teori modernisasi klasik dan teori modernisasi modern. Teori modernisasi klasik populer diterapkan pada tahun 1950-an yang disebarluaskan oleh negara-negara pemenang perang dunia II. Tolak ukur pembangunan mengikuti hal-hal yang terdapat dalam negara pemenang perang, yakni nilai-nilai efektivitas dan efisiensi ala Barat. Sedangkan sesuatu yang tradisional dianggap sebagai penghambat pembangunan. Teori evolusi Charles Darwin dianggap memiliki pengaruh besar dalam membentuk teori modernisasi klasik, hal ini tampak pada tesis teori ini, yakni modernisasi sebagai (1) proses bertahap, (2) proses homogenisasi, (3) mewakili atas paradigma yang selalui berbau Barat, (4) proses yang arahnya tidak mengarah kepada gerak mundur, (5) perubahan yang bersifat progres, (6) serta proses yang memerlukan waktu yang tidak sebentar. Sedangkan tesis yang dipengaruhi oleh teori fungsionalisme Talcott Parsons antara lain bahwa modernisasi merupakan (1) proses sistematik, (2) proses transformatif, (3) melibatkan proses yang terus menerus. Pembahasan lanjutan bahwa teori modernisasi klasik melakukan kajian pembangunan pada negara-negara berkembang memakai pola abstrak atau berpikir deduktif (umum – khusus), memakai sebuah formula dari negara-

---

[7] Rostow mengemukakan proses pembangunan ekonomi 5 tahap yakni perekonomian tradisional, prakondisi tinggal landas, tinggal landas, kedewasaan, dan konsumsi massa tinggi.

[8] Keynes mengemukakan permintaan agregat di dalam negeri yang efektif sebagai variabel yang strategis dalam mengatasi pengangguran faktor-faktor produksi.

[9] Harrod – Domar mengemukakan konsep tabungan dan investasi.

negara barat untuk diterapkan ke negara-negara berkembang tanpa memperdulikan hal yang khas lagi unik sebagaimana terdapat pada negara berkembang. Selain itu pula teori modernisasi klasik menggunakan unit analisis batas wilayah dalam kajian pembangunannya, sehingga hubungan yang terjadi dalam sebuah kawasan regional tidak masuk dalam cakupannya. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam teori modernisasi klasik ini antara lain Walt Whitman Rostow[10], David McCleland[11], dan Alex Inkeles[12]. Teori modernisasi berikutnya adalah teori modernisasi baru, yang mana gencar diperkenalkan pada dekade tahun 1960-an. Teori modernisasi baru merupakan versi perbaikan dari teori modernisasi klasik, yang mana teori modernisasi baru mengemukakan bahwa nilai-nilai tradisional menjadi faktor yang positif dalam pembangunan, kajian dilakukan menggunakan metode studi kasus sehingga mendapatkan hasil yang mendalam, negara berkembang dapat menentukan sendiri model pembangunannya, terdapat perhatian pada faktor eskternal seperti lingkungan internasional yang diikuti oleh sebuah negara, dan memberikan perhatian pada beberapa faktor penting (konflik kelas, dominasi ideologi, dan peranan

[10] Rostow menyampaikan pandangannya atas proses pembangunan dalam bidang ekonomi yang terdiri atas 5 tahap yakni perekonomian tradisional, prakondisi tinggal landas, tinggal landas, kedewasaan, dan konsumsi massa tinggi.

[11] McCleland mengemukakan wirausahawan lokal dan *need of achievement*

[12] Inkeles mengemukakan pendidikan serta jenis pekerjaan sebagai pembentuk karakter manusia modern.

agama). Tokoh-tokoh yang berperan dalam teori modernisasi baru ini antara lain Wong[13] dan Samel Huntington[14].

3. Teori ketergantungan[15], ialah sebuah teori yang hadir sebagai imbas atas upaya pencarian solusi atas kekurangan terhadap teori modernisasi, yang mana teori modernisasi dianggap mengharuskan negara-negara berkembang untuk mengisi spasi yang ada di antaranya dengan negara-negara maju. Sementara teori ketergantungan melakukan kajian dari sudut permasalahan spesifik pada negara-negara berkembang. Teori ketergantungan awalnya muncul di kawasan Amerika Latin yang kecewa terhadap kegagalan penerapan teori modernisasi melalui skema industrialisasi yang gagal diterapkan. Selain itu pula berkaca pada perubahan yang terjadi pada RRC pada tahun 1949 dan Kuba pada tahun 1950, menginspirasi kaum intelektual di sana untuk menciptakan kondisi yang disebut dengan tahap revolusi sosialis. Teori ketergantungan memperoleh pengaruh dari teori konflik Marx, yang bertumpu pada pandangan atas dua segregasi yakni kelas yang berkuasa dan kelas yang ditindas. Dalam hal ini terdapat kesadaran palsu yang berkembang di kalangan pekerja bahwa mereka tidak ditindas melalui pekerjaan yang mereka lakukan[16]. Pemikiran Marx kemudian dipelajari

---

[13] Wong mengemukakan etos usaha keluarga (konsentrasi tinggi pengambilan keputusan, otonomi lebih dihargai, dan usaha keluarga jarang berjangka panjang). Selain itu adanya perbedaan sejarah dan struktur masyarakat dapat membuat perbedaan pembangunan antara negara di Eropa dan negara-negara berkembang.

[14] Huntington mengemukakan prakondisi pembangunan demokrasi dan proses politik pembangunan demokrasi. Selain itu pula turut disampaikan tentang zona transisi, struktur sosial, borjuis otonom, lingkungan internasional, dan budaya. Tiga model demokrasi Huntington antara lain model linear, model siklus, dan model dialektis.

[15] Teori ketergantungan juga memiliki sebutan lain berupa teori dependensi.

[16] Kesadaran palsu merupakan produk dari sistem yang memanipulasi kesadaran masyarakat bahwa dirinya tidak ditindas.

dengan serius di Jerman melalui Frankfurt School dan menghasilkan teori kritis. Teori kritis mengingatkan bahwa sistem dengan manipulasi sedemikian rupa dapat menciptakan barang yang tadinya tidak dibutuhkan oleh manusia lalu berubah menjadi dibutuhkan oleh manusia. Manusia perlu disadarkan akan hal ini agar tidak terjebak dalam permainan sistem yang menjerumuskan ke dalam hal yang tidak seharusnya terjadi[17]. Upaya penyadaran hal demikian meluas dari Amerika Latin ke Amerika. Sedangkan pada Rusia, penyadaran ala Marx telah menginspirasi lahirnya negara buruh dengan Lenin sebagai pemimpinnya dan menggunakan pemikiran Marx dalam membentuk ideologi komunisme sebagai penyangga negara. Dalam pandangan teori ketergantungan, berbagai investasi negara maju pada negara berkembang merupakan bentuk eksploitasi, hal ini diilustrasikan dengan penanaman dan peraupan keuntungan yang berlipat ganda oleh negara maju atas investasinya di negara berkembang yang gencar dilakukan oleh negara maju pada tahun 1946 – 1967. Teori ketergantungan mempunyai beberapa pusat, antara lain (1) imperialisme merupakan bentuk tertinggi dari kapitalisme [Lenin], (2) adanya hubungan yang tidak seimbang antara negara pusat [maju] dengan negara pinggir [berkembang] dalam hal hubungan ekspor-impor komoditi[18] [Raul Prebisch]. Melalui pandangan ketergantungan maka ditentanglah anjuran dalam teori modernisasi bahwa negara

[17] Keadaan ini memunculkan gerakan new left yang menghendaki kesadaran masyarakat luas akan fenomena manipulasi sistem ekonomi.

[18] Lebih lanjut dijelaskan bahwa negara pinggir yang melakukan ekspor tidak dapat meningkatkan pendapatan walaupun melakukan peningkatan volume komoditas, hal ini disebabkan oleh jenis komoditasnya yang tidak dibutuhkan secara luas. Sedangkan negara pusat yang melakukan ekspor cenderung memiliki komoditas yang fleksibel dalam artian lebih dibutuhkan oleh banyak pihak sehingga memiliki kemungkinan besar mendapatkan peningkatan pendapatan.

berkembang hanya memproduksi bahan mentah, sementara negara maju memproduksi bahan yang mentah menjadi bahan yang jadi. Teori ketergantungan terbagi dalam dua bagian yakni teori ketergantungan klasik dan teori pasca ketergantungan. Pada teori ketergantungan klasik dibangun atas lima asumsi, yakni (1) ketergantungan merupakan sebuah gejala yang umum terjadi pada negara-negara berkembang di seluruh dunia, (2) ketergantungan dapat dipandang sebagai keadaan yang disebabkan oleh faktor luar, (3) ketergantungan dipandang sebagai permasalahan perekonomian, (4) ketergantungan kebutuhan sebagai sebuah bagian yang satu kesatuan atas proses pemusatan ekonomi regional dan juga secara global, dan (5) kondisi ketergantungan dipandang sebagai sebuah hal yang bertentangan dengan pembangunan. Tokoh-tokoh pemikir yang terlibat dalam teori ketergantungan klasik antara lain Andre Gunder Frank [19], Theotonio Dos Santos [20], Samir

[19] Frank mengemukakan konsep keterbelakangan, model eksploitasi satelit dan metropolis (di dalamnya terdapat modal asing, pemerintahan lokal di negara yang bertindak sebagai Negara satelit, kaum yang terkategori borjuasi), kolonialisme membuat pembalikan sejarah negara maju – negara berkembang, faktor dalam dan faktor luar faktor determinan yang sangat berbeda di antara negara maju dan juga negara yang berkembang, *loan push theory* (*recycling petro dollars, overheating of credit*).

[20] Santos mengemukakan hubungan tidak setara antara negara dominan dengan negara tergantung, negara satelit merupakan negara bayangan negara pusat, ketergantungan kolonial, ketergantungan finansial – industrial, ketergantungan teknologi – industrial (ekspor tradisional negara berkembang, defisit perdagangan negara berkembang, penyambutan berupa karpet merah bagi barang dari negara maju), ketergantungan negara berkembang akibat upaya monopoli modal dari pihak asing, pembiayaan atas pembangunan dengan bermodalkan modal asing, penguasaan teknologi yang orang-orangnya berasal dari negara yang maju menciptakan jurang ketertinggalan teknologi kepada negara berkembang.

Amin[21], Ranjit Sao[22], C.T Kurien[23], Raoul Prebish[24], dan Celso Furtado [25] . Selanjutnya pada teori pasca ketergantungan adalah merupakan versi perbaikan atas teori ketergantungan klasik. Teori pasca ketergantungan ditokohi oleh Robert A, Packenham yang bertindak sebagai kritikus, yang mengemukakan kekuatan teori ketergantungan klasik sekaligus menunjukan kelemahannya. Kritik Packenham lalu ditanggapi oleh Henrique Cardoso yang menjelaskan bahwa persoalan pada negara berkembang harus melalui proses pembentukan pemahaman akan sejarah terjadinya keterbelakangan, sehingga diskusi tentang ketergantungan di Amerika Latin sesungguhnya merupakan upaya memahami proses terjadinya keterbelakangan.

4. Teori sistem dunia [26] , merupakan kritik atas teori ketergantungan yang menempatkan semua bentuk hubungan antara negara maju kepada negara berkembang sebagai bentuk yang semata-mata penghisapan belaka, tetapi

---

[21] Amin mengemukakan peralihan ekonomi pra kapitalisme ke ekonomi kapitalisme dalam bentuk lain (terbelakang) pada negara berkembang. Selain itu pula kapitalisme pinggiran mengakibatkan hancurnya usaha-usaha rakyat di negara berkembang, memposisikan diri sebagai penyedia bahan mentah bagi negara maju, hipertropi (peningkatan tenaga kerja yang menyolok).

[22] Sao mengemukakan aliansi kelas tuan tanah yang feodal serta petani kalangan kaya dengan kelas borjuis, aliansi terhadap kelas borjuis dengan kelas kapitalis yang berasal dari kalangan asing, dan aliansi kelas tuan tanah feodal lokal serta petani dengan ekonomi yang sejahtera dengan kapitalis asing.

[23] Kurien mengemukakan sistem ekonomi kebutuhan dan sistem ekonomi kemauan.

[24] Prebish mengemukakan urbanisasi prematur, deformasi struktural, *premature tertiarization of the non agricultural labor force.*

[25] Furtano mengemukakan surplus ekonomi yang mengalir ke luar negeri baik oleh pengusaha asing (membawa pulang) maupun oleh pengusaha domestik (membelanjakannya).

[26] Memiliki sebutan lain berupa ajaran sistem ekonomi kapitalis dunia.

yang terjadi adalah selain memang terdapat dampak negatif tetapi tidak disangkali terdapat pula dampak positifnya. Melihat sejarahnya, teori sistem dunia lahir dari perang dingin antara teori modernisasi dengan teori ketergantungan di Amerika pada era tahun 1970-an. Lahir dari pemikiran Immanuel Wallerstein, teori ini merupakan bentuk yang bertolak belakang atas tradisi ilmiah yang dinilainya tidak bersesuaian dengan apa yang ia pikirkan pada masa itu. Wallerstein mengemukakan lima asumsi pokok, yakni (1) pembagian atas disiplin di dalam ilmu sosial, (2) sejarah dan juga ilmu-ilmu sosial, (3) entitas sosial ataupun sistem yang membuat sejarah, (4) batasan definisi terhadap kapitalisme, serta (5) tentang pergerakan untuk berorientasi maju.

6.4 Paradigma Pembangunan Skala Mikro

Selain Setiadi & Kolip (2011) dan Chalid (2006) yang mengemukakan teori pembangunan secara makro, juga terdapat pendekatan pembangunan secara mikro berbasis komunitas yang diterapkan pada masyarakat desa sebagaimana disampaikan oleh Sjafari (2011). Adapun pendekatan dimaksud sebagaimana berikut di bawah ini:

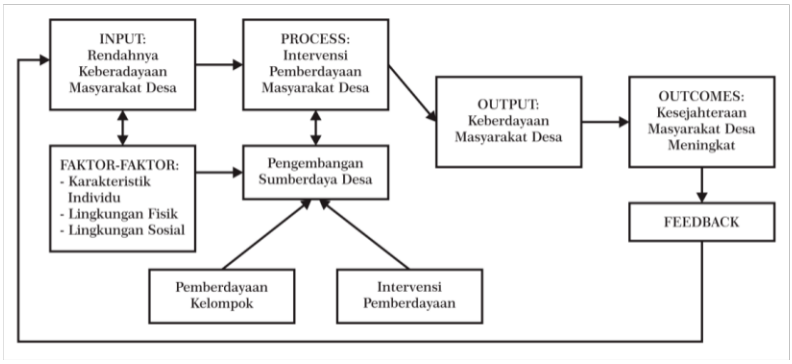

Gambar 6.1 Pembangunan desa berbasis komunitas

(Sumber: Sjafari, 2011)

Pada **Gambar 6.1** terlihat bagaimana skema pembangunan yang dilakukan dengan menggunakan

pendekatan berbasis kepada komunitas. Terdapat tahapan-tahapan yang dilalui untuk ahirnya menciptakan hasil akhir berupa meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa, berikut ulasan tahapannya :

1. Tahap *input,* tahap ini merupakan permulaan dengan keadaan berupa rendahnya keberdayaan masyarakat desa. Adapun rendahnya keberdayaan masyarakat desa dikarenakan faktor-faktor penunjang seperti karakteristik individu yang dapat berupa tingkat pendidikan atau keahlian, keadaan lingkungan fisik yang dapat berupa terbatasnya sumberdaya alam yang dapat diolah, serta keadaan lingkungan sosial yang dapat berupa minimnya potensi sosial yang dapat dimanfaatkan;
2. Tahap *process,* tahap ini merupakan tahap dilakukannya intervensi melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan hubungan timbal balik dengan kegiatan pengembangan sumberdaya desa. Sedangkan kegiatan pengembangan sumberdaya desa merupakan hasil dari adanya pemberdayaan kelompok yang ada di desa serta adanya intervensi sehingga dilakukannya upaya pemberdayaan;
3. Tahap *output*, tahap ini merupakan hasil yang didapatkan melalui keberdayaan masyarakat desa. Keberdayaan masyarakat desa merupakan hasil dari kegiatan intervensi pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan kemampuan atau dayanya sehingga mampu bertahan dan menghasilkan sesuatu;
4. Tahap *outcomes*, tahap ini merupakan kondisi ketika masyarakat desa mengalami peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat didahului oleh kondisi sebelumnya berupa keberdayaan masyarakat desa. Tahap ini merupakan harapan dari diadakannya pembangunan berbasis komunitas, yang dapat

membuat masyarakat berada pada taraf penghidupan yang baik berupa kondisi tersedia serta terpenuhinya berbagai kebutuhan masyarakat desa seperti kebutuhan primer, sekunder, tersier, efisiensi-efektivitas pemanfaatan sumberdaya alam demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sampai pada kondisi demikian maka menjadi umpan balik pertanggungjawaban atas kondisi awal yang diketahui pada tahap awal kegiatan pembangunan melalui tahap *input* tadi, yakni berupa rendahnya keberdayaan masyarakat desa.

Memperbandingkan antara paradigma pembangunan melalui teori pembangunan pertumbuhan, modernisasi, ketergantungan, sistem dunia dengan pendekatan pembangunan berbasis komunitas maka akan dilihat bagaimana pendekatan terakhir lebih mengarahkan agar pembangunan di pedesaan dapat membuat warganya berdaya. Berbeda dengan teori-teori besar lainnya, pendekatan pembangunan berbasis komunitas menggali potensi yang dimiliki warga desa untuk membuat usaha sendiri, bukannya mengarahkan warga menjadi pekerja pada perusahaan-perusahaan tetapi tetap berada di desa dan mempertahankan segala hal yang dimilikinya sendiri. Pendekatan seperti ini terbilang praktis karena langsung diterapkan serta memberi efek langsung seperti dapat mengurangi jumlah penduduk yang bermigrasi ke kota, yang mana sering diindikasikan sebagai tanda kurangnya lapangan pekerjaan di desa serta dan ketimpangan pembangunan yang ada di antara desa dan kota.

6.5 Milenium Development Goals (MDGs)

Milenium Development Goals atau disingkat MDGs merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat guna memenuhi hal-hal yang menjadi hak dasar masyarakat demi meningkatnya taraf penghidupan yang lebih baik (BAPPENAS, 2010). Komitmen menciptakan kehidupan idaman tersebut

didengungkan oleh 189 anggota PBB pada bulan September tahun 2000, di mana menyepakati 8 tujuan demi tercapainya hal tersebut, antara lain:

1. Mengentaskan kemiskinan serta menghilangkan kelaparan,
2. Mencapai standar pendidikan minimal pada tingkatan dasar untuk semua penduduk dunia,
3. Mendorong tercapainya kesetaraan atas gender serta aktifnya kegiatan pemberdayaan perempuan,
4. Menurunkan secara signifikan atas angka kematian anak,
5. Meningkatkan usaha dalam menciptakan kesehatan bagi ibu,
6. Memerangi penyakit AIDS yang disebabkan oleh virus HIV, penyakit malaria, serta penyakit-penyakit menular lainnya,
7. Menjamin keberlangsungan lingkungan hidup yang lestari,
8. Mengembangkan mitra pembangunan dalam aras global.

Dari 8 tujuan tersebut dirintis melalui 18 target serta 48 indikator guna terkontrolnya pencapaian dalam rentang waktu antara 1990 hingga 2015. Adapun 18 target yang menjadi uraian 8 tujuan MDGS (Republik Indonesia *et al*, 2009) antara lain melakukan penurunan paling tidak 50% dari proporsi penduduk dengan pendapatan yang kurang dari 1 dolar per hari, penciptaan lapangan kerja dan pekerjaan yang layak bagi semua kalangan termasuk itu perempuan dan para pemuda, menurunkan proporsi penduduk hingga 50% yang menderita kelaparan, melakukan penjaminan kepada semua anak guna mendapatkan pendidikan dasar, berupaya menghilangkan ketimpangan gender antara tingkatan dasar dan lanjutan, berupaya menurunkan angka kematian anak, berupaya menurunkan angka kematian ibu, berupaya mewujudkan kesempatan kepada kesehatan reproduksi. berupaya mengontrol penyebaran penyakit Aids. berupaya membuka akses pengobatan penyakit Aids, mengendalikan penyebaran penyakit

malaria, menurunkan jumlah penderita penyakit malaria, menyatukan prinsip pembangunan yang berkesinambungan dengan orientasi kepada kelestarian alam, meredam laju kerusakan keanekaragaman hayati, menurunkan separuh dari proporsi penduduk yang tidak mendapat akses air minum, berupaya meningkatkan taraf kehidupan penduduk miskin dari pemukiman yang kumuh, mendorong perekonomian masyarakat, mengelola hutang atas negara dunia ketiga melalui pinjaman lunak, dan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam urusan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

MDGs mencapai tujuannya pada tahun 2010 (World Health Organization, 2018), lebih cepat 5 tahun dari target pencapaiannya, olehnya pembangunan dengan paradigm MDGs dinyatakan berakhir dan dimodifikasi kembali sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat dan lingkungan.

6.6 Sustainable Development Goals (SDGs)

Beberapa saat sebelum MGDs dinyatakan berakhir, melalui pertemuan tahun 2012 yang digagas oleh PBB telah melahirkan agenda kegiatan pembangunan yang akan dikerjakan lepas tahun 2015 (BAPPENAS). Kebijakan tersebut dirumuskan melalui dokumen yang berjudul Masa Depan Yang Kita Impikan/Idam-Idamkan. Pada akhirnya melalui pertemuan Sidang Umum yang diselenggarakan oleh PBB pada tahun 2015 akhirnya dilahirkan sebuah kesepakatan dalam menatap pembangunan di dunia tahun 2030 melalui paradigma pembangunan yang dikenal sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). Pembidanan lahirnya SDGs ini sebagai upaya mendampingi keberhasilan pembangunan yang telah sukses didulang melalui MDGs ditambah memastikan peningkatan kesejahteraan tetap terkontrol dan terus lestari, memastikan keberlangsungan kehidupan masyarakat, mengkondisikan

terciptanya lingkungan hidup yang berkualitas, penciptaan inklusifitas pembangunan, serta terwujudnya penataan serta tata kelola yang mampu memberikan kepastian hidup yang berkualitas kepada generasi manusia masa pada masa berikutnya yang akan dihadapi.

Jika MDGs menetapkan 8 tujuan pencapaiannya (BAPPENAS) maka SDGs menetapkan 17 tujuan pencapaian, antara lain hidup dengan ketiadaan kondisi miskin, bebas dari rasa lapar, kehidupan tanpa diterpa oleh kesakitan juga diliputi oleh kesejahteraan, memperoleh pendidikan ilmu pengetahuan dengan kualitas yang baik, bebas dari bias gender, mendapat akses air bersih serta hidup di lingkungan dengan kondisi sanitasi yang bersih, ketersediaan energi yang bersih serta mampu dijangkau oleh berbagai pihak, memperoleh pekerjaan dengan kelayakan yang baik sementara itu berkontribusi terhadap penciptaan pertumbuhan ekonomi, hadirnya pusat industri, pusat inovasi, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung kemajuan dan pertumbuhan, semakin tipisnya disparitas antara yang kaya dan yang miskin, penataan kawasan pemukiman dan perkotaan dengan memakai prinsip kehidupan yang berkelanjutan, kegiatan penciptaan barang dan jasa disertai gaya hidup dan pola perilaku konsumtif yang bijak, kebijakan dalam menggulangi perubahan iklim, kebijakan terhadap ekosistem di kawasan laut, kebijakan terhadap ekosistem di kawasan darat, penciptaan perdamaian dan keadilan serta lembaga yang dapat menanggulangi berbagai permasalahan, dan penciptaan kemitraan demi mencapai tujuan yang direncanakan.

SDGs telah disepakati oleh negara-negara di dunia sebagai prioritas pembangunan yang memerlukan dukungan dari seluruh *stake holder* baik di tingkatan lokal hingga ke tingkat pusat. SDGs sendiri merupakan sebuah paradigma yang lebih lengkap, komprehensif karena mengikutsertakan lebih banyak negara yang miskin sumber daya alam dan negara yang kaya sumber daya alam, memiliki dukungan anggaran yang luas,

mengangkat harkat dan martabat manusia, secara inklusif melibatkan *non government organization*, media, pakar, serta pihak-pihak berkepentingan lainnya.

6.7 Kritik dan Arah Baru Paradigma Pembangunan

Berbagai paradigma pembangunan mulai dari modernisasi dan imperialism (Setiadi & Kolip, 2011), negara kaya dan miskin SDA (Kuncoro, 2004), teori pertumbuhan, teori modernisasi, teori ketergantungan, teori sistem dunia (Chalid, 2006), MDGs (2010; Republik Indonesia *et al*, 2009; World Health Organization, 2018), SDGs (BAPPENAS) kesemuanya terlihat lebih berfokus kepada negara-negara dengan segudang permasalahan kehidupan sosial, lingkungan, dan sumber daya alam. Paradigma tersebut dirancang untuk memastikan negara-negara pemilik sumber daya alam berlimpah untuk membuka ruang dan terus mengekploitasi kekayaan alam miliknya demi keberlangsungan industri dari negara-negara dengan teknologi yang lebih maju. Permasalahan yang tidak kunjung usai sejak ratusan tahun lalu seperti perang dan nuklir tidak disinggung dan tidak dianggap sebagai sebuah masalah kemanusiaan yang serius padahal efeknya membawa kematian jutaan jiwa dan korban harta yang tidak sedikit. Munculnya wabah virus Corona pada awal tahun 2020, perubahan iklim tahun 2023, dan perkiraan resesi ekonomi dunia pada 2024 akan menjadi salah satu sebab dirumuskannya kembali paradigma pembangunan dunia lebih cepat dari akhir tujuan SDGs pada tahun 2030, di mana dunia bergerak menuju perubahan lebih cepat dari perkiraan sehingga olehnya memerlukan review demi menetapkan tujuan pembangunan yang lebih akomodatif serta adaptif.

Bab 7

Community Development Dalam Paradigma Pembangunan Berkelanjutan

7.1 Pendahuluan

Community development merupakan suatu proses yang melibatkan anggota masyarakat yang berkumpul untuk mengambil tindakan kolektif dan menghasilkan solusi terhadap masalah-masalah bersama. Merupakan upaya terencana untuk membangun aset yang meningkatkan kapasitas warga guna meningkatkan kualitas hidup. Pengembangan masyarakat adalah pendekatan holistik yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan, hak asasi manusia, inklusi, keadilan sosial, penentuan nasib sendiri, dan tindakan kolektif. Ini adalah profesi berbasis praktik dan disiplin akademis yang mempromosikan demokrasi partisipasi, pembangunan berkelanjutan, hak, kesetaraan, peluang ekonomi, dan keadilan sosial, melalui organisasi, pendidikan, dan pemberdayaan orang-orang dalam komunitas mereka, baik lokalitas, identitas, atau minat, dalam lingkungan perkotaan dan pedesaan. Kegiatan pengembangan masyarakat membangun masyarakat yang lebih kuat dan tangguh, dan dapat memenuhi kebutuhan seperti infrastruktur, proyek pembangunan ekonomi, instalasi fasilitas umum, pusat komunitas, rehabilitasi perumahan, layanan publik, izin/akuisisi, bantuan usaha mikro, penegakan kode, bantuan pemilik rumah, dan lain-lain. Pembangunan masyarakat

melibatkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan, inklusivitas, keadilan sosial, hak asasi manusia, demokrasi partisipatif, dan kesetaraan, dan merupakan upaya terorganisir yang dimulai untuk membantu sekelompok orang dalam suatu komunitas untuk menjalani gaya hidup yang lebih baik (Beaulieu & Cordes, 2013).

Community development dalam paradigma pembangunan berkelanjutan adalah suatu pendekatan holistik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemberdayaan, inklusivitas, keadilan sosial, hak asasi manusia, demokrasi partisipatif, dan kesetaraan. Pendekatan ini mempertimbangkan masyarakat sebagai ahli dalam kehidupan dan komunitas mereka, dan menghargai pengetahuan dan kebijaksanaan masyarakat. Program pengembangan masyarakat dipimpin oleh anggota masyarakat pada setiap tahapannya, mulai dari memutuskan masalah hingga memilih dan melaksanakan tindakan serta evaluasi. Pendekatan ini juga memiliki fokus eksplisit pada redistribusi kekuasaan untuk mengatasi penyebab ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pendekatan pengembangan masyarakat dapat membantu membangun aset masyarakat yang meningkatkan kapasitas penduduk untuk meningkatkan kualitas hidup mereka melalui berbagai bentuk modal komunitas, seperti fisik, manusia, sosial, keuangan, lingkungan, politik, dan budaya (Urbanowitz & Wilcox, 2014).

7.2 Pembangunan Terpadu (*Integrated Development*)

Community development dapat membantu pembangunan terpadu (integrated development) dengan cara Mengintegrasikan berbagai sektor dan aspek kehidupan masyarakat dalam program pengembangan masyarakat (community development). Pengembangan masyarakat merupakan suatu program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup suatu masyarakat dengan memperhatikan

berbagai aspek kehidupannya. Pendekatan terpadu terhadap pengembangan masyarakat melibatkan kolaborasi berbagai sektor dan aspek masyarakat untuk mencapai tujuan Bersama. Contoh program pengembangan masyarakat terpadu adalah Program Teknis Pengembangan Masyarakat (CDTP) di Etiopia Selatan, yang bertujuan untuk mengatasi akar penyebab kemiskinan dengan mengembangkan kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat. Contoh lainnya adalah Proyek Pengembangan Masyarakat Terpadu oleh Bank Dunia, yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat miskin di Indonesia dengan menyediakan akses terhadap layanan dan infrastruktur dasar, serta mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pengembangan masyarakat, sehingga program tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat secara terpadu (Future, 2022).

Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya dan memecahkan masalah secara terpadu. Untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya dan menyelesaikan permasalahan secara terpadu, terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan. Salah satu pendekatannya adalah dengan memperkuat kapasitas pemerintah dalam perencanaan pembangunan desa. Pendekatan lainnya adalah dengan memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kapasitas sosial dan kesadaran akan peran mereka dalam pengentasan kemiskinan. Selain itu, kerja pengembangan masyarakat merupakan proses aktualisasi komitmen para aktivis sosial dalam menyelesaikan permasalahan kesenjangan atau ketidakberuntungan. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas fisik dasar seperti irigasi, jalan, listrik, serta fasilitas sosial seperti sekolah dan layanan kesehatan yang mudah diakses juga penting untuk mendukung kualitas pengelolaan pembangunan desa. Tujuan keseluruhannya adalah memanfaatkan sumber daya

lokal untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian, meningkatkan peran pemerintah desa sebagai fasilitator dan katalis pembangunan, serta memperkuat peran kelembagaan masyarakat desa dalam memfasilitasi proses pembangunan. Untuk mencapai hal tersebut, penting untuk memberdayakan kelompok masyarakat dan bekerja sama untuk mencapai tujuan Bersama (Suprijadi, 2018).

Membangun kemitraan antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta untuk menciptakan sinergi dalam mencapai tujuan pembangunan terpadu. Model kemitraan ini akan memberikan keuntungan jangka panjang bagi sektor swasta dengan inklusifitas berimbang antara rantai produsen dan konsumen, sementara sektor publik akan mendapatkan keuntungan dengan tambahan sumber daya dan nilai investasi serta keterjaminan partisipasi dan kepemilikan para pihak. Masyarakat juga akan memperoleh manfaat dengan perolehan keterampilan, pengetahuan, dan teknologi baru. Kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat juga merupakan upaya kolaboratif yang terus menerus guna mencapai tujuan pembangunan terpadu. Pemerintah sebagai pendamping semestinya juga tetap menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik dengan swasta guna berjalannya forum CSR. Kendala kemitraan sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam upaya keberlanjutan program adalah badan pengelola yang belum efektif, kendala dana pendonor, dan tidak banyak lembaga yang memberi respon. Oleh karena itu, hubungan keterlibatan antar stakeholder pemerintah dan swasta perlu ditingkatkan dengan komunikasi dan koordinasi yang baik. Kolaborasi pemerintah daerah dan swasta dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional serta meningkatkan hasil-hasil pembangunan. Kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat juga dapat diaplikasikan di sektor pertanian untuk mencapai tujuan bersama khususnya dalam sinergi kemitraan di sektor pertanian. Penelitian juga

menunjukkan bahwa kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pelaksanaan program CSR dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Selain itu, yayasan swasta juga dapat berperan dalam pemberdayaan petani desa menuju pembangunan pertanian pedesaan terpadu (Utama & Murfhi, 2017).

Memperkuat aset komunitas, seperti modal sosial, modal manusia, modal fisik, dan modal keuangan, yang dapat menjadi dasar bagi pembangunan terpadu. Modal sosial, mencakup jaringan, hubungan, dan kepercayaan dalam komunitas yang dapat dimanfaatkan untuk tindakan kolektif dan pemecahan masalah. Modal manusia, mengacu pada pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan individu dalam suatu komunitas yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk pengembangan masyarakat. Modal fisik, Ini mencakup infrastruktur, bangunan, dan sumber daya alam dalam suatu komunitas yang dapat digunakan untuk pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup. Modal finansial, Hal ini mengacu pada sumber daya keuangan yang tersedia dalam suatu komunitas, termasuk tabungan, investasi, dan akses terhadap kredit, yang dapat digunakan untuk inisiatif pengembangan komunitas. Menekankan pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, seperti keberlanjutan lingkungan, keberlanjutan sosial, dan keberlanjutan ekonomi, yang merupakan prasyarat bagi pembangunan terpadu (Pratama, 2021).

7.3 Keterlibatan Masyarakat (*Community Involvement*)

Community development dapat membantu keterlibatan masyarakat (community involvement) dengan cara meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat sehingga masyarakat merasa terlibat dalam pembangunan yang dilakukan. Mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah terutama pada tingkat desa dan masyarakat untuk meningkatkan kondisi sosial-ekonomi-budaya yang lebih

baik di sekitar wilayah perusahaan. Memberikan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat. Membantu pemerintah daerah dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengembangan ekonomi wilayah. Mendorong inisiatif masyarakat sendiri untuk melakukan kegiatan sosial sehingga masyarakat merasa memiliki peran dalam pembangunan. Mengembangkan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada pihak yang terkait sehingga masyarakat merasa terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan. Program community development ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat sehingga masyarakat merasa terlibat dalam pembangunan yang dilakukan (Olahkarsa, 2023).

Mendorong inisiatif masyarakat sendiri untuk melakukan kegiatan sosial sehingga masyarakat merasa memiliki peran dalam pembangunan. Memberikan kesempatan kerja dan usaha kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa terlibat dalam pengembangan ekonomi wilayah. Membantu pemerintah daerah untuk mengentaskan kemiskinan sekaligus mengembangkan ekonomi wilayah sehingga masyarakat merasa terlibat dalam pembangunan yang dilakukan. Mengembangkan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada pihak yang terkait sehingga masyarakat merasa terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan. Menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang rencana dan program pembangunan yang akan dilakukan. Berkonsultasi dengan masyarakat sebagai bagian dari proses untuk mengembangkan program pembangunan. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait dengan program pembangunan. Mengadakan pertemuan dan diskusi dengan masyarakat untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan pembangunan. Membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya. Sasaran dari program community development ini adalah

masyarakat yang disekitar wilayah lembaga atau organisasi, khususnya yang terkait dan berdampak langsung dari kegiatan lembaga atau organisasi (Salsabila, 2023).

7.4 Pemberdayaan Masyarakat (*Community Empowerment*)

Community development merupakan kegiatan pembangunan untuk masyarakat dalam mencapai kondisi sosial, ekonomi, budaya yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Sedangkan pemberdayaan masyarakat (community empowerment) adalah merupakan sebuah upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengambil tindakan dan mengontrol kehidupan mereka sendiri. Berikut beberapa cara bagaimana community development dapat membantu pemberdayaan masyarakat yaitu, Meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, dan penyebaran informasi adalah salah satu cara dalam community development untuk membantu pemberdayaan masyarakat. Pelatihan dan pendidikan dapat membantu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengambil tindakan dan mengontrol kehidupan mereka sendiri. Community development dapat menyediakan pelatihan dan pendidikan dalam berbagai bidang, seperti sistem informasi bisnis, manajemen, desain interior, dan pembuatan media pembelajaran. Penyebaran informasi juga dapat membantu masyarakat dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan memperoleh akses ke sumber daya yang diperlukan. Pelatihan community development dan conflict handling dapat membantu peserta untuk mengelola konflik dan memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk membangun masyarakat yang lebih baik (Eramuri, 2016).

Memperbaiki infrastruktur, seperti jalan, jembatan, air bersih, dan lain-lain. Meningkatkan akses pasar dan pelayanan kesehatan. Identifikasi dan melibatkan semua sektor di berbagai tingkat untuk mendukung program. Menjalin kerjasama dengan

pihak lain untuk mendukung satu sama lain. membuat penentu kebijaksanaan bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan menyampaikan pesan yang didasarkan pada bukti ilmiah, hukum, dan moral. Kebijakan yang dibuat harus didasarkan pada persepsi pembuat kebijaksanaan tentang apa itu "kepentingan publik", atau kebijakan yang secara moral dapat diterima. Pernyataan yang didasarkan pada bukti ilmiah, hukum, dan moral dapat membantu mempengaruhi perilaku orang yang menetapkan kebijaksanaan agar berpihak pada kepentingan umum. Community development dapat membantu masyarakat untuk memahami dan memperjuangkan kepentingan publik melalui pelatihan dan pendidikan dalam bidang kebijakan publik. Pelatihan pengembangan masyarakat dapat membantu peserta memahami dasar pengembangan masyarakat dan belajar bagaimana bertindak sebagai penentu kebijaksanaan demi kepentingan publik (Meutia, 2013).

7.5 Keadilan Sosial (*Social Justice*)

Community development dapat membantu keadilan sosial dengan cara Pemberdayaan masyarakat, community development dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan mereka sehingga mereka dapat mengambil peran aktif dalam memperjuangkan keadilan sosial. Hal ini dapat dilakukan melalui advokasi, penguatan basis, dan networking. Selain itu, community development juga dapat membantu menciptakan perubahan sosial yang diperlukan untuk mencapai keadilan sosial dengan mengidentifikasi ketidaksetaraan, diskriminasi, dan ketidakadilan yang ada dalam masyarakat dan berusaha untuk menghilangkannya.

Menciptakan perubahan sosial, community development juga dapat membantu menciptakan perubahan sosial yang diperlukan untuk mencapai keadilan sosial. Hal ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi ketidaksetaraan,

diskriminasi, dan ketidakadilan yang ada dalam masyarakat dan berusaha untuk menghilangkannya. Meningkatkan kapasitas masyarakat, community development dapat membantu meningkatkan kapasitas masyarakat, terutama masyarakat miskin dan marjinal, dalam memperjuangkan keadilan sosial. Hal ini dapat dilakukan melalui program-program pendidikan hukum yang bertujuan untuk membantu masyarakat memahami hak-hak konstitusional mereka dan cara memperjuangkan social justice. Membangun masyarakat yang kuat, community development juga dapat membantu membangun masyarakat yang kuat dan berdaya, yang dapat memperjuangkan keadilan sosial dengan lebih efektif. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat basis masyarakat, membangun jaringan kerja sama, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (Wordpress, 2023).

7.6 Hak Asasi Manusia (*Human Rights*)

Community development dapat membantu Hak Asasi Manusia (HAM) dengan cara Community Development bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, maka hak-hak mereka akan lebih terjamin dan dipenuhi. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pembangunan di wilayah mereka dapat membantu dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperjuangkan hak-hak mereka. Melalui partisipasi masyarakat, mereka dapat memberikan masukan dan saran yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat juga dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan di wilayah mereka.

Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan pendidikan tentang hak asasi manusia. Dengan memberikan informasi dan pendidikan tentang hak asasi manusia, masyarakat akan lebih memahami hak-hak mereka dan dapat memperjuangkannya. Meningkatkan akses masyarakat ke informasi tentang hak asasi manusia dan membuatnya mudah diakses. Pendidikan tentang hak asasi manusia harus dimulai sejak dini di sekolah dan terus ditingkatkan di masyarakat. Mengadakan pelatihan dan seminar tentang hak asasi manusia. Pelatihan dan seminar tentang hak asasi manusia dapat membantu orang lebih memahami hak-hak mereka dan cara memperjuangkannya. Mendorong media untuk memberikan liputan yang lebih luas tentang hak asasi manusia. Media dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia dengan meliput isu-isu hak asasi manusia dan membuat kampanye hak asasi manusia. Kampanye hak asasi manusia dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia dan cara memperjuangkannya (Kemhan, 2016).

Mendorong pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk memperhatikan dan memenuhi hak asasi manusia dalam kebijakan dan program pembangunan. Dengan memperhatikan hak asasi manusia dalam kebijakan dan program pembangunan, maka hak-hak masyarakat akan lebih terjamin dan dipenuhi. Memperhatikan regulasi dan kebijakan yang berhubungan dengan hak asasi manusia. Dalam setiap program pembangunan, pemerintah dan lembaga terkait harus memperhatikan regulasi dan kebijakan hak asasi manusia. Ini akan meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka tentang hak asasi manusia. Agar program pembangunan dapat memenuhi hak-hak masyarakat, pemerintah dan lembaga-lembaga terkait harus meningkatkan kesadaran tentang hak asasi manusia. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan, maka kebijakan dan

program pembangunan akan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memperhatikan hak asasi manusia. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap program pembangunan. Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap program pembangunan agar dapat memperhatikan dan memenuhi hak-hak masyarakat.

Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial lainnya. Dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan-layanan tersebut, maka hak-hak masyarakat akan lebih terjamin dan dipenuhi. Meningkatkan ketersediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial di wilayah yang sulit dijangkau. Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait harus memperhatikan wilayah yang sulit dijangkau dan meningkatkan ketersediaan layanan-layanan tersebut di wilayah tersebut. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial. Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait harus meningkatkan kualitas layanan-layanan tersebut agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait harus memperhatikan masyarakat miskin dan rentan dan meningkatkan aksesibilitas layanan-layanan tersebut bagi masyarakat tersebut. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial. Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait harus meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya layanan-layanan tersebut agar masyarakat dapat memperjuangkan hak-hak mereka.

Mendorong masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan melawan pelanggaran hak asasi manusia. Dengan memperjuangkan hak-hak mereka dan melawan pelanggaran hak asasi manusia, maka masyarakat akan lebih sadar akan hak-

hak mereka dan dapat memperjuangkannya. Memberikan pendidikan dan informasi tentang hak asasi manusia. Dengan memberikan pendidikan dan informasi tentang hak asasi manusia, masyarakat akan lebih memahami hak-hak mereka dan dapat memperjuangkannya. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam aksi-aksi yang memperjuangkan hak asasi manusia. Dengan berpartisipasi dalam aksi-aksi tersebut, masyarakat dapat memperjuangkan hak-hak mereka dan melawan pelanggaran hak asasi manusia. Mendorong masyarakat untuk melaporkan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di wilayah mereka. Dengan melaporkan pelanggaran hak asasi manusia, masyarakat dapat membantu dalam menindak pelanggaran hak asasi manusia dan memperjuangkan hak-hak mereka. Mendorong masyarakat untuk membentuk kelompok-kelompok advokasi hak asasi manusia. Dengan membentuk kelompok-kelompok advokasi hak asasi manusia, masyarakat dapat memperjuangkan hak-hak mereka secara bersama-sama dan melawan pelanggaran hak asasi manusia (Limbong *et al.*, 2020).

7.7 Membangun Masyarakat (*Community Building*)

Community development dapat membantu membangun masyarakat dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, melalui community development, masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses pembangunan. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan memperkuat hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat, community development dapat membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat melalui pelatihan dan pendidikan. Hal ini dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan potensi mereka dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya, community development dapat membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap

sumber daya seperti air bersih, listrik, dan infrastruktur lainnya. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat ekonomi lokal. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu sosial dan lingkungan, community development dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu sosial dan lingkungan seperti kesehatan, pendidikan, dan lingkungan hidup. Hal ini dapat membantu masyarakat dalam mengambil tindakan yang lebih baik untuk memperbaiki kondisi sosial dan lingkungan mereka. Melalui kegiatan community development, masyarakat dapat memperoleh informasi tentang isu-isu sosial dan lingkungan yang penting. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu tersebut dan memperkuat kemampuan mereka untuk mengambil tindakan yang lebih baik. Community development dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang isu-isu sosial dan lingkungan. Hal ini dapat membantu memperkuat hubungan antara masyarakat dan pemerintah serta memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengambil tindakan yang lebih baik. Melalui kegiatan pelatihan dan pendidikan dalam community development, masyarakat dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka tentang isu-isu sosial dan lingkungan. Hal ini dapat membantu masyarakat dalam mengambil tindakan yang lebih baik untuk memperbaiki kondisi sosial dan lingkungan mereka. Community development dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan dan dampak dari tindakan mereka terhadap lingkungan. Hal ini dapat membantu masyarakat dalam mengambil tindakan yang lebih baik untuk menjaga lingkungan dan memperbaiki kondisi lingkungan mereka. Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup mereka (Eramuri, 2016).

Bab 8

Strategi Pembangunan Berpusat Pada Rakyat

Di era pasca industri, kita berhadapan dengan situasi yang sangat berbeda dibandingkan dengan zaman industri, dengan perbedaan yang sangat mencolok. Era ini membawa potensi-potensi baru yang sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan dan kesejateraan manusia, serta menjaga keadilan dan keberlanjutan dari proses pembangunan itu sendiri (Korten, 1984). Paradigma yang mendominasi dalam era ini adalah ekologi manusia yang seimbang dengan sumber daya utama yang melibatkan informasi dan kreativitas tak terbatas, yang bertujuan utama untuk mengembangkan pertumbuhan manusia melalui pengaktualisasian potensi-potensi manusia yang lebih tinggi. Pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat *(People Centered Development)* menghargai dan mempertimbangkan prakarsa serta keunikan setiap masyarakat lokal. Pendekatan ini mengakui peran aktif masyarakat dalam merumuskan dan mengarahkan proses pembangunan, serta menghormati kekhasan setempat dari berbagai daerah.

8.1 Konsep Pembangunan

Pertanyaan tentang pembangunan telah menjadi topik yang sangat menarik untuk diperdebatkan. Mungkin tidak ada satu bidang ilmu yang sepenuhnya dapat merangkum arti dari kata "pembangunan." Sejauh ini, pemikiran tentang

pembangunan telah mengalami perkembangan yang signifikan, dimulai dari pandangan sosiologi klasik seperti yang diungkapkan oleh Durkheim, Weber, dan Marx, lalu pandangan Marxis, konsep modernisasi yang dikemukakan oleh Rostow, serta pendekatan strukturalisme yang bersama dengan konsep modernisasi telah melengkapi wawasan tentang perkembangan sosial, dan yang terakhir adalah konsep pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, pembangunan bisa diartikan sebagai upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih luas secara resmi bagi setiap warga negara guna memenuhi dan mewujudkan aspirasi manusiawi yang paling mendasar (Dahuri & Nugroho, 2012). Secara umum, kita dapat mengartikan pembangunan sebagai suatu proses perencanaan sosial yang dijalankan oleh birokrat pembangunan untuk menciptakan perubahan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan dapat dijelaskan sebagai upaya pertumbuhan dan perubahan yang diatur secara sadar dan terencana oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah dengan tujuan membangun dan mengembangkan bangsa. Pelaksanaan pembangunan harus dipertimbangkan dan direncanakan secara matang, di mana pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus memperhatikan pembangunan di wilayah pedesaan sejajar dengan perkembangan di perkotaan, demi pencapaian tujuan pembangunan nasional (Siagian, 2005). Meningkatkan standar hidup masyarakat merupakan salah satu tujuan utama dari upaya pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah. Tersedia berbagai cara dan inisiatif dari berbagai sektor yang terus dikembangkan dalam rangka mencapai sasaran tersebut. Namun, sering kali upaya dan niat positif ini tidak mencapai semua lapisan masyarakat, terutama yang tinggal di pedesaan. Selain itu, kerusakan lingkungan sering terjadi akibat eksploitasi berlebihan dalam upaya mencapai target pembangunan dan juga pelanggaran terhadap norma-norma

kehidupan masyarakat di pedesaan. Oleh karena itu, dukungan, perhatian, dan partisipasi dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, diperlukan agar hasil pembangunan yang diharapkan dapat membawa dampak positif yang lebih luas.

Proses pembangunan adalah suatu upaya yang terkoordinasi dan berkesinambungan dalam mengubah keadaan masyarakat menuju taraf kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Oleh karena itu, diperlukan beberapa metode untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu negara. Indikator pembangunan tidak hanya mencakup pendapatan perkapita, tetapi juga harus mencakup perbaikan dalam distibusi pendapatan, pengurangan kemiskinan dan pengurangan tingkat pengangguran.

Salah satu cara pendekatan yang bisa diadopsi adalah strategi pengembangan berfokus pada partisipasi masyarakat, dimana warga secara aktif terlibat dalam merencanakan, menjalankan dan mengawasi program-program pembangunan yang berhubungan dengan kebutuhan hidup mereka sendiri. Terdapat tiga nilai tambah yang dihasilkan dari pendekatan pengembangan yang berpusat pada rakyat: *pertama,* peningkatan kesejahteraan ekonomi; *kedua,* peningkatan harkat dan martabat sosial, harga diri dan rasa percaya diri; dan *ketiga,* pelestarian dan penghargaan terhadap nilai-nilai budaya lokal.

8.2 Pembangunan Berpusat pada Rakyat : Melalui Pendekatan Model Pembangunan Alternatif

Munculnya model pembangunan alternatif bermula dari dorongan untuk mengembangkan dan mendorong struktur masyarakat yang lebih berdaya, dengan tujuan untuk melawan penindasan melalui pengaturan yang adil. Pendekatan ini menekankan pada pembangunan dalam skala lokal yang terintegrasi dengan budaya setempat, tanpa memaksakan model pembangunan dari luar, tetapi melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat. Salah satu fokus utamanya adalah

penerapan kebijakan yang mendukung masyarakat lokal yang sebelumnya terpinggirkan. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat hidup secara harmonis dengan lingkungan yang telah menjadi bagian integral dari budaya mereka, serta menjaga keselarasan dengan prinsip-prinsip ekologi yang menjadi landasan pembangunan alternatif tersebut (Zubaedi, 2013).

Dalam konteks pembangunan alternatif, masyarakat tidak hanya dianggap sebagai objek penderitaan, melainkan sebagai pelaku utama pembangunan yang tetap menghormati dan mempertahankan nilai-nilai tradisional yang telah berkembang sejak lama. Secara sederhana, pendekatan ini bertujuan untuk mengangkat nilai-nilai yang bermakna dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan, tanpa merugikan kelompok asli atau lokal. Karakteristik khas dari pendekatan pembangunan alternatif ini adalah partisipatif dan berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar serta penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia.

Arti dari pembangunan berbasis partisipasi menurut Galtung, (1980) adalah melibatkan seluruh komunitas dalam rangka perencanaan dan pengambilan keputusan yang memengaruhi jalannya kehidupan mereka sendiri adalah esensi utama. Di sisi lain, pendekatan pembangunan yang mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok dan hak-hak asasi manusia bertujuan untuk menjamin bahwa kebutuhan mendasar masyarakat terpenuhi, seperti kesejahteraan ekonomi, kebebasan dan identitas.

Selanjutnya, bergerak menuju pembebasan dari empat halangan kekerasan, yaitu kemiskinan, kerusakan lingkungan, tekanan atau penindasan, dan perasaan terasing (alienasi)

Menurut Friedmann, (1992) bahwa pembangunan alternatif menempatkan masyarakat dan lingkungannya di posisi utama, selain fokus pada produksi dan keuntungan, dengan tujuan mendorong kemajuan serta menghormati hak asasi

manusia. Pendekatan ini juga menekankan pemberdayaan dalam tiga dimensi yaitu sosial, politik dan psikologi. Negara sebagai birokrasi yang transparan, responsive dan tanggung jawab dapat mengelola problem lebih baik yang bersifat lokal Eko, 2014). Model pembangunan alternatif yang berpusat pada rakyat menekankan pada kemandirian masyarakat lokal agar mampu menghadapi segala tekanan struktural ketimpangan sosial ekonomi serta dapat merumuskan kebutuhannya sendiri melalui kegiatan pembangunan.

8.3 Strategi Pembangunan Berpusat pada Rakyat

Pembangunan yang ideal harus mengutamakan kepentingan rakyat dan memberikan peluang partisipasi yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat. Di samping itu, dampak positif harus dirasakan oleh masyarakat dan lingkungan sekitarnya dari proses pembangunan tersebut. Namun, hal ini tidak akan terjadi jika hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan harus di imbangi dengan pemerataan yang adil, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta memberikan pilihan dan peluang yang merata kepada semua warga.

Menurut Hardojo & Bahagijo (2008) elemen-elemen kunci pembangunan berbasis hak rakyat mencakup variabel-variabel berikut:

Pertama; partisipasi, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan secara aktif sangat diharapkan agar proses pembangunan dapat berjalan dengan baik. Selain itu masyarakat yang memiliki keterampilan yang berbeda-beda dapat meningkatkan kerjasama yang baik demi berlangsungnya pembangunan yang diinginkan. Ini akan menciptakan serangkaian aktivitas partisipatif yang lebih luas dan akan menjadikan kesetaraan bagi semua anggota masyarakat yang terlibat secara aktif.

Kedua; meningkatkan pertanggungjawaban. Pendekatan berbasis hak asasi manusia bertujuan untuk membangun pertanggungjawaban dan keseimbangan dalam proses pembangunan antara masyarakat sebagai pemilik hak dengan negara sebagai pelaku tanggung jawab yang berkewajiban untuk melindungi hak-hak warga negaranya. Dalam pendekatan ini, identifikasi dilakukan terhadap pemilik hak (pemegang hak) bersama dengan hak-hak yang dimiliki oleh mereka, serta pihak-pihak yang memiliki kewajiban (penanggung tugas) beserta kewajiban mereka. Kewajiban penanggung tugas dibagi menjadi dua, yaitu kewajiban positif untuk melindungi, mempromosikan, dan memenuhi hak, serta kewajiban negatif untuk tidak melakukan pelanggaran hak.

Pendekatan berbasis hak asasi dalam pembangunan juga menegaskan pentingnya pertanggungjawaban pembuat kebijakan dan pihak lain yang tindakan-tindakannya memengaruhi hak asasi. Hak dan kewajiban saling terkait, dan untuk memastikan pemenuhan hak, pertanggungjawaban diperlukan. Oleh karena itu, penting untuk memperbaiki atau mengatur institusi yang memastikan ada pertanggungjawaban, dan ini harus dimasukkan ke dalam strategi pembangunan yang berpusat pada masyarakat.

Ketiga; tanpa adanya diskriminasi, memberikan perhatian khusus pada pencegahan diskriminasi, menghasilkan kesetaraan, kesamaan, dan melibatkan kelompok-kelompok terpinggirkan seperti minoritas, kelompok adat, serta individu yang ditahan atau sedang dalam proses hukum. Pendekatan berbasis hak menuntut agar pertanyaan tentang kelompok yang terpinggirkan diadaptasi sesuai dengan situasi lokal.

Keempat; beralih dari ketergantungan menuju pemberdayaan. Pendekatan ini berfokus pada kelompok penerima manfaat sebagai pemilik hak dan pelaku pembangunan, bukan sekadar sebagai sasaran dari program dan

tindakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pemberdayaan memberikan kekuasaan, kapabilitas, dan akses kepada masyarakat yang diperlukan agar mereka mampu mengubah hidup, memperbaiki kondisi, dan memengaruhi masa depan mereka. Pendekatan ini juga menekankan penguatan individu dan komunitas, termasuk anak-anak, agar mereka memiliki peran yang lebih aktif dalam masyarakat.

Kelima, pendekatan berbasis hak mempertimbangkan semua hak secara komprehensif, seperti hak-hak sipil, budaya, ekonomi, politik, dan sosial, yang saling terkait dan berinteraksi. Untuk mengendalikan pembangunan berlandaskan hak di tingkat daerah, dapat dirumuskan suatu model pendekatan dalam matriks yang membantu masyarakat mengidentifikasi hak-hak mereka dalam setiap kebijakan dan program pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

Konsep pembangunan yang berorientasi pada masyarakat *(People Centered Development)* bermula dengan pemahaman mengenai Ekologi manusia, yang menjadi pusat perhatian dalam proses pembangunan. Ekologi manusia merujuk pada satu aspek dalam ilmu ekologi yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dalam lingkungan ekosistem. Menurut Soerjani, (1992), ilmu ekologi mempelajari ekosistem, sedangkan Ilmu Lingkungan mempelajari lingkungan hidup dengan dasar utama pada ekologi, sambil juga mempertimbangkan kontribusi disiplin ilmu lain, terutama ekonomi dan sosiologi. Dasar bagi perkembangan paradigma pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai fokus utamanya adalah ekologi manusia.

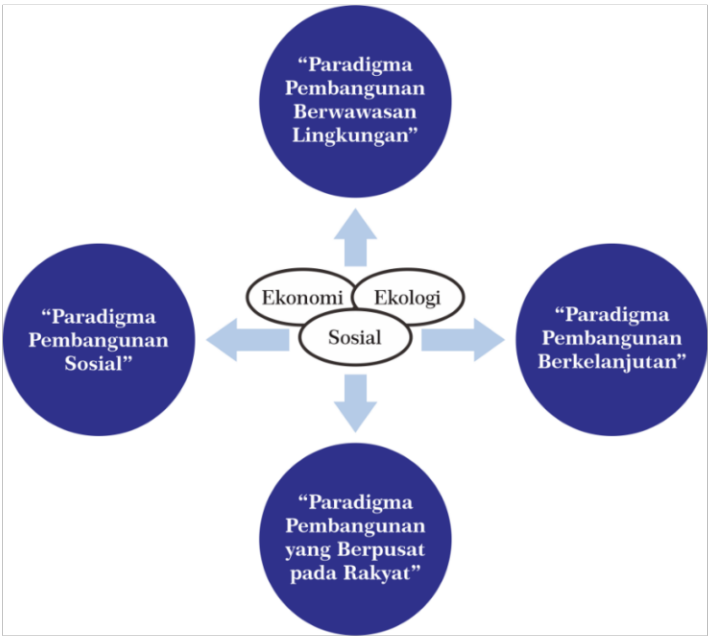

Gambar 8.1 Hubungan antar paradigma pembangunan berbasis rakyat

(Sumber: Soerjani, 1992)

Dalam konteks ini, ilmu lingkungan juga memainkan peran penting dengan menerapkan prinsip-prinsip dan konsep-konsep ekologi ke dalam kehidupan manusia. Pendekatan ini dikenal sebagai Ekologi Terapan atau Pembangunan yang Memperhatikan Lingkungan.

Hubungan antar paradigma pembangunan berbasis rakyat adalah sebagai berikut:

Pertama, Prinsip dasar dari paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah menonjolkan keterlibatan aktif seluruh warga dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang memiliki dampak terhadap kehidupan mereka. Sementara itu, paradigma pembangunan lainnya cenderung lebih sentralistik dan kurang memperhatikan partisipasi masyarakat.

Kedua, paradigma pembangunan berbasis rakyat fokus pada pemenuhan kebutuhan pokok dan hak asasi manusia, seperti kesejahteraan ekonomi, kebebasan, dan identitas. Sedangkan paradigma lain mungkin lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata tanpa mempertimbangkan keadilan dan distribusi.

Ketiga, Pendekatan yang berorientasi pada hak dalam konteks pembangunan menitikberatkan pada tanggungjawab para pengambil keputusan dan elemen-elemen lain yang memengaruhi hak-hak asasi manusia, dengan menekankan pada prinsip akuntabilitas. Hal ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak-hak tersebut dan menghindari diskriminasi serta pelanggaran hak.

Keempat, pendekatan berbasis rakyat berupaya menghindari diskriminasi dan melibatkan kelompok-kelompok marjinal seperti minoritas, kelompok masyarakat tradisional dan individu yang tengah menghadapi proses peradilan dalam negara. Paradigma lain mungkin kurang memperhatikan perlindungan dan kesetaraan bagi kelompok-kelompok tersebut.

Kelima, dalam pembangunan berbasis rakyat, Adanya pemahaman untuk beralih dari ketergantungan menuju pemberdayaan. Individu yang menerima pelayanan dianggap sebagai pemegang hak dan agen perubahan dalam proses pembangunan, bukan sekadar sebagai penerima manfaat dari program-program pembangunan. Pemberdayaan individu dan komunitas menjadi fokus untuk mencapai perubahan yang positif dalam masyarakat.

Kesimpulannya, paradigma pembangunan berbasis rakyat menitikberatkan pada partisipasi, pemenuhan hak, non-diskriminasi, pemberdayaan, dan kesadaran atas hak-hak secara menyeluruh. Pendekatan ini berbeda dari paradigma pembangunan lain yang mungkin lebih sentralistik, kurang

memperhatikan hak asasi manusia, dan kurang memperhatikan kepentingan kelompok-kelompok marjinal.

Menurut Soerjani (1992) ekologi merupakan ilmu yang mempelajari interaksi saling ketergantungan antara makhluk hidup (biotik) baik antar makhluk hidup maupun dengan komponen non-hidup (abiotik) di sekitarnya. Definisi ekologi juga mencakup analisis tentang bagaimana makhluk hidup berinteraksi dan memainkan peran mereka dalam lingkungan tempat mereka hidup. Dalam ranah makhluk hidup, termasuk manusia, peran dan perilaku khususnya dipelajari dalam bidang ekologi manusia. Bidang ini berfokus pada manusia sebagai individu dan juga sebagai bagian dari populasi yang ada dalam suatu ekosistem.

Dalam konteks ini, penting untuk mencatat bahwa ekologi dan ekonomi memiliki akar kata yang sama, yakni "oikos," yang merujuk pada konsep rumah tangga. Ekologi berbicara tentang keseimbangan hubungan dalam rumah tangga alam, sementara ekonomi berkaitan dengan pengelolaan rumah tangga manusia. Terkadang, sudut pandang dari kedua bidang ini bisa berlawanan, seakan-akan beroperasi dalam dua jaringan atau sistem yang terpisah. Namun, sebenarnya keduanya memiliki hubungan yang erat, di mana rumah tangga manusia tidak dapat dipisahkan secara mutlak dari lingkungannya.

Pembangunan hendaknya menempatkan rakyat sebagai pusat perhatian yang utama. Persoalan kemiskinan, perilaku amoral, kelompok rentan dan meningkatnya pengangguran, perlu mendapat perhatian khusus karena hal tersebut dapat menjadi penyebab instabilitas atau disintegrasi antar kelompok masyarakat yang akan membawa dampak negatif. Oleh karena itu, komitmen dalam meningkatkan kualitas individu dan pertumbuhan ekonomi dengan cara yang adil dan tanpa mengabaikan masyarakat yang kurang beruntung, meningkatkan integrasi antara aspek sosial dan politik yang

didasarkan pada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan penghindaran diskriminasi, serta memberikan perlindungan kepada mereka yang berada dalam situasi kurang menguntungkan. Tujuan utama dari konsep pembangunan yang berfokus pada rakyat adalah mencapai perbaikan dalam kualitas hidup seluruh warga dengan mempertimbangkan aspirasi individu dan kolektif dalam kerangka tradisi budaya yang ada. Pokok dari tujuan ini adalah menghapuskan kemiskinan yang mutlak, mewujudkan keadilan dalam distribusi, dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Pendekatan pembangunan yang menitikberatkan pada keterlibatan rakyat secara langsung adalah kebalikan dari pendekatan yang fokus pada peningkatan produksi. Model pembangunan ini mencakup konsep ekonomi yang lebih mementingkan pemenuhan kebutuhan sistem produksi daripada kebutuhan masyarakat.

Secara sederhana, Korten & Sjahrir (1993) menyatakan bahwa pendekatan pembangunan yang berfokus pada produksi lebih cenderung memprioritaskan hal-hal berikut ini:

1. Industri daripada sektor pertanian, meskipun sebagian besar penduduk dunia mendapatkan penghidupan dari pertanian;
2. Area perkotaan dibandingkan daerah pedesaan;
3. Pemilikan aset produktif yang terfokus pada satu titik, bukan tersebar;
4. Investasi pembangunan yang memberikan manfaat lebih banyak kepada sejumlah kecil kelompok, bukan kepada kelompok yang lebih besar;
5. Penggunaan modal yang efektif, namun pemanfaatan sumber daya manusia kurang optimal, menghasilkan situasi di mana sumber daya modal dimanfaatkan secara efisien, tetapi sumber daya manusia tidak digunakan dengan efektif.

6. Fokus pada efisiensi unit produksi skala besar yang saling tergantung dan berdasarkan perbedaan keuntungan internasional, sementara kurangnya perhatian terhadap variasi dan adaptasi unit produksi skala kecil yang dioperasikan secara lokal, mengakibatkan ketidak-efisienan ekonomi dalam hal energi, dan ketidakmampuan untuk beradaptasi serta rentan terhadap gangguan serius akibat kerusakan atau campur tangan politik dalam sistem tersebut.

Dari perspektif ini, muncul model pembangunan yang menempatkan rakyat sebagai pusat *(People Centered Development)* sebagai opsi inovatif untuk meningkatkan hasil pembangunan, dengan tujuan memenuhi tuntutan yang terus berkembang dari populasi yang sangat besar. Namun, peningkatan ini harus dilakukan dengan memegang teguh prinsip-prinsip partisipasi dan keadilan yang harus tetap dijaga. Pendekatan kontribusi pembangunan yang berpusat pada rakyat menyoroti beberapa aspek penting, di antaranya:

1. Menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian dan tujuan utama pembangunan, dengan partisipasi sebagai unsur utama;
2. Keterlibatan individu memberikan dorongan pada kepercayaan diri mereka, memungkinkan mereka untuk turut serta dalam keputusan-keputusan penting yang memiliki dampak terhadap masyarakat;
3. Partisipasi menghasilkan informasi tentang pandangan, aspirasi, kebutuhan, serta kondisi daerah yang mungkin belum pernah terungkap sebelumnya;
4. Keterlibatan menciptakan lingkungan yang mendukung potensi dan perkembangan masyarakat;
5. Partisipasi dianggap sebagai wujud dari hak demokratis individu dan masyarakat.

Pendekatan model pembangunan yang berpusat pada masyarakat lebih menekankan pada pemberdayaan, dengan mempertimbangkan pengalaman sejarah komunitas selama masa penjajahan dan kedudukan mereka dalam ekonomi global. Pendekatan ini menegaskan bahwa masyarakat seharusnya bersama-sama bekerja untuk mengubah struktur dan kondisi ketertinggalan dalam berbagai tahap. Pendekatan pembangunan yang menitikberatkan pada masyarakat mengakui kreativitas masyarakat sebagai aset utama dalam upaya pembangunan, dan menganggap pencapaian kesejahteraan baik dari segi materi maupun spiritual sebagai sasaran utama yang diupayakan dalam proses pembangunan.

Dalam pendekatan ini, Korten & Sjahrir (1993) menyajikan tiga elemen kunci yang dianggap sebagai dasar perencanaan yang berfokus pada masyarakat:

1. Fokus pada memberikan daya dan mendukung inisiatif bisnis yang dijalankan oleh kelompok miskin agar mereka dapat mengatasi kebutuhan sendiri;
2. Mengakui bahwa, walaupun sektor modern memiliki peran besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sektor-sektor tradisional tetap menjadi pondasi kehidupan bagi sebagian besar rumah tangga yang memiliki keterbatasan;
3. Menggarisbawahi pentingnya pembangunan untuk membantu para penerima bantuan yang miskin dalam mengelola sumber daya lokal secara produktif dan mandiri.

Manusia dan lingkungan merupakan faktor utama yang menjadi titik tolak dalam perencanaan pembangunan. Pendekatan yang digunakan dalam pembangunan adalah ekologi manusia, yang memeriksa interaksi antara sistem manusia dan ekosistem. Pendekatan ini juga mengkritik dua asumsi yang terdapat dalam model-model pembangunan ekonomi. Pertama, asumsi bahwa pembangunan secara otomatis

akan menguntungkan semua individu, dan kedua, anggapan bahwa masyarakat harus mengikuti arus pembangunan model barat tanpa memiliki opsi untuk membentuk jenis masyarakat yang mereka kehendaki.

Dalam kerangka pendekatan pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian *(People Centered Development)*, waktu menjadi fondasi utama bagi transformasi, dan terdapat pemisahan antara rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek. Strategi jangka panjang diperlukan untuk mengatasi ketidaksetaraan sosial, ekonomi, dan nasional. Ini melibatkan pembebasan dari pengaruh kolonialisme dan neokolonialisme, peralihan dari pola pertanian yang berfokus pada ekspor, serta lebih besar pengawasan terhadap aktivitas perusahaan multinasional. Sebaliknya, rencana jangka pendek bertujuan untuk mengatasi kondisi krisis saat ini dengan memberikan dukungan kepada masyarakat dalam menghasilkan makanan melalui diversifikasi pertanian yang lebih optimal, dan juga memberikan peluang pekerjaan baik dalam sektor formal maupun informal. Perbandingan antara paradigma pembangunan yang fokus pada produksi dan paradigma yang berpusat pada masyarakat adalah sebagai berikut:

Pada paradigma pembangunan yang berorientasi pada produksi, fokus utamanya adalah pada upaya meningkatkan produksi ekonomi dan pertumbuhan industri. Hal ini sering kali mengarah pada peningkatan sektor industri dan perkembangan daerah perkotaan. Perhatian cenderung lebih besar pada sektor ekonomi dan pertumbuhan angka ekonomi, dengan penekanan pada pencapaian hasil yang cepat dan peningkatan pendapatan nasional. Namun, dalam pendekatan ini, mungkin terjadi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta kesenjangan distribusi kekayaan dan akses terhadap sumber daya.

Sementara itu, paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian utama. Pendekatan ini memprioritaskan partisipasi dan keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan pembangunan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi lokal. Dalam paradigma ini, pemberdayaan masyarakat menjadi fokus penting, sehingga individu dan komunitas memiliki peran lebih aktif dalam mengambil alih kendali atas pembangunan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Dalam ringkasan, perbedaan mendasar antara paradigma berorientasi pada produksi dan yang berpusat pada rakyat terletak pada fokusnya: yang pertama lebih menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi dan produksi, sementara yang kedua lebih menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dan peningkatan kesejahteraan secara holistik. Untuk lebih ringkasnya menurut Korten dapat dilihat pada **Tabel 8.1**.

Tabel. 8.1 Perbandingan antara Paradigma Pembangunan yang Berorientasi pada Produksi dan Paradigma yang Berpusat pada Rakyat

Dimensi	**Pembangunan Berpusat pada Produksi**	**Pembangunan Berpusat pada Rakyat**
Logika	Ekonomi berbasis produksi: pengeksploitasian dan pengendalian sumber daya alam	Ekologi manusia: penggunaan potensi informasi dan kreativitas inovatif

Dimensi	Pembangunan Berpusat pada Produksi	Pembangunan Berpusat pada Rakyat
Tujuan	Optimalisasi peredaran produk dan layanan	Meningkatkan kapasitas manusia (peran individu sebagai pelaku); mencapai tujuan dengan memperhatikan inisiatif dan variasi di tingkat lokal
Sistem Ekonomi	Tradisional: dimensi luas; fokus pada bidang khusus; penanaman modal; kelebihan perbandingan; ketergantungan global	Otonom: pendekatan berbasis tempat; masyarakat; sumberdaya (sistem ekologi manusia)
Birokrasi	Struktur administrasi besar: masyarakat diatur dalam unit produksi yang efisien dengan pengawasan yang sentral	Sistem otomi yang beroperasi disekitar unit-unit organisasi manusia dan melibatkan berbagai komunitas
Kriteria	Efisiensi: peningkatan kecepatan pertumbuhan produktivitas	Nilai produk: keterlibatan dalam kualitas kehidupan dan pemberdayaan dalam lingkungan kerja

Dimensi	Pembangunan Berpusat pada Produksi	Pembangunan Berpusat pada Rakyat
	sistem secara optimal	
Teknik soaial	Bentuk struktur organisasi berbasis sistem komando; pendekatan analisis keputusan yang netral dan positivistik; pengetahuan dikembangkan dengan sudut pandang fungsional; sistem produksi diartikan berdasarkan fungsi-fungsi tertentu; alat analisis tidak memperhatikan faktor manusia dan lingkungan	Struktur organisasi berbasis swadaya; partisipasi individu dalam pengambilan keputusan; dengan pedomannya adalah nilai-nilai "kemanusiaan"; pengetahuan dikembangkan dengan perspektif wilayah; pilihan-pilihan produksi dan pencapaian dipandu oleh kerangka ekologi yang melibatkan manusia dan memposisikan manusia dalam analisis proses
Penentuan keputusan	Pusat kekuasaan yang terpusat; dikuasai oleh para pakar; tidak melibatkan konsultasi, pengendalian oleh	Memberikan kesempatan kepada komunitas untuk mengintegrasikan nilai-nilai kebutuhan lokal dalam proses pengambilan keputusan; pengendalian dipegang oleh masyarakat

Dimensi	Pembangunan Berpusat pada Produksi	Pembangunan Berpusat pada Rakyat
	pejabat yang tidak bertanggung jawab atas akibat keputusan	yang merasakan dampak keputusan tersebut dalam kehidupan mereka
Teknologi organisasi	Terfokus pada keperluan system perintah; menyoroti peraturan hukum sebagai panduan; otoritas pengawasan berada dalam struktur formal	Sistem pembelajaran dalam rangka swa-organisasi; struktur resmi diperkaya dengan teknologi organisasi yang lebih fleksibel dan adaptif; sistem informasi terbentuk melalui interaksi manusia, nilai-nilai dan data sebagai respons terhadap kebutuhan dan permintaan yang spesifik dalam situasi tertentu; komunitas sosial yang lebih berkesinambungan seperti keluarga RT, perkumpulan sukarela dan lainnya.

Sumber : Hasan, 2015

Dalam kerangka pendekatan pembangunan yang menempatkan fokus pda masyarakat *(People Centered Development)* fokusnya adalah membangkitkan kesadaran seluruh masyarakat agar dapat mengatasi permasalahan mereka melalui organisasi lokal yang tumbuh dari bawah ke atas. Organisasi yang terbukti efektif adalah yang dimulai dari kebutuhan nyata masyarakat yang konkrit seperti kesehatan,

ketenagakerjaan, dan layanan dasar. Namun demikian, entitas ini juga memiliki kapabilitas untuk mengangkat isu-isu tersebut sebagai sarana untuk mencapai tujuan strategis masyarakat dalam konteks sosial dan politik yang spesifik. Dalam kerangka pendekatan pembangunan yang menekankan pada peran masyarakat, pengenalan kebutuhan praktis dan strategis dilakukan melalui pemberdayaan komunitas. Karena itu, diperlukan klasifikasi kebutuhan praktis dan strategis masyarakat agar tidak terjadi salah pemahaman bahwa perubahan terjadi secara seketika. Perubahan yang terjadi dalam waktu singkat tidak selalu memiliki dampak terhadap transformasi jangka panjang, dan pemenuhan kebutuhan praktis masyarakat tidak otomatis menjamin pemenuhan kebutuhan strategis mereka. Kebutuhan praktis mencakup berbagai aspek dasar kehidupan manusia, sementara kebutuhan strategis melibatkan penguasaan keterampilan penting untuk mengakses layanan sosial serta hak-hak individu, kelompok, dan masyarakat dalam mencapai kualitas hidup dan kesejahteraan sosial.

Pendekatan pembangunan yang berfokus pada masyarakat dengan memanfaatkan strategi pemberdayaan memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan pendekatan-pendekatan pembangunan lainnya. Inti dari pendekatan ini adalah mencapai kebutuhan strategis masyarakat secara tidak langsung melalui pemenuhan kebutuhan praktis masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara yang tidak langsung, menghindari konfrontasi langsung, dan membangun dasar yang kuat berdasarkan kebutuhan praktis masyarakat sebagai langkah menuju pemenuhan kebutuhan strategis. Pemberdayaan masyarakat dalam pendekatan ini tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan harga diri, rasa percaya diri, dan martabat masyarakat, sambil juga melestarikan nilai-nilai budaya lokal. Konsep pemberdayaan dalam konteks sosial budaya memiliki peran sentral dalam

pendekatan pembangunan yang berpusat pada masyarakat, karena tidak hanya meningkatkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga nilai tambah sosial dan budaya.

Kajian strategis tentang pemberdayaan masyarakat, yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan politik, menjadi esensial dalam merumuskan kembali pendekatan pembangunan yang berfokus pada masyarakat. Dalam pembangunan yang berbasis partisipatif, pemberdayaan dianggap sebagai strategi yang tepat, tetapi faktor-faktor yang mempengaruhi perlu dikelola dengan baik untuk memastikan bahwa inti dari pemberdayaan tidak mengalami distorsi. Ada tiga model pembangunan untuk mensejahterakan rakyat yaitu:

1. Model pembangunan nasional yang berorientasi pada pertumbuhan.

Model ini memandang tujuan pembangunan nasional terbatas pada aspek pertumbuhan ekonomi yang sempit, yaitu meningkatkan kemampuan ekonomi nasional dalam jangka waktu yang lama. Sasaran utamanya adalah mencapai pertumbuhan Produk Nasional Bruto (GNP) sekitar 5 hingga 7 persen per tahun, atau bahkan lebih tinggi. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini, fokus diberikan pada mengutamakan struktur produksi di sektor jasa dan manufaktur, serta mengurangi peran sektor pertanian secara proporsional. Namun, kebijakan ini mungkin mengakibatkan ketimpangan sektor pertanian dan ekonomi.

Dalam kerangka model pembangunan ini, perhatian utama tertuju pada kegiatan produksi, sementara penanganan isu-isu seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan ditempatkan sebagai prioritas kedua. Bahkan, upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut hanya diharapkan terjadi melalui "*trickle down effect*" (penyebaran manfaat dari pertumbuhan ekonomi ke lapisan masyarakat yang lebih bawah secara alami). Dalam model pembangunan ini, peran masyarakat

diabaikan, dan masyarakat dianggap hanya sebagai objek pembangunan, bukan sebagai subjek yang aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan. Sayangnya, data empiris menunjukkan bahwa model pembangunan ini gagal meningkatkan kualitas hidup kaum miskin, dan bahkan kesenjangan sosial semakin memperdalam di tengah masyarakat.

2. Model pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan dasar.

Model pembangunan ini berfokus pada bagian penduduk yang hidup dalam kemiskinan dan menjelaskan bahwa masalah kemiskinan saat ini disebabkan oleh pengabaian masyarakat dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, model pembangunan ini berusaha untuk secara langsung mengatasi masalah kemiskinan tanpa mengandalkan mekanisme *"trickle down effect"*. Model ini esensialnya adalah sebuah inisiatif bantuan yang bertujuan mencapai kesejahteraan bagi mereka yang berada dalam kondisi sangat miskin dengan cara memenuhi kebutuhan pokok mereka, termasuk memberikan kesempatan untuk memperoleh pendapatan dan akses terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, pasokan air bersih, transportasi, dan lainnya.

Pendekatan pembangunan yang menekankan pemenuhan kebutuhan dasar ini didasari oleh alasan inti yang dijelaskan oleh Moeljarto, (1993), yang terdiri dari tiga faktor pokok. Pertama, banyak individu yang berada dalam situasi kurang mampu memiliki sedikit aset produktif selain dari kapasitas fisik, semangat kerja, dan tingkat kecerdasan dasar mereka. Peningkatan kualitas dari aset-aset ini sangat tergantung pada akses yang lebih baik terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan lainnya. Kedua, peningkatan pendapatan bagi masyarakat miskin mungkin tak akan berdampak pada peningkatan standar hidup mereka jika barang dan jasa yang relevan dengan keperluan dan taraf

pendapatan mereka tak tersedia. Ketiga, untuk mengangkat standar hidup golongan termiskin dari mereka yang sudah miskin, waktu yang panjang dibutuhkan, dan dalam situasi tertentu, mereka seringkali tak bisa berkontribusi secara produktif.

Karenanya, program subsidi dalam rentang waktu pendek sangatlah penting dan bahkan mungkin program subsidi permanen diperlukan untuk memastikan masyarakat memperoleh andil dari hasil pembangunan.

3. Model pembangunan yang berorientasi pada manusia.

Pendekatan ini adalah langkah maju dalam mempertimbangkan dimensi pembangunan manusia dibandingkan dengan fokus pada pertumbuhan. Namun, terdapat setidaknya dua kelemahan dalam model ini. Pertama, masyarakat yang berada dalam kondisi miskin dapat menjadi tergantung pada bantuan yang diberikan oleh pemerintah, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan ketergantungan dan ketidakmandirian. Kedua, ada potensi untuk beban anggaran pemerintah meningkat seiring pertambahan jumlah masyarakat miskin, seperti akibat bencana alam yang menyebabkan seseorang terjerumus dalam kemiskinan dan akhirnya harus ditanggung oleh pemerintah. Disamping itu, model pembangunan ini juga mendapat kritik, dengan alasan bahwa meskipun kesejahteraan masyarakat miskin dapat membaik, jika penerima manfaat yang berada dalam kondisi miskin hanya menerima pelayanan pasif dari pemerintah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, hal ini dianggap tidak dapat diterima atau sah secara moral. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak sekadar berkonsentrasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pendapatan nasional (GNP) dan pemenuhan kebutuhan pokok warga, melainkan lebih mengedepankan upaya meningkatkan mutu individu sehingga mereka dapat terlibat secara aktif dalam berbagai aspek

kehidupan, yang pada gilirannya mendorong terwujudnya aktivitas produktif berorientasi nilai yang tinggi.

Model pembangunan ini berusaha memaksimalkan dampak politik yang mungkin mengubah perilaku masyarakat dari sikap yang pasif dan responsif menjadi peserta aktif yang memberikan kontribusi dalam upaya pembangunan. Sasarannya adalah membentuk masyarakat yang dinamis serta berkembang, yang dapat berperan dalam menentukan isu-isu yang penting bagi kemajuan komunitas. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan yang berfokus pada rakyat *(People Centered Development)* menjadi salah satu alternatif yang dipertimbangkan untuk mengatasi kelemahan model sebelumnya.

8.4 Etika Pembangunan Perdesaan

Penerapan desentralisasi menurut Astuti (2001) ialah melalui otonomi daerah memunculkan implikasi dari kemandirian. Kemandirian diartikan sebagai tingkat kewaspadaan yang dicapai melalui inisiatif internal, usaha mandiri, kreativitas, dan kesadaran untuk mengatasi tantangan sendiri, serta menolak ketergantungan pada pihak lain. (Mubyarto, 1988) merumuskan konsep etika pembangunan di pedesaan yang berasal dari usaha untuk membangun kemandirian masyarakat pedesaan dalam melaksanakan pembangunan. Dalam konteks pembangunan berorientasi otonomi daerah saat ini, konsep etika pembangunan di pedesaan ini sangat relevan untuk diadopsi dan diterapkan sebagai pedoman pembangunan yang berfokus pada desentralisasi. Etika pembangunan di pedesaan menggambarkan sejumlah langkah operasional dari konsep kemandirian, yang dimulai dengan perubahan dalam beberapa pandangan sebagai berikut:

1. Paradigma pembangunan ini mengubah cara daerah dan aparatnya memandang peran rakyat dalam proses pembangunan. Rakyat tidak hanya dianggap sebagai

sumber daya energi semata, tetapi juga sebagai sumber informasi yang sangat berharga bagi keberhasilan program pembangunan. Partisipasi aktif rakyat sangat penting, mulai dari menetapakn prioritas pembangunan hingga mengawasi pelaksanaannya. Rakyat diberikan kesempatan untuk menentukan kebutuhan sesuai dengan potensi wilayahnya;

2. Perubahan mental aparat pemerintahan daerah terkait makna dan fungsi kekuasaan menjadi sangat penting dalam konteks otonomi daerah. Otonomi daerah memperkuat posisi daerah dalam pengambilan keputusan. Namun, penting juga bagi aparat pemerintahan daerah untuk bertindak secara bijaksana, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan penindasan terhadap rakyat. Aparat pemerintahan daerah harus menyadari bahwa peran mereka lebih berfokus pada fungsi koordinatif dan administratif serta bermitra dengan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan;
3. Perlu mengubah persepsi bahwa sistem paternalistik adalah karakteristik masyarakat daerah, terutama masyarakat perdesaan. Pandangan ini harus ditinggalkan karena hanya memperkuat tradisi sentralistik dalam proses pembangunan. Sistem ini muncul karena rakyat tidak diberdayakan secara mandiri untuk mengatasi permasalahan mereka sendiri;
4. Persepsi dan pemahaman baru tentang pluralitas kawasan dan masyarakat Indonesia sangat penting bagi setiap kalangan terkait proses pembangunan. Usaha untuk membuat semuanya seragam dalam konteks pembangunan perlu dihindari. Kesadaran akan nilai budaya lokal sebagai sumber daya pembangunan, buka penghalang akan mendorong adopsi inovasi dengan lebih cepat;

5. Diperlukan perubahan persepsi dari aparat dan pemerintah terhadap kelompok yang dianggap miskin atau terbelakang di daerah. Kelompok ini memiliki potensi untuk mengembangkan diri seperti kemampuan dalam mengidentifikasi hambatan, kreativitas daan keterampilan teknis dalam mengidentifikasi hambatan, kreativitas dan keterampilan teknis yang memungkinkan mereka untuk bertahan dalam mengahadapi situasi sulit.

Bab 9

Pembangunan Berwawasan Lingkungan

9.1 Sejarah Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan upaya secara sadar dan sistematis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek lingkungan. Pasca revolusi industri di Eropa, perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat dunia bergerak dengan sangat cepat tetapi tidak disertai dengan sektor lingkungan. Penerapan teknologi industri saat itu membebankan sektor lingkungan hidup, penggunaan energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara memberikan pengaruh terhadap lingkungan. Daya dukung dan daya tampung lingkungan tidak mampu menanggung beban dari kegiatan pembangunan yang sangat cepat dengan menerapkan teknologi industri saat itu. Beban berlebih yang ditanggung oleh lingkungan memberikan dampak terhadap masyarakat dunia seperti perubahan iklim ekstrim, emisi gas rumah kaca, pencemaran perairan dan pencemaran daratan. Dampak tersebut pada akhirnya menjadi hambatan dalam tujuan dari percepatan pembangunan manusia.

Menyadari dampak buruk dari hal itu maka masyarakat dunia dengan secara sadar mulai memberikan perhatian pada sektor lingkungan dalam pembangunan, sehingga memperhatian 3 sektor utama yaitu sosial, ekonomi dan lingkungan. Ketiga sektor tersebut agar memiliki tujuan yang

jelas maka perlu ditambahkan sektor tata kelola dan hukum sehingga 4 indikator tersebut pembangunan yang berwawasan lingkungan atau pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) diyakini menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat ini sampai yang akan datang tanpa mengurangi kualitas lingkungan.

Gambar 9.1 Tujuan pembangunan berkelanjutan

(Sumber: Bappenas, 2019)

Pembangunan yang berwawasan lingkungan mulai menjadi perhatian dunia ketika dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada tahun 1972 yang disebut dengan Deklarasi Stockholm yang berisi prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup di masa depan melalui penerapan hukum lingkungan internasional. Isu-isu penting lain yang muncul dari Konferensi Stockholm tersebut adalah pengakuan atas pengentasan kemiskinan untuk melindungi lingkungan hidup, pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan lain-lainnya (Bakri *et al*., 2022). Selanjutnya dalam konferensi PBB pada tahun 1992 membahas pembangunan dan lingkungan (*United Nation Conference on Environment and Development*/UNCED) menghasilkan kesepakan yang disebut

Agenda 21 dan Deklarasi Rio yang menetapkan 27 prinsip pembangunan dan lingkungan.

Selama periode ini, dibentuklah Komisi Pembangunan Berkelanjutan (Commision on Sustainable Development/CSD) di bawah ECOSOC. Beberapa konvensi yang dihasilkan pada masa ini meliputi Konvensi Rotterdam tentang perdagangan bahan kimia berbahaya dan pestisida (1998), Protokol Kyoto mengenai Perubahan Iklim (1998), dan Protokol Kartagena yang mencakup implementasi Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati dan sejumlah lainnya. Dari tahun 2002 hingga sekarang, telah diadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pembangunan Berkelanjutan yang dihelat di Johannesburg, Afrika Selatan, pada tahun 2002. KTT ini pada dasarnya merupakan kelanjutan dari Deklarasi Rio dan Agenda 21 yang dihasilkan dalam konferensi Rio, serta menguraikan Agenda 21 menjadi Rencana Pelaksanaan yang berorientasi pada tindakan nyata dan terukur (Setiawan, 2007). Selanjutnya pada tahun 2015 Konfrensi Tingat Tinggi Dunia menetapkan konsep Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan pengembangan dari konsep Millenium Development Goals (MDGs) dan SDGs disepakati akan tercapai pada tahun 2030 (Setiawan, 2007).

Jika kita mengikuti semua konferensi dari tahun 1972 hingga 2002, kita dapat mengamati bahwa terjadi pergeseran dalam perbedaan pandangan politik mulai dari penekanan utama pada masalah lingkungan di Konferensi Stockholm tahun 1972, melalui fokus bersama pada pembangunan lingkungan, sosial, dan ekonomi di KTT Bumi Rio de Janeiro tahun 1992, hingga fokus utama pada pengentasan kemiskinan di KTT Milenium tahun 2000 dan KTT Dunia Johannesburg tahun 2002. Pergeseran paradigma pembangunan berkelanjutan tidak selalu berarti perlindungan lingkungan telah terpinggirkan, yang menarik perhatian terutama dalam kapasitas saat ini yaitu untuk mengurangi kemiskinan. Sebaliknya, tampaknya apa yang dimulai sebagai seruan untuk melindungi lingkungan demi

pembangunan manusia telah menjadi seruan yang lebih khusus untuk memprioritaskan perbaikan kesejahteraan mereka yang sangat terburuk saat ini dan di masa depan. Tantangan terbesar dari pembangunan berkelanjutan tetaplah kesadaran global dari rumah tangga hingga ruang publik mengenai pentingnya mengatasi tantangan Revolusi Industri: eksploitasi manusia dan lingkungan yang tanpa batas (Paul, 2008).

Hasil konferensi tingkat tinggi dunia yang di sepakati oleh negara-negara termasuk Indonesia. Sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam pembangunan berwawasan lingkungan maka Pemerintah Indonesia telah meratifikasi hasil KTT dengan mengeluarkan aturan yang sejalan dengan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan dengan sesuai karakteristik dan isu-isu yang terdapat wilayah Indonesia. Peraturan tersebut terdiri dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah.

9.2 Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan

Komunikasi sosial dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu lingkungan dan pentingnya pembangunan berwawasan lingkungan. Melalui kampanye, program edukasi, dan media sosial, informasi tentang pentingnya konservasi sumber daya alam, pengelolaan limbah, energi terbarukan, dan perlindungan ekosistem dapat disebarkan secara luas. Wawasan pembangunan yang berwawasan lingkungan di integrasikan ke dalam pendidikan tentunya memiliki tujuan agar timbul rasa kesadaran sejak dini kepada masyarakat sehingga dapat menjadi *pioneer* dalam pembangunan berwawasan lingkungan.

Faktor manusia diidentifikasi sebagai akar masalah dari kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengubah aspek psikologis masyarakat dari kurangnya pengetahuan dan pemahaman menjadi lebih sadar dan mengerti tentang lingkungan. Pendidikan lingkungan diakui sebagai

sarana penting untuk mengubah kemampuan psikologis masyarakat. Namun, untuk mengubah perilaku, diperlukan kerjasama dari seluruh komponen di lingkungan pendidikan, terutama guru. Guru-guru diharapkan memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan materi dan konsep lingkungan dalam pembelajaran mereka. Pengintegrasian ini dapat dilakukan melalui pengembangan manajemen pendidikan sekolah yang berfokus pada lingkungan atau melibatkan partisipasi guru dalam menanamkan konsep lingkungan kepada siswa. Integrasi pendidikan lingkungan dalam kurikulum dianggap dapat meningkatkan pencapaian tujuan pendidikan lingkungan hidup di sekolah. Pengintegrasian ini diharapkan dapat dilakukan dengan cara yang fleksibel, menyeluruh, dan dapat disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan masing-masing mata pelajaran. Pendidikan berperan sebagai wadah untuk memperkenalkan dan membentuk norma-norma baru yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pelestarian lingkungan. Melalui pendidikan, kesadaran dan perilaku berwawasan lingkungan dapat tumbuh dalam masyarakat. Pengintegrasian materi lingkungan ke dalam mata pelajaran dianggap sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi tantangan masalah lingkungan yang ada saat ini dan di masa depan (Nugroho, 2022).

Solusi selanjutnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup adalah dengan melakukan sosialisasi materi pelestarian lingkungan yang terintegrasi dengan pendidikan agama. Sosialisasi ini menggabungkan dua bidang ilmu dan disampaikan melalui proses pembelajaran dengan pendekatan korelasi atau terintegrasi. Sosialisasi ini secara berulang-ulang disampaikan dalam kegiatan penyuluhan oleh fasilitator atau instruktur yang kompeten. Rangkaian kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan sikap humanisme terhadap lingkungan serta meningkatkan aspek mental dan spiritual, yang pada gilirannya akan mengembangkan kesadaran masyarakat dalam menjaga

kelestarian lingkungan (Karim, 2017). Pentingnya pendidikan menjadi sarana komunikasi sosial yang efektif dalam mensosialisasikan pembangunan berwawasan lingkungan, dengan pendidikan juga dapat menjadi jembatan atau katalis bagi penerapan inovasi teknologi yang berwawasan lingkungan di wilayah berkembang, berbagai jurnal penelitian internasional bereputasi banyak mengkaji tentang pentingnya pendidikan dalam pembangunan berwawasan lingkungan (O'Flaherty & Liddy, 2018).

Pentingnya pendidikan dalam menyampaikan pesan pembangunan berwawasan lingkungan di Indonesia tentu searah dengan penyusunan anggaran belanja dan pendapatan negara (APBN) sesuai amanat undang-undang mengalokasikan sebanyak 20% dari total APBN. Tentunya alokasi dana yang sangat besar ini menjadi komitmen serius Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan dari peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan bantuan/ beasiswa pendidikan dari tingkat sekolah dasar, menengah atas dan perguruan tinggi baik dalam dan luar negeri dengan menyasar semua struktur lapisan masyarakat, tidak sampai disitu saja peningkatan kualitas penyelenggara pendidikan guna menjamin mutu pendidikan di Indonesia juga dilakukan. Pemberian intensif kepada tenaga pengajar kepada sekolah dan perguruan tinggi swasta juga membuktikan bahwa komitmen dalam membangunan pendidikan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dapat dicapai sesuai target yang direncakanan pada tahun 2030.

9.3 Partisipasi Masyarakat dan Pengaruh Opini Publik

Komunikasi sosial memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan berwawasan lingkungan. Dengan menyediakan saluran komunikasi yang terbuka dan transparan, masyarakat dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan, merumuskan kebijakan, dan

memberikan masukan terkait rencana pembangunan yang lebih ramah lingkungan. Partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan kebijakan rencana dan program yang dilakukan pemerintah, kemudian terlibat dan bertanggung jawab secara adil terhadap program pembangunan yang dilaksanakan. Masyarakat dapat berpartisipasi dengan dua cara yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif yaitu keikutsertaan masyarakat untuk mengambil pendapat, keputusan dan bertindak sendiri. Sedangkan partisipasi pasif yaitu melibatkan masyarakat ketika ketika program atau kegiatan telah direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh pihak lain (Kurniawan *et al*., 2015).

Menurut Wibawa (2019) Partisipasi masyarakat memiliki peran yang sangat optimal dalam menghidari dan memperbaiki degradasi ekosistem lingkungan hidup. Melalui partisipasi, masalah lingkungan dapat diatasi dan langkah-langkah pencegahan yang lebih serius dapat diambil. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia terkait partisipasi dalam ekosistem lingkungan seperti:

1. Akhlak Masyarakat: pada umumnya masyarakat percaya bahwa sumber daya yang tersedia di alam diciptakan untuk kebutuhan manusia, yang berimplikasi bahwa manusia dapat mengeksploitasi sumber daya alam tanpa batasan.
2. Budaya Masyarakat: masyarakat Indonesia sangat menghindari perselisihan dan kesepakatan langsung. Kritik terbuka atau ketidaksetujuan terhadap gagasan atau rencana pihak yang lebih tinggi dianggap tabu.
3. Pendidikan Masyarakat: rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan pengetahuan masyarakat tentang lingkungan sangat terbatas.

4. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat: Kondisi ekonomi rendah di Indonesia mendorong masyarakat untuk melakukan eksploitasi lingkungan guna memenuhi kebutuhan hidup.
5. Tingkat Penerapan Teknologi: Penguasaan dan penerapan teknologi untuk mengeksporasi lingkungan masih terbatas, dan biaya teknologi yang tinggi juga menjadi kendala.

Pembangunan berwawasan lingkungan adalah kewajiban bersama pemangku kepentingan antara lain pengambil kebijakan, filantropi/pengusaha, dan masyarakat. Masyarakat memiliki peran dalam pengawasan dan partisipasi dalam perlindungan lingkungan yang diatur dalam berbagai instrumen lingkungan hidup, termasuk Undang-Undang PPLH. Berdasarkan kajian empiris menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan seringkali terbatas pada penyampaian informasi atau penyuluhan sehingga tidak ada tindak lanjut dari penyuluhan tersebut, secara aturan Undang-Undang PPLH mengembangkan konsep peran serta masyarakat dalam bentuk hubungan konsultatif dan kemitraan. Partisipasi masyarakat sangat efektif dalam mencegah dan memperbaiki kerusakan lingkungan. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan akan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan (Wibawa, 2019).

Masifnya edukasi dan informasi di berbagai media cetak dan elektronik tentang pembangunan berwawasan lingkungan tentunya akan membentuk opini publik yang dapat dipengaruhi dan didorong untuk mendukung pembangunan berwawasan lingkungan. Media, kampanye advokasi, dan aksi-aksi kesadaran lingkungan dapat mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat, mendorong mereka untuk menjadi agen perubahan dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan. Selain Pendidikan, pengetahuan dan usia ternyata pengaruh opini publik juga dapat menentukan arah kebijakan pemerintah dalam hal

pengembangan sektor energi bersih yang akan mempengaruhi perubahan iklim dunia. Selain itu opini publik juga dapat membatasi kebijakan-kebijakan apa saja yang akan dilanjutkan yang tentunya kebijakan tersebut searah dengan konsep pembangunan berkelanjutan (Anderson *et al*., 2017).

Opini publik memiliki pengaruh yang signifikan dalam pembangunan berkelanjutan. Opini publik mencerminkan pandangan, keyakinan, dan sikap masyarakat terhadap isu-isu lingkungan dan pembangunan. Pengaruh ini dapat terjadi dalam beberapa cara:

1. Tekanan dan Tuntutan: Opini publik yang peduli terhadap isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan dapat menciptakan tekanan pada pemerintah dan sektor swasta untuk mengambil tindakan yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Tuntutan dari masyarakat dapat mendorong pembuat kebijakan dan perusahaan untuk mengadopsi praktik yang lebih berkelanjutan.
2. Pengambilan Keputusan: Opini publik dapat memengaruhi keputusan pembuat kebijakan melalui pemilihan umum, konsultasi publik, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan. Pemerintah dan organisasi dapat merespons opini publik dengan mengadopsi kebijakan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.
3. Konsumsi dan Produksi: Perubahan perilaku konsumen yang mendorong permintaan terhadap produk dan layanan berkelanjutan dapat mendorong perusahaan untuk mengembangkan produk yang lebih ramah lingkungan. Opini publik yang memilih produk dan mereka yang berkomitmen terhadap keberlanjutan dapat mendorong perubahan dalam praktik bisnis.
4. Pendidikan dan Kesadaran: Opini publik yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan dapat menjadi agen perubahan

dengan menyebarkan pengetahuan dan kesadaran kepada orang lain. Pendidikan dan kampanye kesadaran dapat membentuk pandangan dan tindakan masyarakat terhadap isu-isu berkelanjutan.

5. Pengaruh Media Sosial: Media sosial memainkan peran penting dalam membentuk opini publik dan menggerakkan gerakan berkelanjutan. Informasi dan kampanye yang disebarluaskan melalui media sosial dapat mengumpulkan dukungan dan memicu tindakan.

6. Pelobi dan Advokasi: Organisasi masyarakat sipil dan kelompok advokasi berkelanjutan sering kali berupaya mempengaruhi opini publik melalui kampanye, protes, dan kegiatan advokasi lainnya. Dukungan dan partisipasi publik dapat memberi legitimasi pada upaya-upaya ini.

9.4 Penyebaran Inovasi Teknologi Ramah Lingkungan

Komunikasi sosial memainkan peran kunci dalam menyebarkan informasi tentang inovasi dan teknologi ramah lingkungan. Dengan cara ini, masyarakat dapat mengadopsi praktik dan teknologi yang lebih berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari, seperti penggunaan energi terbarukan, kendaraan ramah lingkungan, dan pengelolaan limbah yang lebih baik.

Penyebaran informasi pentingnya pembangunan berwawasan lingkungan melalui pendidikan dan media massa akan memberikan pengaruh kepada masyarakat, tetapi isu pembangunan yang berkelanjutan merupakan isu penting yang memerlukan tindakan dan perubahan secepatnya tidak sekedar informasi ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu berbagai kalangan seperti, pemerintah, industri dan masyarakat memerlukan inovasi yang dapat mengarahkan kepada perubahan atau transformasi individu, organisasi dan komunitas untuk kehidupan yang berkelanjutan (Silvestre & Ţîrcă, 2019).

Berbagai kalangan akademisi dan pengambil kebijakan terus bekerja keras dalam mengembangkan inovasi teknologi sehingga dapat mencapai pembangunan berkelanjutan. Kemampuan inovasi teknologi ramah lingkungan ternyata dapat mendorong pertumbuhan sektor ekonomi dan tidak meninggalkan sektor lingkungan dan sosial, tetapi ini terjadi pada negara maju, negara berkembang pengaruh inovasi teknologi berpengaruh pada dimensi ekonomi dan lingkungan sedangkan negara miskin masih inovasi teknologi belum berdampak signifikan terhadap tiga pilar pembangunan berkelanjutan (Omri, 2020). Oleh karena itu faktor inovasi teknologi tidak dapat berjalan sendiri tetapi sejalan dengan faktor lain seperti stabilitas ekonomi, geopolitik, dan pendidikan juga mempengaruhi kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan (Little & Green, 2009).

Pentingnya inovasi dalam pembangunan berkelanjutan maka peranan inovasi teknologi yang ramah lingkungan dimasukan ke tujuan ke 9 dalam pembangunan berkelanjutan. Inovasi dan infrastruktur berkelanjutan sangat penting dalam peningkatan ekonomi dan pembangunan suatu wilayah. Saat ini di wilayah perkotaan terdapat setengah populasi penduduk dunia, sehingga dianggap penting adannya inovasi terhadap sistem transportasi dan energi berkelanjutan. Komunikasi sangat penting dalam penyebaran teknologi informasi, dengan mempromosikan industri teknologi yang ramah lingkungan tentunya akan lebih besar dan luas jangkauan ke masyarakat sehingga turut serta dalam mensosialisasikan pembangunan berkelanjutan. Investasi infrastruktur berkelanjutan pada sektor teknologi dan inovasi akan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak tersentuh teknologi informasi seperti internet sehingga dapat memperoleh informasi dalam mengembangkan dan membangun wilayah.

Penerapan inovasi teknologi untuk pembangunan berkelanjutan tentunya tidak selalu berjalan lancar, berbagai kendala yang sering ditemui dalam masyarakat khususnya pada wilayah yang masih berstatus berkembang dan miskin. Kurangnya pendidikan dasar tentang pentingnya lingkungan, faktor ekonomi dan sosial turut menghambat penerapan teknologi yang berkelanjutan. Oleh sebab itu rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut yaitu : 1). Media pembelajaran teori dan praktek tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan perlu dibuat; 2). Perlu dilakukan pemetaan wilayah dengan penduduk yang tidak terjangkau atau tidak dilayani dari inovasi teknologi dan 3). institusi-institusi harus direformasi untuk mengarahkan kembali sistem inovasi menuju pembangunan berkelanjutan dan memastikan bahwa semua tahap dan skala inovasi dipertimbangkan sejak awal (Anadon *et al*., 2016).

Inovasi teknologi memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan berwawasan lingkungan dengan cara yang berkelanjutan dan berdampak positif. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana inovasi teknologi dapat berkontribusi dalam pembangunan berwawasan lingkungan: 1. Energi Terbarukan: Teknologi terbaru dalam energi terbarukan seperti panel surya, turbin angin, dan sel bahan bakar dapat mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil yang berdampak negatif pada lingkungan. Energi terbarukan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara. 2. Penggunaan Sumber Daya yang Efisien: Teknologi canggih dapat membantu dalam penggunaan yang lebih efisien dari sumber daya alam, seperti air dan energi. Sensor pintar, perangkat pengukur, dan sistem kontrol otomatis dapat membantu mengurangi pemborosan dan menciptakan operasi yang lebih berkelanjutan. 3. Transportasi Berkelanjutan: Kendaraan listrik, pengembangan bahan bakar alternatif, dan teknologi kendaraan otonom dapat mengurangi emisi gas buang dan mempromosikan

transportasi berkelanjutan. 4. Pertanian Berkelanjutan: Teknologi pertanian berkelanjutan seperti pertanian vertikal, penggunaan drone untuk pemantauan tanaman, dan penggunaan pupuk organik dapat meningkatkan produktivitas pertanian sambil mengurangi dampak lingkungan. 5. Pengelolaan Limbah dan Daur Ulang: Inovasi dalam pengelolaan limbah dan daur ulang dapat membantu mengurangi pencemaran dan penggunaan sumber daya yang berlebihan. Teknologi daur ulang canggih dapat mengubah limbah menjadi sumber daya yang berharga. 6. Smart Cities: Konsep kota pintar (smart cities) menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengelola sumber daya dan layanan perkotaan dengan lebih efisien. Ini termasuk pengelolaan energi, air, transportasi, dan pengurangan limbah. 7. Pemantauan Lingkungan: Sensor dan perangkat pemantauan canggih dapat digunakan untuk memantau kualitas air, udara, dan lingkungan lainnya secara real-time, memungkinkan tindakan cepat jika terjadi pencemaran atau kerusakan. 8. Desain Ramah Lingkungan: Teknologi dalam desain arsitektur dan konstruksi dapat memungkinkan pembangunan bangunan yang lebih efisien energi, menggunakan bahan ramah lingkungan, dan mengurangi dampak lingkungan. 9. Pengurangan Deforestasi: Teknologi pemetaan satelit dan analisis data dapat membantu dalam mengawasi dan mengurangi deforestasi serta membantu dalam konservasi hutan.

Penting untuk diingat bahwa inovasi teknologi harus diarahkan dengan bijak dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan jangka panjang. Selain itu, inklusi teknologi ini harus memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, termasuk yang paling rentan, untuk mencapai pembangunan yang benar-benar berwawasan lingkungan.

9.5 Peningkatan Kesadaran Korporasi dan Koordinasi antara Stakeholder

Komunikasi sosial juga dapat mempengaruhi kesadaran korporasi tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Dengan mendengarkan suara masyarakat dan menanggapi isu-isu lingkungan melalui media sosial dan kampanye advokasi, perusahaan dapat lebih memprioritaskan keberlanjutan dan memperbaiki praktek bisnis mereka untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Komunikasi sosial membantu meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan berwawasan lingkungan, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga internasional. Kolaborasi yang baik dapat menghasilkan rencana pembangunan yang lebih holistik dan berkelanjutan.

Pembangunan berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan merupakan program nasional yang ditargetkan tercapat pada tahun 2030 dengan 17 tujuan dan 169 indikator merupakan penjabaran dari 4 pilar pembangunan berkelanjutan yaitu ekonomi, sosial, lingkungan dan tata kelola/hukum. Pencapaian tujuan tersebut terkesan sangat ambisius dengan diintegrasikan isu pembangunan berkelanjutan tersebut dalam instrument perencanaan antara lain RPJP, RPJM dan RTRW di tingkat nasional dan daerah. Pencapaian program nasional tersebut tidak akan berhasil jika di tingkat daerah tidak melaksanakan program tersebut dengan baik. Oleh karena itu kesadaran para pemangku kepentingan dan koordinasi lintas daerah dan pusat sangat diharapkan. Berbagai cara dilakukan untuk mengkomunikasikan program pembangunan berkelanjutan melalui dengan aturan hukum, petunjuk teknis dan seminar nasional/daerah dengan tujuan agar komitmen pusat dan daerah dapat berjalan dengan bersama.

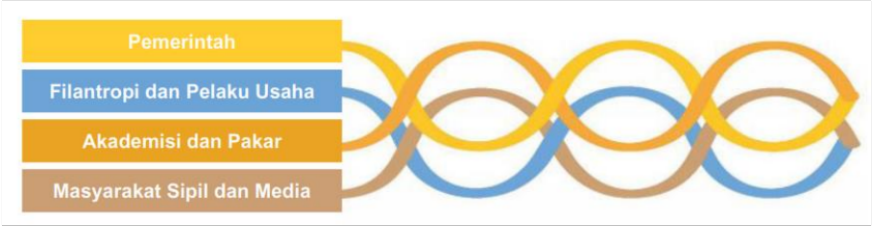

Gambar 9.2 Kerjasama pemangku kepentingan SDGs

(Sumber: Dimodifikasi dari A Quadruplex Helix Guide for Innovations)

Koordinasi antar stakeholder dalam pembangunan berwawasan lingkungan sangat penting untuk mencapai tujuan keberlanjutan secara efektif. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk memfasilitasi koordinasi yang baik antara berbagai pihak yang terlibat:

1. Identifikasi Stakeholder: Identifikasi semua pihak yang memiliki kepentingan dan peran dalam pembangunan berwawasan lingkungan. Ini dapat mencakup pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, lembaga pendidikan, dan lainnya.
2. Komunikasi Terbuka: Membangun saluran komunikasi terbuka dan transparan antara semua stakeholder. Informasi harus dapat mengalir dengan lancar di antara semua pihak untuk memastikan pemahaman yang jelas tentang tujuan, rencana, dan perkembangan proyek.
3. Forum Kolaborasi: Mendirikan forum kolaborasi, seperti kelompok kerja atau pertemuan berkala, di mana semua stakeholder dapat berkumpul untuk berbagi informasi, ide, dan masalah. Ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk bekerja bersama dalam mengatasi tantangan yang dihadapi.
4. Pembagian Peran dan Tanggung Jawab: Menetapkan peran dan tanggung jawab yang jelas untuk setiap stakeholder

dalam upaya pembangunan berwawasan lingkungan. Setiap pihak harus tahu apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana mereka dapat berkontribusi.

5. Kerangka Kerja Bersama: Membangun kerangka kerja bersama yang menggabungkan komitmen dan tujuan masing-masing pihak. Kerangka kerja ini harus mencakup visi bersama, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip yang akan membimbing kerjasama.
6. Integrasi Solusi: Memastikan bahwa solusi yang diusulkan dan tindakan yang diambil mencerminkan kepentingan dan pandangan semua stakeholder. Integrasi pemikiran dan ide-ide dari berbagai pihak dapat menghasilkan solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan.
7. Rencana Aksi Bersama: Mengembangkan rencana aksi bersama yang mencakup langkah-langkah konkret yang akan diambil oleh setiap stakeholder. Rencana ini harus memiliki tujuan yang jelas, tenggat waktu, dan indikator kinerja untuk mengukur kemajuan.
8. Pemantauan dan Evaluasi: Membentuk mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk mengukur kemajuan, mengidentifikasi masalah, dan mengkaji ulang rencana aksi. Ini membantu memastikan akuntabilitas dan memungkinkan penyesuaian jika diperlukan.
9. Konsultasi Publik: Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan. Konsultasi publik memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan dan berkontribusi pada keputusan yang mempengaruhi lingkungan mereka.

Koordinasi antar stakeholder adalah komponen kunci dalam pembangunan berwawasan lingkungan yang berhasil. Dengan kerjasama yang efektif, berbagai pihak dapat bekerja

bersama untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan melindungi lingkungan alamiah.

Koordinasi yang bersinergi antara pemangku kepentingan sangat diharapkan. Pemangku kepentingan dalam pembangunan berkelanjutan antara lain pemerintah, akademisi, filantropi/ pelaku usaha, masyarakat sipil dan media. Fungsi dari kolaborasi multipihak memberikan manfaat besar yaitu: "1. Memperkuat efektivitas tindakan melalui keunggulan komparatif para pemangku kepentingan; 2. Menciptakan solusi yang sesuai dengan cakupan dan sifat masalah yang dihadapi atau masalah yang hendak dipecahkan; 3. Membawa nilai tambah bagi lembaga atau organisasi yang terlibat di dalamnya; 4. Memungkinkan proses pengambilan keputusan yang lebih terbuka dalam upaya penyediaan barang-barang publik; 5. Memaksimalkan keterwakilan, proses yang demokratis, dan tanggung jawab di antara para pemangku kepentingan; 6. Mendorong keberlanjutan dari solusi atau tindakan yang telah dilakukan."

Bab 10

Komunikasi Pembangunan Dalam Penerapannya

10.1 Pendahuluan

Komunikasi pembangunan merupakan komunikasi yang sangat berguna untuk peningkatan suatu kondisi sosial dan ekonomi yang akan dilakukan oleh negara dan khususnya negara berkembang. Komunikasi pembangunan meliputi peran dan fungsi komunikasi sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik di antara semua pihak. Komunikasi pembangunan merupakan upaya organisasi untuk meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi, biasanya menggunakan proses komunikasi dan media dalam meningkatkan taraf sosial dan ekonomi secara umum berlangsung dalam negara yang sedang berkembang. Komunikasi pembangunan memiliki beberapa peran yaitu, Sebagai alat untuk mempercepat proses pembangunan, memperbaiki kualitas hidup masyarakat, sumber daya manusia, lingkungan hidup, pemerintahan dan hubungan internasional.

Komunikasi pembangunan juga memiliki beberapa fungsi yaitu, sebagai alat untuk mempercepat proses pembangunan, memperbaiki kualitas hidup masyarakat, sumber daya manusia, lingkungan hidup, pemerintahan dan hubungan internasional. Dalam pelaksanaannya, komunikasi pembangunan dapat dilakukan pada segala macam tingkatan, dari seorang petani sampai pejabat pemerintah dan negara, termasuk juga di

dalamnya dapat berbentuk pembicaraan kelompok, musyawarah pada lembaga resmi siaran dan lain-lain. Tujuan dari komunikasi pembangunan adalah untuk menanamkan gagasan-gagasan, sikap mental, dan mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan oleh suatu negara berkembang.

Komunikasi pembangunan mempunyai peran untuk mendidik dan memotivasi masyarakat agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Beberapa fungsi komunikasi pembangunan antara lain memberikan informasi, persuasif (menggugah perasaan), mengubah perilaku, mengubah pendapat. Komunikasi pembangunan juga dapat dilakukan untuk melaksanakan rencana pembangunan suatu negara. Penerapan komunikasi pembangunan dapat dilakukan dengan menggunakan dan mengembangkan metodologi serta pendekatan yang sistematik dalam pemanfaatan komunikasi pada lingkup kegiatannya. Komunikasi pembangunan juga dapat memberikan peranan penting bagi pemberdayaan masyarakat pesisir. (Soetomo, 2013).

10.2 Memajukan Pembangunan

Komunikasi pembangunan dapat membantu memajukan pembangunan dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Komunikasi pembangunan dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan cara memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai program pembangunan yang sedang dilaksanakan. Hal ini dapat membantu masyarakat untuk lebih memahami manfaat dari program pembangunan dan merasa terlibat dalam proses pembangunan. Pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyebaran informasi sangat dibutuhkan. Hal itu mempertimbangkan belum meratanya sarana informasi dan komunikasi yang memadai di seluruh wilayah Indonesia. Terutama di wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal. Untuk itu lah diperlukan adanya Komunitas Informasi Masyarakat

(KIM) di setiap desa/kelurahan. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menyebarkan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat (Hosnan, 2007).

Strategi komunikasi yang dilakukan untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dimulai sejak peletakan dasar kemampuan analisis masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dapat memberikan manfaat seperti menuju masyarakat yang lebih bertanggungjawab, meningkatkan proses belajar, meneliminir perasaan. Konsep Pembangunan Partisipatif (KPP) merupakan suatu proses pemberdayaan pada masyarakat sehingga masyarakat mampu untuk mengidentifikasi. Dalam era baru komunikasi, muncul paradigma komunikasi pembangunan yang melibatkan partisipatif pada proses berkomunikasi sampai dengan pengambilan keputusan. Untuk meningkatkan partisipasi publik di dalam proses pengambilan kebijakan, RPJMN. 2015-2019 mengamanatkan dua strategi utama, yakni: (i) membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik; dan (ii) mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya (Manghayu, 2019).

Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat. Komunikasi pembangunan dapat membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat dalam berbagai bidang, seperti pertanian, kesehatan, dan pendidikan. Hal ini dapat membantu masyarakat untuk lebih mandiri dan dapat berkontribusi dalam pembangunan. Meningkatkan efektivitas program pembangunan. Komunikasi pembangunan dapat membantu meningkatkan efektivitas program pembangunan dengan cara memberikan informasi yang tepat dan akurat mengenai program pembangunan yang sedang dilaksanakan. Hal ini dapat membantu pemerintah untuk lebih memahami kebutuhan masyarakat dan dapat merancang program pembangunan yang lebih efektif. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat. Komunikasi

pembangunan dapat membantu meningkatkan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembangunan. Hal ini dapat membantu pemerintah untuk lebih memahami kebutuhan masyarakat dan dapat merancang program pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, komunikasi pembangunan dapat membantu memajukan pembangunan dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat, meningkatkan efektivitas program pembangunan, dan meningkatkan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat (Zahara, 2018).

10.3 Meningkatkan Taraf Sosial dan Ekonomi

Komunikasi pembangunan dapat membantu meningkatkan taraf sosial serta perekonomian secara umum dengan cara melakukan analisis populasi yaitu perencana perlu memahami kebutuhan saat ini dan masa depan dari berbagai segmen populasi. Analisis populasi membantu mengembangkan program yang memenuhi kebutuhan penduduk. Mengembangkan kerangka hukum dan kelembagaan yaitu pada tahap perencanaan, kerangka hukum dan kelembagaan perlu dibuat. Hal ini membantu memastikan bahwa program tersebut dilaksanakan sesuai kerangka hukum dan peraturan. Meninjau praktik kerja dan anggaran saat ini yaitu penting untuk meninjau praktik kerja dan anggaran saat ini untuk memastikan bahwa praktik tersebut selaras dengan tujuan program. Identifikasi tahap implementasi saat ini yaitu mengidentifikasi tahap implementasi suatu program, praktik, atau inisiatif saat ini dapat membantu staf dan pemangku kepentingan untuk lebih memahami kemajuan dan memastikan program berjalan pada jalurnya. Alat kebijakan dan advokasi yaitu laporan Pembangunan Manusia Nasional (NHDRs) berfungsi sebagai alat kebijakan dan advokasi untuk mendukung dan memberikan masukan bagi perencanaan pembangunan negara dan inisiatif kebijakan terkait (Fao, 2023).

Meningkatkan akses informasi dan pengetahuan masyarakat tentang program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan program tersebut dengan baik. Perencanaan partisipatif yaitu melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sehingga masyarakat dapat memberikan masukan dan mempengaruhi kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Penguatan kapasitas masyarakat yaitu memberikan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat agar mampu berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan. Memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan manfaat program. Membangun kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang perencanaan pembangunan desa melalui sosialisasi dan penyuluhan. Meningkatkan proses belajar masyarakat dan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap pembangunan. Menggunakan partisipasi masyarakat sebagai alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat desa. Upaya kepala desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Dengan melakukan strategi-strategi tersebut, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dan terlibat dalam proses pembangunan sehingga kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Lubis, 2009).

Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam proses pembangunan. Menumbuhkan kolaborasi lintas dan dalam jaringan yaitu pusat koordinasi dapat dibentuk untuk memfasilitasi kolaborasi antar organisasi yang berbeda dan membangun kapasitas untuk menggunakan infrastruktur yang dikembangkan. Berkolaborasi dalam proyek infrastruktur yaitu mengkoordinasikan proyek infrastruktur dapat menghasilkan penghematan biaya modal dan menurunkan biaya operasional

melalui penyediaan layanan penting. Mengembangkan infrastruktur perangkat lunak yaitu infrastruktur perangkat lunak dapat dikembangkan untuk mendukung kebutuhan koordinasi aplikasi kolaboratif. Menetapkan insentif untuk berbagi informasi yaitu untuk mewujudkan koordinasi yang efektif, insentif yang memadai, baik secara politik maupun finansial, harus dikembangkan untuk mendorong pertukaran informasi. Melakukan penelitian mengenai pengaruh tata kelola kolaboratif dan koordinasi terhadap kinerja organisasi yaitu penelitian dapat dilakukan untuk memahami dampak tata kelola kolaboratif dan koordinasi terhadap kinerja organisasi dalam proses pembangunan infrastruktur (CMAP, 2023).

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembangunan dan peran mereka dalam proses pembangunan. Pendidikan yaitu menurut sebuah penelitian terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara tingkat pendidikan masyarakat dengan kesadaran masyarakat dalam pembangunan pedesaan. Oleh karena itu, pendidikan dapat menjadi alat yang ampuh untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pembangunan. Kesadaran lingkungan yaitu salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pembangunan adalah dengan fokus pada permasalahan lingkungan hidup. Misalnya saja sebuah artikel yang membahas tentang pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak sampah plastik terhadap laut. Kesadaran hukum yaitu cara lain untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan adalah dengan fokus pada permasalahan hukum. Sebuah penelitian membahas tentang pentingnya pengembangan kesadaran hukum pada masyarakat sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat. Keterlibatan masyarakat yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan, maka penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan. Sebuah artikel membahas tentang pentingnya meningkatkan kesadaran

masyarakat tentang penggunaan dana desa di pedesaan. Pembelajaran kelompok yaitu pembelajaran kelompok dapat menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan. Sebuah artikel membahas tentang pemanfaatan pembelajaran kelompok untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan di pedesaan. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, sehingga masyarakat dapat memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengembangkan ekonomi lokal. Mengembangkan sistem pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mengajarkan keterampilan seperti menjahit, memasak, budidaya jamur tiram dan ikan lele, kreatifitas kerajinan tangan, dan perbengkelan (Widyaningsih, 2013).

10.4 Menanamkan Gagasan-Gagasan, Sikap Mental, dan Mengajarkan Keterampilan yang Dibutuhkan oleh Suatu Negara Berkembang

Tujuan komunikasi pembangunan adalah untuk menanamkan gagasan-gagasan, sikap mental, dan mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan oleh suatu negara berkembang. Dalam arti sempitnya, komunikasi pembangunan merupakan segala upaya dan cara, serta teknik penyampaian gagasan, dan keterampilan-keterampilan pembangunan yang dibutuhkan oleh suatu negara berkembang. Komunikasi pembangunan dapat membantu menanamkan gagasan-gagasan, sikap mental, dan mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan oleh suatu negara berkembang dengan cara mengorganisir proses komunikasi dan media dalam meningkatkan taraf sosial dan ekonomi secara umum.

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu komunikasi pembangunan dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga masyarakat dapat lebih aktif dan

terlibat dalam pembangunan negara mereka. Meningkatkan kesadaran masyarakat yaitu komunikasi pembangunan dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu pembangunan, seperti kesehatan, pendidikan, dan lingkungan hidup. Meningkatkan akses informasi yaitu komunikasi pembangunan dapat membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi tentang program-program pembangunan yang sedang berjalan, sehingga masyarakat dapat memahami dan mengambil bagian dalam program tersebut. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yaitu komunikasi pembangunan dapat membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat tentang berbagai aspek pembangunan, seperti pertanian, industri, dan teknologi dan meningkatkan efektivitas program pembangunan yaitu komunikasi pembangunan dapat membantu meningkatkan efektivitas program pembangunan dengan memastikan bahwa pesan-pesan yang disampaikan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka (Raharjo & Kartika, 2019).

10.5 Menghapuskan Kemiskinan, Pengangguran, dan Ketidakadilan

Komunikasi pembangunan dapat membantu menghapuskan kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari komunikasi pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Salah satu tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Komunikasi pembangunan juga dapat membantu mengatasi kesenjangan yang terjadi antara kondisi masyarakat saat ini dengan kondisi yang diharapkan. Ketimpangan komunikasi mengacu pada perbedaan dalam pembuatan, manipulasi, dan distribusi informasi di antara kelompok sosial. Ketimpangan komunikasi didefinisikan sebagai perbedaan antar kelompok sosial dalam kemampuan mereka

menghasilkan, menyebarkan, dan menggunakan informasi pada tingkat makro dan mengakses, memproses, dan bertindak berdasarkan informasi pada tingkat individu. Komunikasi yang buruk dapat memperburuk kesenjangan kesehatan dan menyebabkan hasil yang lebih buruk. Peningkatan akses terhadap jalan, komunikasi, dan pasar dapat memberikan dampak besar dalam mengurangi kemiskinan dan membuka peluang bagi masyarakat yang terpinggirkan. Mengurangi kesenjangan baik di dalam maupun antar negara memerlukan distribusi sumber daya yang adil, investasi dalam pendidikan dan pengembangan keterampilan, penerapan kebijakan fiskal, upah, dan perlindungan sosial, serta peningkatan regulasi dan pemantauan pasar dan lembaga keuangan global. Oleh karena itu, komunikasi dalam pembangunan dapat membantu mengurangi kesenjangan dengan memastikan bahwa informasi dapat diakses dan tersedia bagi semua kelompok sosial (Goals, 2023).

Selain itu, strategi komunikasi yang tepat dari pemerintah juga menjadi keniscayaan dalam penanggulangan kemiskinan. Mendesain strategi komunikasi yang mampu meningkatkan efektivitas proses koordinasi antar lembaga pemerintahan. Menyusun strategi komunikasi terkait pengentasan kemiskinan ekstrem di masyarakat. Menciptakan strategi komunikasi dalam rangka pencitraan PNPM sebagai sebuah program koordinasi pengendalian kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Menggunakan strategi komunikasi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat dalam penyebarluasan gagasan. Menerapkan teknologi informasi dalam penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah. Dengan menerapkan strategi komunikasi yang tepat, pemerintah dapat meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan memperoleh dukungan dari masyarakat. Dalam perspektif komunikasi pembangunan, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial merupakan persoalan yang penting. Strategi

komunikasi berbasis kearifan lokal juga dapat dilakukan dalam penanggulangan kemiskinan (Widodo, 2021).

10.6 Mendukung Aktivitas Pembangunan

Komunikasi pembangunan dapat membantu mendukung aktivitas pembangunan dengan cara sosialisasi pembangunan yaitu komunikasi pembangunan dapat membantu dalam menyebarkan pesan dan informasi tentang pembangunan kepada masyarakat dan pelaku pembangunan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembangunan dan memotivasi mereka untuk terlibat dalam aktivitas pembangunan. Membangun hubungan yang positif dan saling menghargai dengan masyarakat dan pelaku pembangunan. Menunjukkan bagaimana proposal atau tujuan pembangunan sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan pelaku pembangunan. Menggunakan teknik persuasi seperti pendekatan emosional, story telling, dan perangkat retorika seperti analogi, metafora, dan simile.

Memberikan visi yang menarik dan menginspirasi untuk memotivasi masyarakat dan pelaku pembangunan. Mendorong kreativitas dan inovasi dalam mencari solusi untuk masalah pembangunan. Pertukaran pesan yaitu komunikasi pembangunan melibatkan pertukaran pesan secara timbal balik antara semua pihak yang terlibat dalam pembangunan. Hal ini dapat membantu dalam memperkuat kerjasama dan koordinasi antara pihak-pihak tersebut, sehingga aktivitas pembangunan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Investasikan waktu dan sumber daya untuk membangun hubungan sosial yang kuat antara anggota tim. Hal ini dapat membantu memperkuat kerjasama dan koordinasi antar anggota tim. Buat budaya kolaboratif yang mendorong anggota tim untuk bekerja sama dan saling membantu. Hal ini dapat membantu membangun kebiasaan kolaboratif yang kuat di antara anggota tim. Gunakan alat komunikasi yang tepat untuk memfasilitasi

pertukaran pesan antar anggota tim. Alat seperti Teamwork dan Google Hangouts dapat membantu membangun ruang transparan untuk anggota tim berkomunikasi. Fasilitasi sesi tanya jawab, acara sosial, atau pertemuan virtual untuk membantu memperkuat hubungan antar anggota tim dan meningkatkan komunikasi kolaboratif. Tetapkan sumber informasi tunggal yang dapat diandalkan untuk memastikan bahwa semua anggota tim memiliki akses ke informasi yang sama. Gunakan teknik brainstorming untuk memfasilitasi kolaborasi dan inovasi di antara anggota tim. Dorong komunikasi yang jujur dan terbuka di antara anggota tim, bahkan jika itu tidak selalu mudah atau nyaman. Hal ini dapat membantu membangun kebiasaan kolaboratif yang kuat di antara anggota tim. Berikan dukungan dan dorongan kepada anggota tim untuk berpartisipasi, berinovasi, dan berkomunikasi secara terbuka. Hal ini dapat membantu membangun kebiasaan kolaboratif yang kuat di antara anggota tim.

Dialogis yaitu komunikasi pembangunan juga dapat membantu dalam memfasilitasi dialog antara masyarakat dan pelaku pembangunan. Hal ini dapat membantu dalam memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat terakomodasi dalam rencana pembangunan. Komunikasi partisipatif untuk pembangunan merupakan sarana untuk mendidik warga negara dan meningkatkan kompetensi dan kesejahteraannya. Partisipasi warga negara penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses partisipasi warga. Program keterlibatan warga yang terencana dengan baik menghubungkan harapan warga dan perencana, dan terdapat manfaat nyata yang dapat diperoleh dari program keterlibatan warga yang efektif. Teknik yang tersedia bagi para perencana untuk meminta masukan publik dalam proses perencanaan berkisar dari pertemuan dasar terbuka hingga teknik yang lebih canggih seperti teknik Delphi dan Nominal Group. Masukan

warga memberikan pengetahuan yang lebih lengkap, dan rencana tersebut akan lebih berhasil jika warga puas dengan prosesnya. Dalam konteks komunikasi pembangunan, strategi dan intervensi partisipatif digunakan untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan dan memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka diperhitungkan. Dengan memfasilitasi dialog antara masyarakat dan aktor-aktor yang terlibat dalam pembangunan, komunikasi partisipatif dapat membantu memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka terakomodasi dalam rencana pembangunan (Amanah, 2010).

10.7 Memberikan Informasi

Komunikasi pembangunan dapat membantu memberikan informasi dengan cara menyebarluaskan informasi tentang program pembangunan yang sedang berlangsung kepada masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui media massa, seperti televisi, radio, dan surat kabar, serta media sosial. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembangunan dan dampaknya terhadap kehidupan mereka. Dalam hal ini, komunikasi pembangunan dapat membantu memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Memberikan informasi tentang peluang dan cara untuk berubah. Dalam hal ini, komunikasi pembangunan dapat membantu masyarakat untuk memahami bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Membantu membangun citra informasi yang valid dan kredibel. Dalam hal ini, komunikasi pembangunan dapat membantu memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat benar dan dapat dipercaya. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dalam hal ini, komunikasi pembangunan dapat membantu memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif

dalam pembangunan dan memberikan masukan yang berharga kepada pemerintah (Zahara, 2018).

10.8 Mengubah Perilaku

Komunikasi pembangunan dapat membantu mengubah perilaku melalui beberapa cara yaitu menciptakan iklim bagi perubahan dengan membujuk nilai-nilai, sikap, mental, dan bentuk perilaku yang menunjang modernisasi. Untuk menciptakan iklim perubahan dengan mengupayakan nilai, sikap, mentalitas, dan bentuk perilaku yang mendukung modernisasi, penting untuk memahami konsep modernisasi. Modernisasi merupakan suatu proses perubahan dari sesuatu yang tidak maju menjadi sesuatu yang lebih maju. Merupakan proses transformasi menuju kemajuan atau perbaikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Modernisasi dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap masyarakat, termasuk perubahan aspek sosial dan budaya. Untuk menciptakan iklim perubahan, penting untuk memiliki pikiran terbuka terhadap pengalaman baru, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, dan memiliki cara berpikir ilmiah yang institusional dalam masyarakat. Selain itu, penting untuk memiliki pendekatan preventif dan konstruktif terhadap modernisasi. Mengajarkan dan memberikan informasi tentang cara-cara yang lebih baik dalam melakukan suatu hal. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses perubahan. Membangun kapasitas dan perubahan perilaku melalui proses interaksi seluruh warga masyarakat dan proses pemindahan pesan dari komunikator kepada penerima atau komunikan secara langsung atau melalui media. Dengan demikian, komunikasi pembangunan dapat membantu mengubah perilaku masyarakat melalui berbagai cara yang melibatkan proses interaksi, informasi, dan kesadaran (Dilla, 2007).

Bab 11

Revolusi Paradigma Pembangunan Di Indonesia

11.1 Pendahuluan

Pembangunan biasanya berarti proses perubahan atau peristiwa yang merupakan tahap baru dalam situasi yang berubah. Pembangunan secara implisit dimaksudkan sebagai sesuatu yang baik atau diinginkan jika tidak memenuhi syarat. Pembangunan biasanya berarti perbaikan, baik dalam kondisi umum sistem atau dalam beberapa elemen penyusunnya, ketika mengacu pada masyarakat atau sistem sosio-ekonomi. Ada kemungkinan bahwa pembangunan terjadi sebagai hasil dari beberapa tindakan yang disengaja yang dilakukan oleh satu individu atau oleh beberapa otoritas yang telah diperintahkan sebelumnya untuk mencapai perbaikan untuk kepentingan keduanya. Tindakan ini dapat dilihat dalam kebijakan pembangunan dan investasi swasta. Karena definisi yang luas ini, "pembangunan" sebenarnya adalah sebuah konsep yang memiliki banyak dimensi, karena setiap perbaikan sistem yang kompleks, seperti halnya sistem sosio-ekonomi yang sebenarnya, dapat terjadi dalam berbagai bagian atau dengan cara yang berbeda, dengan kecepatan yang berbeda, dan didorong oleh kekuatan yang berbeda. Selain itu, konflik tujuan (*trade-off*) dan konflik dapat terjadi karena pengembangan satu bagian sistem mengganggu pengembangan bagian lainnya. Oleh karena itu, mengukur perkembangan, yaitu menentukan apakah dan sejauh

mana suatu sistem berkembang, merupakan suatu kegiatan yang secara intrinsik bersifat multidimensi (Bellù, 2011).

Paradigma pembangunan mengacu pada seperangkat prinsip, metode, dan konsep budaya yang diakui secara universal dan digunakan oleh komunitas ilmiah pada era tertentu. Paradigma pembangunan telah berkembang seiring berjalannya waktu, dan paradigma yang berbeda telah muncul untuk mengatasi tantangan di era yang berbeda. Pergeseran paradigma terjadi ketika para ilmuwan mempertanyakan prinsip-prinsip yang dianut dan diterima selama ini sebagai "dogma" dan terus mencari paradigma baru. Keruntuhan revolusioner terjadi ketika ada titik balik yang benar dan tepat yang mengarah pada ditinggalkannya paradigma lama dan hadirnya cara baru dalam memandang dunia. Paradigma pembangunan sangat penting untuk mencapai pembangunan ekonomi global, dan paradigma yang berbeda telah diusulkan untuk mencapai pembangunan berdasarkan seperangkat prinsip yang terkodifikasi. Paradigma pembangunan merupakan model perubahan yang diterapkan pada tingkat individu, organisasi, dan masyarakat. Evolusi paradigma pembangunan global telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui keagenan manusia, khususnya para pemimpin, tetapi juga melalui interaksi ide dan institusi (Berg & Krueger, 2003).

Ada beberapa macam paradigma pembangunan yang muncul dari waktu ke waktu untuk mengatasi tantangan di berbagai era. Berikut merupakan paradigma utama pembangunan yaitu, modernisasi/paradigma dominan, paradigma ini muncul setelah Perang Dunia II dan berfokus pada industrialisasi, urbanisasi, dan modernisasi sebagai kunci pembangunan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa semua masyarakat pada akhirnya akan mengikuti jejak negara-negara industri maju di Barat. Paradigma ketergantungan, paradigma ini muncul pada tahun 1960an dan menantang paradigma modernisasi. Argumennya adalah keterbelakangan negara-

negara dunia ketiga bukan disebabkan oleh kurangnya modernisasi, melainkan karena ketergantungan mereka pada negara-negara maju. Paradigma alternatif/pembangunan lain/partisipatif, paradigma ini muncul pada tahun 1970an dan menekankan perlunya pendekatan pembangunan yang lebih partisipatif. Fokusnya adalah pada pemberdayaan masyarakat lokal dan pelibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Paradigma kebutuhan dasar, paradigma ini muncul pada tahun 1970an dan menekankan perlunya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin. Fokusnya adalah pada penyediaan akses terhadap makanan, tempat tinggal, layanan kesehatan, dan pendidikan. Paradigma pembangunan manusia, paradigma ini muncul pada tahun 1990an dan menekankan pentingnya pembangunan manusia sebagai kunci pembangunan. Program ini berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan layanan dasar lainnya. Paradigma pembangunan berkelanjutan, paradigma ini muncul pada tahun 1990an dan menekankan perlunya pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. Ini berfokus pada keseimbangan pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan (Bellù, 2011).

11.2 Dimensi Pembangunan

Tidak jarang, fokus para pelaku pembangunan berada pada bagian-bagian tertentu dari sistem atau karakteristik tertentu, meskipun pengembangan sistem sosial ekonomi dapat dianggap sebagai usaha yang mencakup semua hal untuk tujuan praktis, khususnya untuk pengelolaan pembangunan dan pembuatan kebijakan. Untuk mencapai tujuan ini, "pembangunan" dikualifikasikan dan dispesifikasikan dalam berbagai cara. Pembangunan ekonomi yaitu, peningkatan cara penggunaan sumber daya alam dan barang serta jasa di dalam

(atau oleh) sistem untuk menghasilkan barang dan jasa baru guna menyediakan tambahan konsumsi dan/atau kemungkinan investasi bagi anggota sistem. untuk menghasilkan barang dan jasa baru guna menyediakan tambahan konsumsi dan/atau kemungkinan investasi bagi anggota sistem. Sumber daya alam merupakan salah satu faktor produksi yang digunakan dalam pembangunan ekonomi. Sumber daya alam digunakan sebagai faktor produksi dalam rangka menghasilkan output baik berupa barang maupun jasa. Pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam yang tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan pada akhirnya akan berdampak negatif pada lingkungan itu sendiri. Pembangunan manusia yaitu pembangunan yang berpusat pada masyarakat, yang fokusnya adalah pada peningkatan berbagai dimensi yang mempengaruhi kesejahteraan individu dan hubungan mereka dengan masyarakat (kesehatan, pendidikan, hak, kemampuan, pemberdayaan, dll.). Pembangunan manusia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kemampuan individu, komunitas, dan masyarakat melalui pendidikan, pemberdayaan, dan peningkatan peluang berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Pembangunan manusia juga lebih berorientasi pada prinsip keadilan sosial ketimbang pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi harus bersinergi dengan pembangunan sosial untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang mempertimbangkan sistem sosial ekonomi dari sudut pandang jangka panjang untuk memastikan bahwa perbaikan yang dilakukan dalam jangka pendek tidak akan berdampak negatif pada status atau pengembangan masa depan sistem; dengan kata lain, pembangunan akan "berkelanjutan" dari perspektif lingkungan, sosial, keuangan, dan lainnya. Lembaga keuangan dimotivasi oleh konsep keuangan berkelanjutan untuk meningkatkan aliran modal mereka ke proyek dan sektor yang ramah lingkungan,

inklusif, dan hijau. Pembangunan berkelanjutan dilakukan oleh negara agar dapat meningkatkan kualitas hidup dalam banyak aspek. Pembangunan yang dilakukan berkelanjutan ini mampu membuat kesejahteraan hidup meningkat. Selain itu, ada lima indikator berkelanjutan yang penting untuk diketahui seperti keberlanjutan ekologis, keberlanjutan di bidang ekonomi, keberlanjutan sosial dan budaya, keberlanjutan politik, keberlanjutan pertahanan keamanan. Industri jasa keuangan juga turut berperan dan mendukung upaya pencapaian SDGs melalui penerapan prinsip keuangan berkelanjutan dan aspek Environmental, Social and Governance (ESG) dalam operasional perusahaan jasa keuangan. Agar pembangunan berkelanjutan dapat dicapai, penting untuk menyelaraskan tiga elemen inti: pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, dan perlindungan lingkungan hidup. Pembangunan territorial yaitu pengembangan suatu wilayah (ruang) tertentu yang dapat dicapai dengan memanfaatkan potensi sosio-ekonomi, lingkungan hidup dan kelembagaan tertentu dari wilayah tersebut, dan hubungannya dengan pihak-pihak eksternal. Pembangunan daerah pada tahun 2018 akan didorong melalui pertumbuhan peranan sektor jasa-jasa, sektor industri pengolahan, dan sektor pertanian. Analisis potensi wilayah (ANPOTWIL) dapat dilakukan untuk mengetahui potensi lingkungan yang dapat digunakan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Konsep wilayah dan pewilayahan dalam perencanaan tata ruang wilayah harus mempertimbangkan kemampuan wilayah dan pembangunan di satu pihak. Pengaturan wilayah kepulauan dapat mendorong pembangunan berkeadilan sekaligus membangkitkan aktifitas sosial-ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi harus didukung dengan kemampuan fiskal yang memadai agar pembangunan territorial dapat berhasil (Mundlak, 2000).

11.3 Pertumbuhan Ekonomi untuk Pengurangan Kemiskinan dan Kesenjangan

Dalam menganalisis hubungan antara pertumbuhan dan ketimpangan, Kutznets (1955) bertanya-tanya apakah hubungan terbalik berbentuk U antara pertumbuhan dan ketimpangan di negara-negara maju yang lebih tua kemungkinan besar akan terulang dalam arti bahwa pada fase-fase awal perekonomian industrialisasi di negara-negara terbelakang akan cenderung melebarkan kesenjangan pendapatan sebelum kekuatan-kekuatan yang menyamakan kedudukan menjadi cukup kuat untuk menstabilkan dan kemudian mengurangi kesenjangan pendapatan. Beliau secara khusus membahas isu keterjangkauan terhadap kemungkinan peningkatan ketimpangan, sebagai harga yang harus dibayar untuk mencapai pertumbuhan, dalam konteks tingkat pendapatan yang sangat rendah. Bahkan, ia menggarisbawahi perlunya apa yang, hampir empat puluh tahun kemudian, disebut sebagai "pertumbuhan yang berpihak pada masyarakat miskin": "Bagaimana kerangka kelembagaan dan politik masyarakat terbelakang atau proses pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi dapat dimodifikasi agar menguntungkan masyarakat miskin?" peningkatan berkelanjutan ke tingkat kinerja ekonomi yang lebih tinggi namun menghindari solusi sederhana yang fatal dari rezim otoriter yang akan menggunakan penduduk sebagai sasaran empuk dalam perjuangan mencapai pencapaian ekonomi? Bagaimana cara meminimalkan biaya transisi dan menghindari dampak yang besar berupa ketegangan internal, inefisiensi jangka panjang dalam menyediakan sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai individu – yang mana hal ini diperlukan oleh inflasi kekuasaan politik yang diwakili oleh rezim otoriter?" Hampir dua dekade kemudian, para ekonom secara sistematis mulai mengeksplorasi hubungan antara pertumbuhan suatu sistem ekonomi, yang pada dasarnya diukur berdasarkan variasi PDB, dan pengentasan kemiskinan. Chenery

dan Ahluwalia (1974) memelopori penelitian ini dengan mengusulkan model "redistribusi dengan Pertumbuhan" dan menggarisbawahi pentingnya menerapkan proses redistribusi terhadap pertumbuhan, jika kemiskinan harus dikurangi.

Pandangan para ekonom dan lembaga pembangunan yang memandang pertumbuhan sebagai unsur pembangunan hanya jika dikaitkan dengan distribusi pendapatan yang adil, mencerminkan apa yang disebut paradigma pembangunan "pertumbuhan yang memihak masyarakat miskin (berbasis luas atau seimbang)". Berdasarkan berbagai kontribusi yang diulas di atas, kita dapat mengatakan bahwa secara keseluruhan, perdebatan di antara para pendukung pandangan ini adalah tentang bagaimana mendefinisikan dan mengukur pertumbuhan yang berpihak pada masyarakat miskin, berbasis luas, dan seimbang serta bagaimana mencapainya. Perdebatan seputar poin terakhir berkisar antara: i) bobot relatif dari promosi kegiatan skala kecil, terutama pertanian skala kecil, pengolahan hasil pertanian di daerah pedesaan dan kegiatan industri skala kecil di daerah perkotaan; ii) dukungan terhadap kegiatan berskala besar, yang juga didanai oleh Penanaman Modal Asing (FDI), yang harus dikaitkan dengan lembaga-lembaga yang kuat yang memastikan berfungsinya pasar faktor dan sumber daya alam (modal, tenaga kerja, tanah, air, bijih, minyak, dll.) untuk memberikan hibah yang layak kondisi kerja dan remunerasi; tidak terkurasnya basis sumber daya alam dan keberlanjutan sosial melalui sistem fiskal yang efisien; dan iii) promosi kebijakan sosial, jaring pengaman dan dukungan langsung kepada masyarakat termiskin melalui penyediaan layanan (kesehatan, pendidikan, perumahan, dll.) yang terkait dengan kebijakan untuk memastikan inklusi, pemberdayaan, dan kemandirian lapisan masyarakat yang paling lemah (Bellù, 2011).

11.4 Pembangunan Pertanian untuk Pertumbuhan Ekonomi

Dalam suatu sistem perekonomian, beberapa sektor memainkan peran penting sebagai "mesin pertumbuhan" dibandingkan sektor lainnya. Secara umum diakui bahwa pembangunan sektor pertanian sangat penting di negara-negara kurang maju untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara umum karena berbagai alasan, yaitu :

1. Terintegrasi di sektor hilir karena memasok komoditas primer ke rantai nilai nasional tertentu (agroindustri, tekstil, dan yang terbaru, biofuel), sehingga memungkinkan pembangkitan dan distribusi nilai tambah nasional. Hilirisasi industri agro merupakan program yang penting untuk memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dengan memasok komoditas primer ke rantai nilai nasional tertentu seperti agroindustri, tekstil, dan biofuel. Program ini juga bertujuan untuk memungkinkan pembangkitan dan distribusi nilai tambah nasional. Selain itu, hilirisasi juga dapat menciptakan ekosistem industri hulu dan hilir yang berkelanjutan serta kompetitif. Contoh dari hilirisasi industri adalah industri hilir berbasis kelapa sawit yang terintegrasi di Sumatera Utara. Hilirisasi juga dapat meningkatkan keunggulan komparatif pada komoditas ekspor unggulan Indonesia. Oleh karena itu, analisis rantai pasok dan nilai tambah sangat penting dalam menentukan strategi pengembangan usaha perdagangan komoditas seperti kelapa (Febrianto *et al.*, 2022).
2. Mendistribusikan pendapatan kepada masyarakat yang pola konsumsinya terutama berorientasi pada komoditas produksi nasional sehingga menimbulkan multiplier effect. Meningkatkan produksi komoditas nasional, dengan meningkatkan produksi komoditas nasional maka ketersediaan komoditas tersebut di pasaran akan meningkat sehingga berdampak pada penurunan harga. Hal ini akan

membuat harga komoditas tersebut lebih terjangkau bagi masyarakat sehingga akan meningkatkan konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut. Mempromosikan komoditas nasional, mempromosikan komoditas nasional melalui kampanye iklan dan pemasaran dapat meningkatkan permintaannya di kalangan masyarakat. Hal ini akan berdampak pada peningkatan konsumsi mereka sehingga menimbulkan multiplier effect berupa peningkatan pendapatan produsen dan masyarakat yang terlibat dalam proses produksi. Memberikan insentif, pemberian insentif kepada produsen komoditas nasional dapat mendorong mereka untuk meningkatkan produksinya. Hal ini dapat dilakukan melalui keringanan pajak, subsidi, atau bentuk bantuan keuangan lainnya. Melakukan penelitian, melakukan penelitian terhadap pola konsumsi masyarakat dapat membantu mengidentifikasi komoditas yang banyak diminati. Hal ini dapat membantu dalam menentukan sasaran produksi komoditas-komoditas tersebut, sehingga akan meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauannya. Meningkatkan akses terhadap kredit, peningkatan akses kredit bagi para produsen komoditas nasional dapat membantu mereka meningkatkan produksinya. Hal ini dapat dilakukan melalui program pemerintah atau melalui kemitraan dengan lembaga keuangan (Suryani & Rachman, 2008).

3. Memproduksi pangan untuk pasar nasional, berkontribusi terhadap ketersediaan pangan di tingkat nasional, sehingga mengurangi atau menghilangkan kebutuhan untuk mengimpor barang-barang penting dan berkontribusi untuk menjaga harga pangan tetap rendah untuk memberi makan angkatan kerja di sektor lain. Memproduksi pangan untuk pasar nasional berkontribusi terhadap ketersediaan pangan di tingkat nasional, mengurangi atau menghilangkan kebutuhan untuk mengimpor barang-barang penting dan

berkontribusi dalam menjaga harga pangan tetap rendah untuk memberi makan tenaga kerja di sektor lain. Indonesia, seperti negara lain, perlu menjaga ketahanan pangan untuk memastikan bahwa masyarakatnya memiliki akses terhadap pangan yang cukup dan beragam, aman, bergizi, dan terjangkau. Pemerintah telah menjadikan ketahanan pangan sebagai prioritas dalam agenda pembangunan nasional, dengan program-program yang ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan. Untuk mencapai ketahanan pangan, pemerintah telah menerapkan berbagai strategi, antara lain peningkatan produktivitas dalam negeri, substitusi impor, dan perbaikan sistem distribusi. Dengan memproduksi pangan yang cukup di dalam negeri, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada impor dan menjaga kestabilan harga pangan, yang penting untuk memenuhi kebutuhan pangan tenaga kerja di sektor lain

4. Dapat menyediakan mata uang asing melalui ekspor pertanian, memungkinkan impor barang-barang industri dan termasuk peralatan modal untuk sektor industri;
5. Merupakan sumber utama angkatan kerja berbiaya rendah, ketika perubahan teknologi di bidang pertanian menyebabkan pelepasan tenaga kerja yang tersedia bagi industri dan jasa.
6. Berkontribusi untuk menghasilkan penghematan dalam sistem perekonomian yang dapat membiayai pembentukan dan/atau konsolidasi sektor industri.

Argumen-argumen ini didasarkan pada temuan-temuan dari banyak penelitian mengenai pembangunan dan pertumbuhan pertanian, yang dilakukan selama enam puluh tahun terakhir. Tepat setelah Perang Dunia Kedua, para ekonom yang menangani isu-isu pembangunan mulai mengkonsolidasikan visi mereka tentang 'pertanian' (yang secara

luas dimaksudkan sebagai serangkaian kegiatan tradisional, subsisten dan pedesaan) sebagai sektor tambahan yang berfungsi untuk pengembangan sektor industri yang lebih modern (Mundlak, 2000).

Secara keseluruhan, peran sektor pertanian (pedesaan) dipandang sebagai pemasok pasif tenaga kerja berupah rendah untuk mendorong pertumbuhan sektor industri, atau sebagai sektor yang jika dikelola dengan baik, dapat memberikan pendapatan dan meningkatkan distribusi pendapatan, menghasilkan tabungan dan pendapatan ekspor, untuk melayani perekonomian secara keseluruhan. Dalam kasus pertama, unsur utama pembangunan adalah penciptaan sektor industri yang kokoh dengan tujuan menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih efisien. Kedua, perkembangan seluruh sistem sosial ekonomi ditopang oleh perkembangan sektor pertanian. Hal ini dapat dilihat sebagai paradigma pembangunan "berbasis pertanian". Paradigma ini harus lebih berkualitas jika pertumbuhan pertanian memberikan kontribusi langsung terhadap berbagai dimensi pembangunan sosial-ekonomi. Secara khusus, hal ini harus mempertimbangkan jenis pertanian apa, dan dalam konteks apa, yang secara langsung berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dan dimensi pembangunan lainnya, selain kontribusinya terhadap pengentasan kemiskinan melalui dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Bagaimanapun juga, dalam paradigma pembangunan berbasis Pertanian, meskipun sektor pertanian berperan sebagai mesin pembangunan, sektor industri juga memainkan peran pendukung, setidaknya pada tahap awal proses pembangunan. Namun, sebagian besar pendukung pertanian selalu melihat sektor ini sebagai mesin sementara, mengingat masa-masa yang lebih baik, yaitu tahap selanjutnya dari proses pembangunan (Anríquez & Stamoulis, 2007).

11.5 Perubahan Teknologi untuk Pertumbuhan Ekonomi

Peran pemerintah masih kontroversial ketika mengasumsikan teknologi endogen. Di satu sisi, pengeluaran pemerintah untuk penelitian dan pengembangan berkontribusi menghasilkan pengetahuan baru dan mendukung penemuan dan penerapan inovasi. Demikian pula, pengeluaran untuk menegakkan hak milik akan memungkinkan agen swasta yang berinvestasi dalam inovasi mendapatkan keuntungan dari investasi mereka, sehingga merangsang inovasi baru. Di sisi lain, tingkat perpajakan yang berlebihan dapat menghambat kegiatan perekonomian karena akan mengurangi tingkat pengembalian investasi swasta (Barro, 1990).

Implikasi "paradigma pembangunan berbasis Pertumbuhan Endogen" terhadap proses pembangunan beragam dan mungkin kontroversial. Karena dampak limpahan dari investasi dan/atau proses belajar sambil melakukan, yang menurut definisinya hanya terjadi jika masyarakat berinvestasi dan/atau melakukan sesuatu, paradigma ini menyisakan permasalahan yang belum terselesaikan tentang bagaimana memulai proses pembangunan berbasis pertumbuhan. Jawaban yang siap pakai dapat bergantung pada investasi asing dan transfer teknologi, yang mungkin terkait dengan perdagangan internasional pada tingkat tertentu. Transfer teknologi mungkin berguna untuk memulai proses produksi dan akumulasi, baik dalam hal modal maupun pengetahuan sambil melakukan pembelajaran. Walaupun mungkin bersifat paradoks, proses pembangunan berbasis pertumbuhan endogen harus bergantung pada proses berbasis pertumbuhan eksogen untuk memulai usahanya, terutama dalam situasi di mana aktivitas ekonomi dapat diabaikan (misalnya, situasi pasca-konflik, pasca-darurat). Namun pendekatan berbasis pertumbuhan endogen menimbulkan pertanyaan kuat mengenai konsep "transfer teknologi" itu sendiri. Modalitas produksi yang asing, informasi pengetahuan yang disimpan atau disamarkan oleh investor,

terkait dengan hilangnya kendali atas proses akumulasi modal oleh aktor lokal, misalnya, karena ekspatriasi keuntungan secara diam-diam, dapat menghambat akumulasi modal. Hal ini juga dapat mempengaruhi generasi inovasi endogen dengan menghalangi dinamika belajar sambil melakukan, menghambat pemberdayaan aktor lokal dan membahayakan pemanfaatan sumber daya lokal secara tepat.

Perkembangan teknologi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Berikut merupakan beberapa dampak positif dari perubahan teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu meningkatkan produktivitas dunia industri baik dari aspek teknologi industri maupun pada aspek jenis produksi. Untuk meningkatkan produktivitas di dunia industri, baik aspek teknologi maupun produksi perlu ditingkatkan. Kemajuan teknologi dapat berperan besar dalam meningkatkan produktivitas di sektor industri. Penerapan teknologi Industri 4.0 seperti Artificial Intelligence (AI) dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas pada industri manufaktur. Otomatisasi dapat membuat proses manufaktur lebih dapat diprediksi dan efisien, sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Pemanfaatan teknologi dalam dunia usaha juga dapat membuat transaksi menjadi lebih mudah dan cepat sehingga dapat berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai manfaat tersebut, diperlukan penelitian dan inovasi. Kesimpulannya, kemajuan teknologi dapat meningkatkan produktivitas dunia industri baik dari aspek teknologi maupun produksi.

Investasi dan reinvestasi dapat menghasilkan peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Investasi dapat meningkatkan laju tren pertumbuhan ekonomi jangka panjang dengan meningkatkan produktivitas dan meningkatkan daya saing suatu perekonomian. Investasi bisnis cenderung cukup fluktuatif, namun peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dapat menyebabkan peningkatan investasi yang besar.

Reinvestasi adalah praktik menggunakan distribusi pendapatan yang diperoleh dari suatu investasi untuk membeli saham atau unit tambahan, daripada menerima distribusi dalam bentuk tunai. Reinvestasi adalah cara terbaik untuk meningkatkan nilai investasi saham, reksa dana, atau dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) secara signifikan seiring berjalannya waktu. Investasi pemerintah dapat digunakan untuk memacu pertumbuhan produktivitas dan setidaknya sama produktifnya dengan investasi swasta. Memperluas stok modal melalui investasi mengarah pada pertumbuhan ekonomi (Pettinger, 2019).

Memfasilitasi jarak dan waktu dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur, Infrastruktur berperan penting dalam memfasilitasi transformasi perekonomian dan mendorong pemulihan perekonomian nasional. Infrastruktur yang berkualitas dan memadai memerlukan pendanaan yang besar dan tidak dapat dipenuhi hanya dengan anggaran pemerintah saja. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan pihak swasta untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Teknologi Informasi, Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kendala jarak dan waktu dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Berbagai aplikasi dapat diciptakan untuk memudahkan kegiatan perekonomian. Selain itu, perkembangan teknologi digital dapat mendorong perekonomian suatu negara menuju ekonomi digital. Sektor Keuangan, Sektor keuangan memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Sektor keuangan dapat menjadi lokomotif pertumbuhan sektor lainnya. Pembangunan infrastruktur berkelanjutan, Pembangunan infrastruktur berkelanjutan menjadi salah satu kunci pemulihan ekonomi global pasca pandemi COVID-19. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan transisi menuju ekonomi yang lebih ramah lingkungan (Wuryasti, 2022).

Untuk meningkatkan kemampuan suatu negara dalam menyediakan berbagai jenis barang dan jasa bagi warganya serta meningkatkan daya saing, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemampuan suatu negara dalam menyediakan berbagai jenis barang dan jasa bagi warganya serta meningkatkan daya saing, pemerintah perlu fokus pada perbaikan faktor-faktor tersebut di atas. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan kebijakan yang mendorong inovasi, penelitian dan pengembangan, serta pengembangan industri kreatif. Selain itu, pemerintah dapat melibatkan UMKM dalam perekonomian nasional untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Menciptakan peluang baru, Dengan menerapkan strategi tersebut, suatu negara dapat menciptakan peluang baru bagi warganya dan meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Misalnya dengan mengembangkan industri kreatif, suatu negara dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya saingnya di pasar global. Selain itu, dengan melibatkan UMKM dalam perekonomian nasional, suatu negara dapat meningkatkan pertumbuhan ekonominya dan memberikan lebih banyak peluang bagi warganya untuk memulai usaha sendiri. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk fokus menerapkan strategi tersebut guna menciptakan peluang baru bagi negara dan warganya (Todaro *et al.*, 2003).

DAFTAR PUSTAKA

Adityo, D.S., Veronica P., Joy E., & Ivan S., L.P.O. (2019). Upaya Indonesia Mencapai Target Sustanable Development Goals Bidang Pendidikan di Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat (2014-2019). *Jurnal Polinter*. Vol.5(1), 1–27.

Ahmadi, A. (2012). Psikologi Sosial Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.

Alamsyah, M.H., Ramadhani, F., & Azizah, N. (2020). Tinjauan Hutang Negara dalam Perspektif Islam. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*. Vol.1(1), 62. https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1924.

Amanah, S. (2010). Peran Komunikasi Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*. Vol. 08(1).

Anadon, L.D., Chan, G., Harley, A.G., Matus, K., Moon, S., Murthy, S.L., & Clark, W.C. (2016). *Making technological innovation work for sustainable development*. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. Vol.113(35), 9682–9690. https://doi.org/10.1073/pnas.1525004113.

Anderson, B., Böhmelt, T., & Ward, H. (2017). *Public opinion and environmental policy output: A cross-national analysis of energy policies in Europe. Environmental Research Letters*. Vol.12(11). https://doi.org/10.1088/1748-9326/aa8f80.

Anderson, T. (2012). *Development Strategy*. 257–283.

Anríquez, G. & Stamoulis, K. (2007). *Rural development and poverty reduction: Is Agriculture Still a Key? e-JADE, FAO- Rome.*

Arfani, L. (2016). Mengurai hakikat pendidikan, belajar dan pembelajaran. *Pelita Bangsa Pelestari Pancasila*. Vol.*11*(2), 81–97.
https://pbpp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JPB/article/view/

5160.

Arlena, W.M., Sidharta, V., & Azwar. (2023). Komunikasi Partisipatif Warga Ibu Kota dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. *Ekspresi dan Persepsi*.

Asaf, A.S. (2020). Upaya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*. Vol.*2*(2), 26–31. https://doi.org/10.47532/jic.v2i2.126.

Astuti, S.I. (2001). Pendekatan Partisipatif Lewat Pemberdayaan Rakyat: Alternatif Bagi Pembangunan Berwawasan Otonomi Daerah. *Mimbar*, *2*(XVII), 212–237.

Ayu, M., Octavanny, D., Budiantara, I.N., & Ratnasari, V. (2017). Pemodelan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Menggunakan Pendekatan Regresi Semiparametrik Spline. *Jurnal Sains dan Seni ITS*. Vol.6(1), 1–7. https://media.neliti.com/media/publications/140032-ID-pemodelan-faktor-faktor-yang-memengaruhi.pdf.

Aziza, T.N. (2014). Menilik Kebijakan Pembangunan Pertanian. *Borneo Administrator*. Vol.10(2), 1–20.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2015). Republik Indonesia Indeks Pembangunan Manusia 2014. In *07310.1517*. Indonesia : Badan Pusat Statistik.

Bakri, N., Agnesia, P., & Ukas. (2022). Memahami Pengaturan Perkembangan dan Kebijakan Hukum Lingkungan. *Jurnal Cahaya Keadilan*. Vol.8–27.

Bales, R. F. (1950). *Interaction Process Analysis : A Method For The Study of Small Groups*. Mass. *Addison-Wesley Press.*

BAPPENAS. (2010). Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Nasional di Indonesia 2010. Jakarta (ID): BAPPENAS RI.

BAPPENAS. (2017). Peta Jalan *Sustainable Development Goals* (SDGS) di Indonesia. Kementerian PPN/Bappenas.

BAPPENAS. (2019). *Sekilas Sustainable Development Goals* (SDGS). https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/.

Barro, R. (1990). *Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth, Journal of Political Economy.* Vol.98, S103-S125.

Beaulieu, B., & Cordes, S. (2013). *Extension Community Development: Building Strong, Vibrant Communities. Journal of Extension*. Vol.51(5). https://archives.joe.org/joe/2014october/comm1.php.

Bellù, L.G. (2011). *Development and Development Paradigms a (Reasoned) Review of Prevailing Visions. Easypol Resources for policy making*. https://www.fao.org/3/ap255e/ap255e.pdf.

Berg, A. & Krueger, A. (2003). *Trade Growth and Poverty: A Selective Survey, in: Annual Conference on Development Economics: The New Development Agenda.*

BKKN (2016). Pengantar Rapat Pengendalian Program 2016 BKKN Provinsi Aceh.

Chalid, P. (2006). Materi Pokok Teori dan Isu Pembangunan. Jakarta (ID): Universitas Terbuka.

Chenery, H. & Ahluwalia, M. (1974). *Redistribution with Growth. Oxford: Oxford University Press.*

CMAP. (2023). *Coordinate infrastructure operations and maintenance.* https://www.cmap.illinois.gov/2050/governance/coordinate-infrastructure-maintenance.

Dahniar. (2022). Sistem Pendidikan, Pendidikan sebagai Sistem dan Komponen serta Interpendensi antar Komponen Pendidikan. *Jurnal Literasiologi*. Vol.7(3), 12.

Dahuri, R., & Nugroho, I. (2012). Pembangunan wilayah :

perspektif ekonomi, sosial dan lingkungan. LP3ES.

Daman. (2013). Metode *Reflect* dalam *Community Development* (CD). *Journal of Community Development*. Vol.*53*(9), 1–11.

Dilla, S. (2007). Komunikasi Pembangunan: Pendekatan Terpadu. Bandung: Refika Offsed.

Dumasari. (2020). Pembangunan Pertanian Mendahulukan yang Tertinggal. Yogyakarta: *Pustaka Pelajar*.

Eko, S. (2014). *Desa Membangun Indonesia*. Cetakan Pertama FPPD.

Eramuri, K.M. (2016). Tinjauan Konsep *Community Development.* https://id.linkedin.com/pulse/tinjauan-konsep-community-development-karel-eramuri.

FAO. (2023). Planning and Implementation. https://www.fao.org/3/X2465E/x2465e0b.htm.

Fatmawati. (2011). Kemitraan dalam Pelayanan Publik: Sebuah Penjelajahan Teoritik. *Otoritas. Vol.1 (2)*.

Febrianto, O.H., Ismaya, B.I., Aufar, F., Anastasia, M.K., Maruntum, A.N., Simanjuntak, J.D., & Azaria, S.P. (2022). Penguatan Struktur Ekonomi Indonesia: Tinjauan *Local Value Chain,* Hilirisasi, dan Industri Hijau. Bank Indonesia Institute. Jakarta. ISBN: 978-623-5662-42-8. 978-623-5662-43-5.

Festinger, L. (1957). *A Theory of Cognitive Dissonance*. Stanford *University Press.*

Flor, A. (2007). *Development Communication Praxis*. Phlilippines by the UP Open University Office of Academic Support and Instructional Services.

Friedmann, J. (1992). *Empowerment: The Politics of Alternative Development*.

Future. (2022). *Community development*. https://www.future.edu/2022/10/community-development/.

Galtung, J. (1980). *The True World, A Transnational Perspective*.

Goals. (2023). *Goal 10: Reduce inequality within and among countries*. https://www.un.org/sustainabledevelopment/inequality/.

Hadiyanto. (2008). Komunikasi Pembangunan Partisipatif: Sebuah Pengenalan Awal. *Jurnal Komunikasi Pembangunan.* Vol.6(2).

Harahap, A.M. (2020). Pengantar Hukum Ketenaga Kerjaan. *Literasi Nusantara*.

Hardojo, A.P. & Bahagijo, S. (2008). *Mendahulukan Si Miskin: Buku Sumber bagi Anggaran Pro Rakyat.* Yogyakarta (ID): Perkumpulan Prakarsa LkiS.

Hasan, K. (2015). Komunikasi Sosial dan Pembangunan (Ksp) *People Centred Development.*

Hasan, M., & Muhammad, A. (2018). Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat : Strategi Pembangunan Manusia Dalam Persepektif Ekonomi Lokal. http://eprints.unm.ac.id/10706/1/.

Hedebro, G. (1979). *Communication and Social Change in Development Nations : A Critical View. Part I and Part II. Stockholm: Economisca Forskining Institute*

Hiariej, E. (2006). Perkembangan Kapitalisme Negara di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol.10(1), 91–120. https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/11024/8265%0Ahttps://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/11024.

Hidayat, M. (2006). Paradigma Lerner Versus Konstruksi Gender. *Mediator*. Vol.7 No 1, 115–123.

Hornby, A.S. (2017). *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English- Revised and Update. New York: Oxford University Press.*

Hosnan. (2007). Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah. Jurnal Membangun Indonesia dari Daerah: Partisipasi Publik dan Politik Anggaran Daerah. Jakarta: *JICA.*

Kaharudin, M.R. (2020). *Social Safety Net* Pada Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kota Palembang. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*. Vol.8(1), 99–121. https://doi.org/10.24952/masharif.v8i1.2591.

Karim, A. (2017). Mengembangkan Kesadaran Melestarikan Lingkungan Hidup berbasis Humanisme Pendidikan Agama. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*. Vol.12(2).

Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2015). Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-1019. Kominfo Jakarta.

Kementerian Tenaga Kerja RI. (2003).Undang-Undang RI No 13 tahun 2003. Ketenagakerjaan.

Kemhan. (2016). HAM adalah Hak Dasar Manusia yang Harus Dilindungi Negara dan Pemerintah. https://www.kemhan.go.id/2016/05/18/ham-adalah-hak-dasar-manusia-yang-harus-dilindungi-negara-dan-p.html.

Kerja, D.T. (2015). Rencana Strategis (Perubahan) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019. https://doi.org/351.077.

Khajar, Y.I. (2005). Analisis Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja Pegawai Kejaksaan Tinggi di Yogyakarta. *JRBI*. Vol.1(1).

Kincaid, L.D. (1979). *East-West Communication Institute The*

Convergence Model of 1777 East-West Road Honolulu , Hawaii 96848. Vol.18, 4–52.

Komarudin & Yudo, S. (2009). Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Kasus Teknologi Pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah Domestik. *JAI, 5 (1)*.

Korten, D.C. (1984). *People Centered Development West. Harford: . Kumarian Press.*

Korten, D.C. 2001. *Menuju Abad 21: Tindakan Sukarela dan Agenda Global* (terjemahan). *Yayasan Obor Indonesia.* Jakarta.

Korten, D.C., & Sjahrir. (1993). Pembangunan Berdimensi Kerakyatan. *Yayasan Obor Indonesia dan Pustaka Sinar Harapan.*

Kumoro. (2015). Pembangunan: Definisi dan Indikator. *Universitas Gajah Mada.*

Kuncoro, M. (2004). Otonomi dan Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Jakarta: Erlangga.

Kurniawan, M.A., Soemarno, & Purnomo, M. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Mojokrapak, Kecamatan Tembelang, Jombang. *J-PAL*, Vol.6(2), 89–98.

Kuznets, S. (1955). Economic Growth and Income Inequality Volume XLV. The American Economic Review.

Lerner, D. (1978). Memudarnya Masyarakat Tradisional. Muljarto Tjokrominoto (Ed). *Gajah Mada University Press.*

Lidhyatma, G. (2013). Pelaksanaan Transparansi dan Partisipasi dan Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Blitar (Studi di Bappeda Kabupaten Blitar). Malang: *FH Universitas Brawijaya.*

Limbong, R.J., Farikhati, N., Hartanto, M.F.B., Yuli, I., Ayunda, Z.M., Nike, D., Ramadhan, A., Novitasari, M.I., Fardhani, L.A., & Saputri, F.I.. (2020). Kajian Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Kelompok Rentan di Indonesia. Komnas HAM RI. Jakarta. ISBN: 978-623-94599-2-5.

Little, A.W., & Green, A. (2009). *Successful globalization, education and sustainable development. International Journal of Educational Development. Vol.29*(2), 166–174.

Lubis, A. (2009). Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. *Jurnal Tabularasa PPS Unimed.* Vol.6 No.2.

Lubis, D.P. (2010). Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mendukung Pembangunan Pertanian Berkelanjutan. *Proceedings of IPB's Seminars*.

Manghayu, A. (2019). Perencanaan Pembangunan Partisipatif dalam Penerapan E-Musrenbang. Jurnal Manajemen Pembangunan. 5(2): 95 – 115.

McClelland, D. (1961). *The Achieving Society*. D. Van Nostrand Company, In.

McPhail, TL. 2009. *Development Communication: Reframing the Role of the Media*. West Sussex (GB). J Wiley.

Meutia, I.F. (2013). Analisis Kebijakan Publik. AURA. Bandar Lampung. ISBN : 978-602-6739-62-9.

Moeljarto. (1993). *Politik Pembanguan Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strate*. PT. Tiara Wacana :

Moemeka, A. A. (1997). Development Communication for Developing Societies: Facing the Realities. Gazette (Leiden, Netherlands), 59(4), 379-393.

Morissan. (2013). *Teori Komunikasi : Individu Hingga Massa*. Kencana Prenada Media Group.

Mubyarto. (1988). *Strategi Pembangunan, dalam Majalah Prisma No.1/Tahun XVII.* . LP3ES.

Mulder, P. (2018). Lasswell Communication Model. Diakses 1 September 2023 dari Toolshero: https://www.toolshero.com/communication-methods/lasswell-communication-model/

Mulyandari, S. & Hartati, R.S. (2011). Pengembangan Sistem Informasi untuk Meningkatkan Keberdayaan Petani Sayuran dalam Proses Pengambilan Keputusan Usaha Tani. Kerjasama Badan Litbang Pertanian Kementan dengan Care IPB, melalui project KKP3T. Bogor.

Mundlak, Y. (2000). *Agriculture and Economic Growth Theory and Measurement*. Harvard University Press.

Murom, S. (2020). *Komunikasi Sosial Pembangunan.* Unikom.

Nasor, M. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Komunikasi Interpersonal.* IAIN Raden Intan Lampung.

Nasution, Z. (2001). *Komunikasi Pembangunan, Pengenalan Teori Dan Penerapannya*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS, 1 (2)*.

Notoatmodjo, S. (2009). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Rineka CIpta.

Nugroho, M. A. (2022). Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup: Upaya Penanaman Kesadaran Lingkungan. *Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, *1*(2), 93–108

O'Flaherty, J., & Liddy, M. (2018). *The impact of development education and education for sustainable development interventions: a synthesis of the research*. *Environmental Education Research*, *24*(7), 1031–1049.

Olahkarsa. (2023). Community Development (Pengertian, Aspek, Tujuannya). https://blog.olahkarsa.com/community-development-pengertian-aspek-dan-tujuannya/.

Olivia, H. & Pikri, N. (2020). Komunikasi Pembangunan Keluarga Kelurahan Angke dalam Meningkatkan Kehidupan Masyarakat (Studi Kasus: Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Kalijodo). *Journal Komunikasi*, *11*(1), 61–66.

Omri, A. (2020). *Technological innovation and sustainable development : Does the stage of development matter? Environmental Impact Assessment Review*, *83*, 106398. https://doi.org/10.1016/j.eiar.2020.106398

Pangestu, A., Syah, S., Fikri, S., & Iskandar, I. (2023). Pendidikan dan Pendidikan Bahasa dalam Membangun Peradaban Bangsa Indonesia. *Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan*, *5*, 1281–1290.

Parwati, D. & Pithaloka, D. (2022). Perilaku Komunikasi Kepala Desa dalam Pembangunan Desa Suka Makmur Kabupaten Kampar. *Journal of Political Communication and Media*, *1*(1), 50–60.

Paul, B. (2008). *a History of the Concept of Sustainable Development: The Annals of the University of Oradea, Economic Sciences Series*. Vol.17(2), 576–580.

Pertanian, D. (2009). *Program Revitalisasi Penyuluhan Pertanian (Kegiatan Tahun 2005)*. http://www.departemenpertanian.go.id/bpsdm/tampil.php?page=penyuluhan

Pettinger, T. (2019). *Investment and economic growth*. https://www.economicshelp.org/blog/495/economics/investment-and-economic-growth/.

Pradiptyo, R., Satria, D., Shohibuddin, M., Sriwiyanto, H., Maisyarah, S., Radjawali, I., & Puteri, J. (2018). *Satu Indonesia;*

Strategi Pembangunan Berkelanjutan, Adil Dan Mandiri.

Pratama, R.H. (2021). Studi Kasus pengaruh Dana Desa terhadap Peningkatan Aset Desa Waru Jaya Menggunakan Sustainable Livelihood Impact Assessment Method. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*. 5(2): 109–118.

Pratiwi & Yuniasanti, R. (2014). Hubungan antara Model Komunikasi Dua Arah antara Atasan dan Bawahan dengan Motivasi Kerja pada Bintara di Polresta Yogyakarta. *Jurnal Sosiologi*.

Putri, R.N., & Ash Shidiqie, J.S. (2023). Analisis faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Indonesia tahun 2015-2020. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan*, *1*(2), 220–225.

Quebral, N. C. (1972). Development Communication. *Solidarity.* 7(6): 39–44

Ramah, M. (2019). Komunikasi Pembangunan Dalam Perspektif Terkini. *Academica: Majalah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 145–151.

Rayhan, B.H. (2021). *Strategi Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Sosial Ekonomi Dan Kestabilan Lingkungan Secara Nasional Dan Regional*.

Republik Indonesia, CIDA, UNICEF. (2009). *MDGs Millenium Development Goals (Tujuan Pembangunan Milenium): Mutlak Dicapai, 2015!* Diambil kembali dari nawasis.org: https://www.nawasis.org/portal/digilib/read/mdgs-millenium-development-goals-tujuan-pembangunan-milenium-mutlak-dicapai-2015-/2700

Rizkie. (2013). *Agent of Reinvestment Dalam Perubahan Masyarakat Tradisional*. http://rizkie-library.blogspot.com/2015/09/agent-of-reinvestment-dalam-perubahan.html

Rogers, E. M. (2010). *Diffusions of Innovations, Forth Edition*. New York: Tree Press.

Saleh, C. (2020). *Konsep, Pengertian, dan Tujuan Kolaborasi.* Jakarta: Universitas Terbuka.

Salsabila, A. (2023). Mengenal Community Development atau Pembangunan Masyarakat Tulisan ini diambil dari sumber: https://lindungihutan.com/blog/pengertian-community-development/.

Saragih, J. P. (2016). Tantangan Kebijakan Pengembangan Sektor Pertanian di Masa Mendatang. *Kajian*, *21*(2), 105–123.

Sayoga, P., & Tan, S. (2017). Analisis cadangan devisa Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, *12*(1), 25–30.

Schramm, W. (1964). *Mass Media and National Development : The Role Information in Developong Countries*. Stanford University Press.

Servaes J. (2008). *Communication for Development and Social Change*. New Delhi, India (IN): Sage

Setiadi, E. & Kolip, U. (2011). *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya.* Jakarta (ID): Kencana.

Setiawan, D., & Zahra, A. (2023). Pengelompokan Kemiskinan di Indonesia Menggunakan Time Series Based Clustering. *Inferensi*. Vol.6(1), 83.

Setiawan, H.H. (2019). Merumuskan Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) di Indonesia. *Sosio Informa*. Vol.*5*.

Setiawan, I. (2007). Upaya Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutanmelalui Pendidikan Lingkungan. *Jurnal Geografi*. Vol.*7*(1).

Siagian, S.P. (2005). *Filsafat Administrasi*. CV. Gunung Agung.

Silvestre, B.S. & Ţîrcă, D.M. (2019). *Innovations for sustainable development: Moving toward a sustainable future*. *Journal of Cleaner Production*, *208*, 325–332.

Sjafari, A. (2011). Pembangunan Desa Berbasis Komunitas (Kasus Di Provinsi Banten). *Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah* (hal. 118-122). Serang (ID): LAB-ANE FISIP Untirta.

Smith, I. (1974). *Becoming Modern : Individual In Six Developing Countries*. Harvard University Press.

Soekanto, S. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar.* Jakarta: Rajawali Press

Soerjani, M. (1992). *Ekologi Sebagai Dasar Pemahaman tentang Lingkungan Hidup.* . Serasi No. 24.

Soetomo (2013). Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Cet.Ke 4, h.7.

Sunarti, E. (2012). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Masyarakat. Diakses 1 September 2023. http://euissunarti.staff.ipb.ac.id/files/2012/03/Dr.-Euis-Sunarti-Partisipasi-Masyarakat-dalam-Pembangunan-Masyarakat.pdf.

Suprijadi, B. (2018). Model Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Sebagai Sarana untuk Implementasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa di Provinsi Jawa Timur. https://csws.fisip.unair.ac.id/2018/03/model-pemberdayaan-kelompok-masyarakat-sebagai-sarana-untuk-implementasi-undang-undang-no-6-tahun-2014-tentang-desa-di-provinsi-jawa-timur-bambang-suprijadi/.

Suryani, E. & Rachman H.P.S, (2008). Perubahan Pola Konsumsi Pangan Sumber Karbohidrat Di Perdesaan. PANGAN. Edisi No. 52/XVIl.

Todaro, Michael, P., Smith, Stephen, C. (2003). Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga. Edisi Kedelapan, Erlangga Surabaya.

Urbanowitz, S.C. & Wilcox M.D. (2014). *Examining Extension's Capacity in Community Resource and Economic Development: Viewpoints of Extension Administrators on the Role of Community Resource and Economic Development in the Extension Portfolio*. Journal of Extension [Online], 51(5), Article 5FEA2.

Usman, H. (2010). *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan. Edisi 3*. PT. Bumi Aksara.

Utama, A & Murfhi, A. (2017). Analisis Hubungan Kemitraan Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat dalam Pelaksanaan Corporate Social Responbility (CSR) PT Vale Indonesia Bidang Pendidikan dan Kesehatan Kabupaten Luwu Timur. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Volume 10, Nomor 2. (115-127).

Walandouw, C.H. (1988). *Materi Pokok Psikologi Industri*. Karunika Universitas Terbuka.

Wibawa, K.C.S. (2019). Mengembangkan Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Administrative Law & Governance Journal*, *2*(1), 79–92.

Widodo, A. (2021). Strategi Komunikasi Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Daerah. SELASAR KPI : Referensi Media Komunikasi dan Dakwah. 1(1). P-ISSN 2654-8372. E-ISSN 2808-1994.

Widyaningsih, N.D. (2013). Hubungan antara Tingkat Pendidikan Masyarakat dengan Kesadaran Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi Korelasi di Desatemuwangi Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten Tahun 2009-2010).
https://www.neliti.com/publications/241510/hubungan-

antara-tingkat-pendidikan-masyarakat-dengan-kesadaran-masyarakat-dalam

Wijekoon RSE, Rizwan MFM, Sakunthalarathanayaka RMM, Anurarajapa HG. (2009). Cyber Extension: *An Informatio n and Communication Technology Initiative for Agriculture a nd Rural Development in Sri Lanka*. [terhubung berkala]

Wilkins, K.G., Thomas, T., & Obregon, R. (2014). *The Handbook of Development Communication and Social Change*. West Sussex (GB): J Wiley.

Wordpress. (2023). Pembangunan dan Keadilan Sosial ~ Development and Social Justice. https://alpensultra.wordpress.com/resources-and-links/links/development/.

World Health Organization. (2018, Februari 19). *Milenium Development Goals (MDGs)*. Diambil kembali dari https://www.who.int/: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/millennium-development-goals-%28mdgs%29

Wulandari, R., Sugianto, & Aminda, R.S. (2022). Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Utang Luar Negeri di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, *3*(1).

Wuryasti, F. (2022). Perluas Pembangunan Infrastruktur untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi. https://mediaindonesia.com/ekonomi/472532/perluas-pembangunan-infrastruktur-untuk-mendorong-pertumbuhan-ekonomi.

Yusuf, M. F. (2021). *Buku Ajar Pengantar Ilmu Komunikasi.* Yogyajarta: Pustaka Ilmu.

Zahara, E. (2018). Peranan Komunikasi dalam Pembangunan Masyarakat Pedesaan. Jurnal Warta. ISSN : 1829 – 7463.

Zubaedi. (2013). *Pengembangan Masyarakat "Wacana dan Praktik."*

BIODATA PENULIS

Dr Tatik Yuniarti, M.I.Kom lahir di Klaten, Jawa Tengah, pada 26 Oktober 1982 dari pasangan Bapak Slamet Ciptorahardjo dan Ibu Sukinem. Menikah dengan Hamluddin dan dikaruniai dua orang putra bernama Nasri Shirat Elhaq dan Hanif Raihan Malik.

Pendidikan sarjana S1 diselesaikan penulis tahun 2005 pada program studi Ilmu Komunikasi di Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta. Selanjutnya tahun 2010 melanjutkan program pascasarjana S2 pada program Corporate Communication di Universitas Paramadina dengan Fellowship for journalist dari PT Indika Energi. Pendidikan pascasarjana S3 ditempuh atas pembiayaan beasiswa dari LPDP program BUDI DN (Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia) Dalam Negeri di Jurusan Komunikasi Pembangunan, Pertanian, dan Pedesaan Institut Pertanian Bogor (IPB) lulus tahun 2021.

Penulis merupakan tenaga pendidik di Universitas Islam 45 (Unisma) Bekasi pada program studi Ilmu Komunikasi sejak tahun 2007. Pada Juni tahun 2009 selama dua pekan, penulis berkesempatan menimba ilmu jurnalistik di Radio Nederland Wereldomroep (RNW) di Belanda yang merupakan hadiah dari kompetisi Indonesia Radio Award Yusuf Ronodipuro Award. Selain menulis opini di media massa, penulis juga aktif mempublikasikan penelitiannya melalui jurnal nasional maupun internasional serta aktif dalam kegiatan konferensi internasional dan mempublikasikan makalahnya dalam prosiding internasional terindeks. Rekam jejak riset diakses di SINTA ID: 6758631 dan di https://scholar.google.co.id/citations?user=5yQ1IxgAAAAJ&hl=id.

Yoenita Jayadisastra, S.ST., M.Si. di Muna Barat pada tanggal 17 Juni 1987. Menyelesaikan Pendidikan Strata 1 di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor pada tahun 2009, yang kemudian melanjutkan pendidikan Magister di Universitas Sebelas Maret Surakarta dari Tahun 2011-2013. Dan saat ini penulis sedang melanjutkan pendidikan Doktoral di Universitas Halu Oleo Prodi Ilmu Pertanian.

Penulis saat ini bekerja sebagai dosen pada Jurusan Penyuluhan Pertanian Universitas Halu Oleo yang terletak di Kota Kendari, Kota Anoa julukannya. Penulis aktif terlibat di kegiatan penelitian CSR atau Comdev pada sektor Pertambangan yang saat ini sedang menjadi sumber utama mata pencaharian warga Sulawesi Tenggara. Fokus kegiatan penelitian dan pengabdian penulis saat ini adalah pada lingkup pemberdayaan masyarakat pesisir dan pedesaan. Selain itu penulis juga aktif menulis di beberapa bidang ilmu, misalnya Komunikasi Pendidikan, Psikologi Pendidikan, Komunikasi Pembangunan dan masih ada beberapa kolaborasi buku yang penulis akan rampungkan. Penulis berharap, dengan berbuat maka akan memberikan kontribusi pada masyarakat luas.

Biografi

Dr. Hayu Lusianawati, M.Si, lahir di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 1976. Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana di Institut Pertanian Stiper Yogyakarta sebagai Sarjana Teknik Pertanian pada tahun 1998. Penulis menyelesaikan program Magister Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta pada tahun 2010. Penulis kemudian mengambil program doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta yang kemudian diselesaikan pada tahun 2019 silam.

Penulis saat ini berprofesi sebagai dosen di Universitas Sahid Jakarta. Selain aktif di kampus, penulis juga aktif di komunitas sosial yakni Komunitas Perempuan Ungu sejak tahun 2010. Kecintaan penulis di bidang sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan perempuan. Saat ini penulis aktif di Pusat Studi Gender Universitas Sahid, DPP Perempuan ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia), ASPIKOM (Asosiasi Prodi Ilmu Komunikasi) dan ISKI (Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia).

Garcia Krisnando Nathanael, S.Sos., M.Si, lahir di Jakarta 23 Desember 1990. Telah menyelesaikan studi S1 Hubungan Internasional di IISIP Jakarta tahun 2012 serta Magister Corporate Communication di London School of Public Relation (LSPR) Jakarta pada tahun 2015. Pernah bekerja sebagai Manager Corporate Communication di salah satu Perusahaan IT di Jakarta. Saat ini adalah dosen tetap Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta. Mengampu mata kuliah Komunikasi dan Media Global, Teori dan Praktek Diplomasi, Diplomasi Publik, dll. Penulis juga sedang menempuh program Doktoral di IPB.

Ulfia, S.E, M.Si, lahir di Padang Tiji (Aceh) pada tanggal 20 Februari 1987. Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana pada Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) tahun 2010. Penulis menyelesaikan pendidikan magister pada Program Studi Ilmu Ekonomi, Pascasarjana Universitas Syiah Kuala tahun 2013. Penulis bekerja sebagai tenaga pengajar non-PNS di Program Studi Ekonomi Akuntasi, FE Universitas Serambi Mekkah tahun 2015-sekarang. Penulis aktif mengikuti seminar, aktif mempublikasi artikel pada jurnal nasional.

La Ode Muhammad Rauda Agus Udaya Manarfa, S.Sos., M.Si., lahir di Gelora (Jakarta Pusat) pada tanggal 18 November 1984. Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana pada Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Dayanu Ikhsanuddin (UNIDAYAN) tahun 2008. Penulis menyelesaikan pendidikan Magister pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin (UNIDAYAN) tahun 2012. Penulis bekerja sebagai Dosen pada Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Dayanu Ikhsanuddin (UNIDAYAN) Baubau.

Dr. Ramainim Saragih, S.P., M.A., lahir di Pematangsiantar 13 Oktober 1973. Menempuh Pendidikan di Universitas Simalungun (S1), School for International Training, Brattleboro Amerika Serikat (S2), Institute Pertanian Bogor (S3). Penulis merupakan Tenaga Pengajar di Prodi Magister Manajemen Sekolah Pasca Sarjana dan Prodi Agribisnis, Universitas Simalungun (USI).

Abdul Syaban, S.Pd., M.Pd., M.M lahir di Anggoeya (Kendari) pada tanggal 2 Mei 1992. Penulis menikah dengan seorang perempuan yang bernama Dinan Azmi Solichin, S.Ak.,M.M tahun 2022 dan telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Nazirul Syaban. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sarjana pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Halu Oleo (UHO) tahun 2015. Penulis menyelesaikan Pendidikan Magister pada Program Studi Pendidikan Ilmu Sosial, Konsentrasi Pendidikan Pendidikan Kewarganegaraan pada Pascasarjana Universitas Halu Oleo (UHO) tahun 2017. Penulis juga menyelesaikan Pendidikan Magister untuk yang kedua kalinya pada program studi Manajemen Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia pada Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari tahun 2022. Saat ini penulis sedang menempuh Pendidikan Program Doktor di Program Studi Manajemen Konsentrasi Manajemen Pendidikan di Pascasarjana Universitas Halu Oleo (UHO). Penulis bekerja sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi

Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari pada November 2019 sampai sekarang.

Penulis aktif dalam melaksanakan Trdiharma Perguruan Tinggi yakni Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta penulis terlibat sebagai pengurus dalam beberapa organisasi sosial kemasyarakatan.

Osu Oheoputra Husen, S.Pd, M.Si, lahir di Kendari pada tanggal 12 Oktober 1989. Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana pada Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Halu Oleo (UHO) tahun 2012. Kemudian menyelesaikan pendidikan magister pada Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Minat Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana Universitas Halu Oleo tahun 2014. Penulis bekerja sebagai Dosen Aktif di Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Lakidende Unaaha pada tahun 2017 sampai sekarang.

Penulis aktif mengikuti seminar, aktif mempublikasi artikel penelitian dan pengabdian masyarakat pada jurnal nasional terakreditasi dan internasional terindeksi scopus. Penulis aktif menulis buku dan memiliki hak paten sederhana.

Kunandar Prasetyo, S.P, M.Si lahir di Brebes pada tanggal 1 November 1992. Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana pada Program Studi Agribisnis, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Jenderal Soedirman tahun 2015. Penulis menyelesaikan pendidikan magister pada Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor tahun 2019. Penulis bekerja sebagai Dosen di Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Universitas Jenderal Soedirman pada Maret 2022 - sekarang. Beberapa mata kuliah yang pernah diajar, antara lain Dasar Manajemen, Ekonomi Lingkungan, Perilaku Organisasi, Riset Operasi Lanjut, Agrotechnopreneurship, Perdagangan Internasional serta Pemasaran Agribisnis

Penulis aktif mengikuti seminar nasional maupun internasional, aktif mempublikasi artikel pada jurnal nasional dan internasional bereputasi. Penulis juga aktif sebagai reviewer pada jurnal nasional bereputasi.

Dr. Risyart Alberth Far Far, M.Si. Penulis dilahirkan di Ambon tanggal 21 Oktober 1979. Penulis adalah dosen pada Fakultas Pertanian Jurusan Sosial Ekonomi. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Pertanian Program Studi Sosial Ekonomi (SOSEK) pada Tahun 2002 kemudian melanjutkan pendidikan strata dua (S2)/spesialis di Institut Pertanian Bogor Program Studi Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan dan melanjutkan S3 pada kampus yang sama yaitu Institut Pertanian Bogor dengan Program Studi Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, Mata Kuliah yang di ampuh Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, Strategi Komunikasi dalam Penyuluhan, Modal Sosial, Teknologi Informasi Pertanian. Penulis telah menghasilkan berbagai publikasi pada jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal Internasional terindex Scopus.

KOMUNIKASI SOSIAL PEMBANGUNAN TERPADU

Selama beberapa waktu, komunikasi telah digunakan untuk tujuan pembangunan. Komunikasi dalam pembangunan harus berkaitan dengan arah perubahan yang lebih baik atau lebih maju dari keadaan sebelumnya. Pada dasarnya, pembangunan terdiri dari minimal tiga elemen: pertama, komunikator pembangunan yang dapat berasal dari pemerintah atau masyarakat; kedua, pesan tentang konteks pembangunan di mana terdapat gagasan-gagasan yang disampaikan; dan komunikan, terkait dengan penerima informasi pembangunan yang merupakan masyarakat umum, termasuk warga desa atau kota yang menjadi sasaran pembangunan.

Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan upaya secara sadar dan sistematis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek lingkungan.

Semakin berkembangnya zaman, kapasitas masyarakat perlu ditingkatkan dalam mengelola sumber daya dan memecahkan masalah secara terpadu. Untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya dan menyelesaikan permasalahan secara terpadu, terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan. Pendekatan strategi dan perencanaan pembangunan dikupas tuntas dalam buku ini.

No Anggota IKAPI : 022/SSL/2019
Workshop : JL. Rappocini Raya Lr.II A No 13 Kota Makassar
Redaksi : JL. Muhktar dg Tompo Kabupaten Gowa
Perumahan Nayla Regency Blok D No 25
Telp. (0411) 8987659 Hp. 085299993635
https://toharmedia.co.id

ISBN 978-623-8421-08-4